

ANALISIS KESEJAHTERAAN PETANI 2025



PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
2025

Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2025

**Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
2025**

Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2025

Ukuran Buku : 10,12 inci x 7,17 inci (B5)

Jumlah Halaman isi: 163 halaman

Penanggung Jawab:

Intan Rahayu, S.Si., M.T.

Penyunting/Editor.:

Mokhamad Subehi, S.P.

Sri Wahyuningsih, S.Si.

Penulis Artikel:

Ir. Wieta B. Komalasari, M.Si.

Ir. Sabarella, M.Si.

Megawati Manurung, S.P.

Sehusman, S.P.

Yani Supriyati, S.E.

Rinawati, S.E.

Karlina Seran, S.Si.

Maidiah Dwi Naruri S., S.Si.

Vira Desita Amara, A.Md.Stat.

Layout:

Yani Supriyati, S.E.

Desain cover :

Rinawati, S.E.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian

Kampus Kementan, Gedung D, Lantai IV, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta

Telp./Fax (021) 780-5305

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga publikasi "**Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2025**" telah dapat diselesaikan. Publikasi ini merupakan salah satu keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dalam mengemban visi dan misinya untuk mempublikasikan data sektor pertanian beserta hasil analisisnya.

Publikasi Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2025 memuat informasi tentang tingkat kesejahteraan petani berdasarkan data dan informasi yang tersedia diantaranya data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan NTP yang bersumber dari BPS.

Dengan diterbitkannya publikasi ini diharapkan para pembaca dapat memperoleh gambaran tentang kesejahteraan petani di Indonesia. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kritik dan saran dari segenap pembaca sangat diharapkan guna dijadikan dasar penyempurnaan dan perbaikan untuk penerbitan publikasi berikutnya.

Jakarta, November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Intan Rahayu, S.Si., M.T
Pembina Utama Muda/IVc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Dan Sasaran.....	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
BAB II. METODOLOGI	5
BAB III. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA PERTANIAN.....	9
3.1. Gambaran Umum Pembangunan Kualitas Hidup Manusia	9
3.2. Gambaran Umum Rumah Tangga Pertanian	12
3.3. Karakteristik Kepala dan Anggota Rumah Tangga Pertanian	15
3.4. Karakteristik Perumahan dan Pemukiman	19
3.5. Perlindungan Sosial.....	48
BAB IV. KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PERTANIAN.....	71
4.1. Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia	71
4.2. Kesejahteraan Petani dengan Pendekatan SDGs Pertanian	87
4.3. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pertanian.....	94
4.4. Nilai Indeks Gini.....	112
4.5. Kemiskinan di Pedesaan.....	115
4.6. Nilai Tukar Petani.....	119
BAB V. PENUTUP.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	145

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Selisih IPM menurut Provinsi, 2023 – 2025.....	10
Tabel 3.2.1.	Persentase Rumah Tangga Pertanian dan Rumah Tangga Non Pertanian di Indonesia, 2023 - 2025	13
Tabel 3.2.2.	Persentase Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor, 2024 - 2025.....	14
Tabel 3.3.1.	Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) Usaha di Pertanian, Buruh Tani dan Rumah Tangga Lainnya di Indonesia, 2023 - 2025.....	16
Tabel 3.3.2.	Rata- Rata Umur Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Rumah Tangga, 2023 - 2025.....	18
Tabel 3.4.1.	Persentase Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Jawa Dan Luar Jawa Rumah Tangga Pertanian dan non pertanian, 2023 - 2025	20
Tabel 3.4.2.	Persentase Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Jawa dan di Luar Jawa Menurut Subsektor, 2025	21
Tabel 3.4.3.	Persentase Jenis Atap Terluas Pada Rumah Tangga Pertanian, Rumah Tangga Buruh Tani dan Rumah Tangga Non Pertanian di Jawa dan Luar Jawa, 2023 - 2025	22
Tabel 3.4.4.	Persentase Jenis Atap Terluas pada Rumah Tangga Pertanian dan Buruh Tani di Jawa Dan Luar Jawa menurut subsektor, 2025.....	23
Tabel 3.4.5.	Persentase Jenis Dinding Terluas pada Rumah Tangga di Jawa dan Luar Jawa, 2023 - 2025.....	24
Tabel 3.4.6.	Persentase Jenis Dinding Terluas pada Rumah Tangga Subsektor, 2025	25
Tabel 3.4.7.	Persentase Jenis Lantai Terluas pada Rumah Tangga Pertanian di Wilayah Jawa dan Luar Jawa, 2023 - 2025	26

Tabel 3.4.8.	Persentase Jenis Lantai Terluas pada Rumah Tangga Pertanian menurut Subsektor, 2025.....	27
Tabel 3.4.9.a	Persentase Penggunaan Sumber Air Minum menurut Jenisnya di Rumah Tangga Pertanian, 2023 - 2025	28
Tabel 3.4.9.b	Persentase Penggunaan Sumber Air Minum menurut Jenisnya di Rumah Tangga Buruh Tani, 2023 - 2025	29
Tabel 3.4.9.c	Persentase Penggunaan Sumber Air Minum menurut Jenisnya di Rumah Tangga Non Pertanian, 2023 - 2025	31
Tabel 3.4.10a	Persentase Penggunaan Sumber Air Minum menurut Subsektor Rumah Tangga Pertanian di Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, 2025	33
Tabel 3.4.10b	Persentase Penggunaan Sumber Air Minum menurut Subsektor Rumah Tangga Buruh Tani di Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, 2025	34
Tabel 3.4.11a.	Persentase Penggunaan Fasilitas BAB di Rumah Tangga Pertanian dan Rumah Tangga Buruh Tani di Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, 2023 - 2025	36
Tabel 3.4.11b.	Persentase Penggunaan Fasilitas BAB di Rumah Tangga Non Pertanian di Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, 2023 - 2025	38
Tabel 3.4.12a	Persentase Penggunaan Fasilitas BAB menurut Subsektor Rumah Tangga berusaha Pertanian di Jawa, Luar Jawa dan, Indonesia 2025	39
Tabel 3.4.12b	Persentase Penggunaan Fasilitas BAB menurut Subsektor Rumah Tangga Buruh Tani di Jawa Luar Jawa dan, Indonesia 2025	40
Tabel 3.4.13.	Persentase Penggunaan Sumber Penerangan di Rumah Tangga berusaha di Pertanian dan Rumah Tangga Buruh Tani dan non Pertanian, 2023 - 2025.....	41
Tabel 3.4.14.	Persentase Penggunaan Sumber Penerangan berdasarkan Subsektor di Rumah Tangga Berusaha di Pertanian dan Rumah Tangga Buruh Tani, 2025.....	43
Tabel 3.4.15a.	Persentase Penggunaan Bahan Bakar berdasarkan Sektor di Rumah Tangga berusaha di Pertanian, 2023 – 2025.....	44

Tabel 3.4.15b. Persentase Penggunaan Bahan Bakar berdasarkan Sektor di Rumah Tangga Buruh Tani, 2023– 2025.....	45
Tabel 3.4.15c. Persentase Penggunaan Bahan Bakar berdasarkan Sektor di Rumah Non Pertanian, 2023– 2025.....	46
Tabel 3.4.16. Persentase Penggunaan Bahan Bakar berdasarkan Subsektor Rumah Tangga berusaha di Pertanian dan Rumah Tangga Buruh Tani Buruh Tani 2025	47
Tabel 3.5.1. Persentase Rumah Tangga Berusaha di Pertanian, Buruh Tani dan Non Pertanian Penerima BPNT, 2023 - 2025.....	50
Tabel 3.5.2. Persentase Rumah Tangga Berusaha di Pertanian dan Rumah Tangga Buruh Tani Penerima BPNT Berdasarkan Subsektor, 2023 - 2025	51
Tabel 3.5.3. Persentase Rumah Tangga Berusaha di Pertanian, Buruh Tani dan Non Pertanian yang Menerima Kredit Menurut Jenis Kredit Usaha, 2023 - 2025.....	53
Tabel 3.5.4. Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha KUR Menurut Wilayah, 2023 - 2025	55
Tabel 3.5.5. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusaha di Pertanian dan Buruh Tani yang Menerima Kredit Usaha KUR menurut Wilayah, 2023 - 2025.....	57
Tabel 3.5.6. Persentase Anggota Rumah Tangga Pertanian yang Menerima Kredit Usaha KUR menurut Provinsi, 2023 - 2025	59
Tabel 3.5.7. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dari PNM-Mekaar menurut Wilayah, 2025	60
Tabel 3.5.8. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusaha di Pertanian dan Buruh Tani yang Menerima Kredit PNM-Mekaar menurut Wilayah, 2024 – 2025.....	61
Tabel 3.5.9. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Berstatus Kawin/Cerai, 2023 - 2025	62
Tabel 3.5.10 Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Berstatus Kawin/Cerai per Subsektor, 2023 - 2025	64

Tabel 3.5.11. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas di Rumah Tangga Pertanian menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 2023-2025	65
Tabel 3.5.12. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan per subsektor Tahun 2025.....	67
Tabel.3.5.13. Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat/cara berobat, 2023-2025	68
Tabel 3.5.14. Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat/cara berobat per subsektor tahun 2025	69
Tabel 4.1.1. Jumlah dan Persentase Petani Skala Kecil serta Bukan Petani Skala Kecil Menurut Provinsi, 2023	74
Tabel 4.1.2. Indikator SDGs 2.3.1 Produktivitas Per Hari Kerja Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil Menurut Provinsi, 2023.....	77
Tabel 4.1.3. Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja Menurut Kelas usaha Tani Tanaman/Peternakan/Perikanan/Kehutanan, 2019-2023.....	80
Tabel 4.1.4. Indikator 5.a.1 Kepemilikan Hak yang Aman Atas Lahan Pertanian Menurut Provinsi, 2023	82
Tabel 4.1.5. Persentase Lahan Pertanian Berkelanjutan pada Subindikator Nilai Produksi per Hektar Menurut Provinsi di Indonesia, 2024	86
Tabel 4.2.1. Indikator SDGS Pertaian 2025 (dalam persen)	90
Tabel 4.3.1. Persentase Rumah Tangga Pertanian Menurut Sumber Penghasilan Terbesar di Jawa -Luar Jawa, 2023-2025	98
Tabel 4.3.2. Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2025.....	101
Tabel 4.3.3. Persentase Pengeluaran untuk Makanan dan non Makanan di RTP Jawa-Luar Jawa, 2022-2024	103
Tabel 4.3.4 Rata-rata pengeluaran RTP per kapita untuk makanan dan non makanan dalam sebulan di Jawa – Luar Jawa, 2023 - 2025	104

Tabel 4.3.5.	Distribusi Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan, Tahun 2025	106
Tabel 4.3.6.	Persentase Rumah Tangga menurut Kuantil pengeluaran per Kapita, Tahun 2025	108
Tabel 4.3.7.	Pengeluaran untuk Makanan dan Bukan Makanan Menurut Subsektor, Tahun 2025.....	110
Tabel 4.4.1.	Nilai Gini Ratio Pada Rumah Tangga Tani, Buruh Tani dan Non Pertanian, Tahun 2023 – 2025	113
Tabel 4.5.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, di Rumah Tangga Tani dan Buruh Tani, 2023 – 2025	117
Tabel 4.5.2.	Jumlah Penduduk Miskin di Rumah Tangga Pertanian dan Buruh Tani menurut per Sub Sektor, 2023 - 2025.....	118
Tabel 4.6.1.	Perkembangan It, Ib, NTP dan NTUP Nasional, 2023 - 2025	122
Tabel 4.6.2.	Perkembangan IT, IB, NTP dan NTUP Sub Sektor Tanaman Pangan, 2023 - 2025	126
Tabel 4.6.3.	Perkembangan IT, IB, NTP dan NTUP Sub Sektor Hortikultura, 2023 - 2025	128
Tabel 4.6.4.	Perkembangan IT, IB, NTP dan NTUP Sub Sektor Perkebunan Rakyat, 2023 - 2025	129
Tabel 4.6.5.	Perkembangan IT, IB, NTP dan NTUP Sub Sektor Peternakan, 2022-2025	131
Tabel 4.6.6.	Perkembangan IT Menurut Provinsi, 2023 - 2025.....	132
Tabel 4.6.7.	Perkembangan IB Menurut Provinsi, 2023 - 2025.....	135
Tabel 4.6.8.	Perkembangan NTP Menurut Provinsi, 2023 - 2025.....	137
Tabel 4.6.9.	Perkembangan NTUP Menurut Provinsi, 2023 - 2025	139

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1.1. IPM 34 Provinsi di Indonesia berdasarkan Kategori UNDP Tahun 2025	12
Gambar 3.3.1. Persentase RTP Indonesia menurut Subsektor, 2025.....	16
Gambar 3.3.2. Persentase Anggota Rumah Tangga Petani Menurut Kelompok Umur Per Subsektor, 2025.....	17
Gambar 3.3.3. Persentase Kepala Rumah Tangga Usaha di Pertanian menurut Tingkat Pendidikan, 2023 - 2025.....	18
Gambar 3.3.4. Persentase Kepala Rumah Tangga Pertanian berdasarkan Gender, 2023 - 2025.....	19
Gambar 3.5.1. Persentase Rumah Tangga Berusaha di Pertanian yang Menerima Kredit Usaha menurut Jenis Kredit, 2023	54
Gambar 3.5.2. Persentase Penerimaan Kredit Usaha KUR oleh Rumah Tangga Berusaha di Pertanian, Buruh Tani dan Non Pertanian, 2022 – 2024	56
Gambar 3.5.3. Perkembangan Persentase Penerimaan Kredit PNM-Mekar oleh Rumah Tangga, 2024	60
Gambar 3.5.4. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Berstatus Kawin/Cerai, 2023 - 2025	63
Gambar 3.5.5. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas di Rumah Tangga Pertanian Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, 2023 –2025.....	66
Gambar 4.1.1. Persentase Petani di Indonesia Menurut Skala Usaha, 2023 ..	74
Gambar 4.1.2. Pendapatan Petani menurut Skala Usaha, 2023	76
Gambar 4.1.3. Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja Menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/Peternakan/Perikanan/Kehutanan, 2019-2003	78
Gambar 4.1.4. Kepemilikan Lahan Pertanian yang Aman antara Laki-Laki	

dan Perempuan, 2023	81
Gambar 4.1.5. Persentase Lahan Pertanian Berkelanjutan pada Subindikator Nilai Produksi per Hektar di Indonesia, 2024	85
Gambar 4.2.1. Jumlah Petani Total dan PerSub Sektor Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023	88
Gambar 4.2.2. Jumlah Petani Total, Pengguna Lahan dan Gurem Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023	88
Gambar 4.2.3. Nilai PoU Tahun 2023	91
Gambar 4.2.4. Proporsi Penduduk yang Sakit dan Tidak Berobat serta Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok, Tahun 2025	92
Gambar 4.2.5. SDGs 4.1.2*(a) Tingkat Penyelesaian Pendidikan Tahun 2025	93
Gambar 4.2.6. Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak dan Menggunakan Bahan Bakar Gas untuk Memasak, Tahun 2025	93
Gambar 4.2.7. Proporsi Rumah Tangga yang Tinggal di Rumah Layak Huni dan Memiliki Sanitasi Layak, Tahun 2025	94
Gambar 4.3.1. Perbandingan Pendapatan Petani Hasil SEP 2024	95
Gambar 4.3.2. Pendapatan Bersih Petani Skala Kecil Hasil SEP 2024	96
Gambar 4.3.3. Persentase Pengeluaran untuk Makanan menurut Jenis Rumah Tangga, Tahun 2025	101
Gambar 4.3.4. Proporsi Pengeluaran RTP Untuk Makanan dan Non Makanan, 2025	102
Gambar 4.3.5. Rata-rata Pengeluaran Nominal untuk Makanan dan Bukan Makanan per Kapita Selama Sebulan, 2023-2025	103
Gambar 4.3.6. Persentase Rumah Tangga Kuantil 1 dan 5, Tahun 2025 ..	109
Gambar 4.3.7. Pengeluaran untuk Makanan menurut Subsektor, Tahun 2025	111
Gambar 4.4.1. Nilai Gini Ratio pendapatan di Rumah Tangga Tani dan Buruh Tani, 2023-2025	114

Gambar 4.4.2. Nilai Gini Ratio Pendapatan di Rumah Tangga Non Pertanian, 2023-2025	115
Gambar 4.6.1. Perkembangan NTP dan NTUP Nasional Bulanan, Januari 2022 sd Oktober 2025(Tahun Dasar 2018 = 100)	124

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu dari visi dan misi pembangunan pertanian dalam mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini tingkat kesejahteraan petani baru diukur dari besaran Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP), kemiskinan di perdesaan dan gini rasio di perdesaan. Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks yang diterima petani (IT) dengan indeks yang dibayar petani (IB) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) merupakan ukuran kemampuan rumah tangga pertanian dalam memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya, karena keterbatasan dari penghitungan dengan asumsi produksi tetap yang berubah hanya harga, maka dianggap kurang dapat mencerminkan kesejahteraan petani. Kemiskinan di perdesaan merupakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada Rumah Tangga Pertanian (RTP). Gini rasio atau indeks gini merupakan ukuran ketimpangan atau pemerataan pendapatan di suatu wilayah.

Selain NTP dan NTUP, kemiskinan dan gini rasio, ada beberapa indikator yang juga dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani, diantaranya adalah data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga pertanian yang diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Analisis konsumsi ini dihitung melalui proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan pada rumah tangga dengan sumber utama pendapatannya dari pertanian. Secara teori, Ernest Engel (1857) menuliskan bahwa apabila tidak terdapat perbedaan selera, maka persentase pengeluaran untuk makanan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu komposisi pengeluaran rumah tangga pertanian dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan

petani, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian/kesejahteraan petani.

Untuk itu, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai instansi penyedia data dan informasi di lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2024 telah melakukan kajian analisis kesejahteraan petani menggunakan berbagai indikator tersebut.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari analisis ini adalah melakukan analisis kesejahteraan petani berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Nilai Tukar Petani (NTP) dan data pendukung lainnya

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi serta hasil analisis kesejahteraan petani berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Nilai Tukar Petani (NTP) dan data pendukung lainnya.

1.3. Ruang Lingkup

Data yang digunakan dalam analisis kesejahteraan petani ini adalah data series tiga tahun yang bersumber dari:

- a. Survei antar Sensus Pertanian Tahun 2018 (SUTAS 2018).
- b. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan pada bulan Maret dengan tingkat penyajian sampai dengan provinsi (tahun 2023-2025).
- c. Cakupan rumah tangga dalam analisis ini adalah rumah tangga pertanian meliputi subsektor tanaman Pangan, Hortikultura, perkebunan dan peternakan, baik yang berusaha sendiri maupun sebagai buruh.
- d. Nilai Tukar Petani (NTP) yang bersumber dari BPS. NTP merupakan rasio antara indeks yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayar petani (Ib), serta Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang merupakan

ukuran kemampuan rumah tangga pertanian dalam memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya (Tahun 2021 s.d Jan-Okt 2025).

METODOLOGI

Metode analisis yang digunakan adalah analisis matematis deskriptif untuk beberapa indikator, yaitu:

- a. Karakteristik Rumah Tangga Pertanian (RTP), meliputi RTP berdasarkan sub sektor, jumlah anggota rumah tangga, kelompok umur, gender, pendidikan, kesehatan, perumahan dan perlindungan sosial.
- b. Kesejahteraan rumah tangga pertanian, meliputi pendapatan perkapita pada rumah tangga pertanian, pengeluaran RTP, *Gini Ratio*, anggota rumah tangga pertanian dibawah garis kemiskinan, serta Nilai Tukar Petani (NTP).
 - Jenis sumber penghasilan utama dari Sutas 2018.
 - Rata-rata pengeluaran perkapita RTP bersumber dari Susenas merupakan proksi pendapatan perkapita RTP serta melihat proporsi pengeluaran makanan dan non makanan pada rumah tangga pertanian, dimana melalui pola pengeluaran rumah tangga pertanian tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Menurut hukum Engel, bila persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran lebih dari 80%, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut sangat rendah.
 - Gini ratio adalah besaran untuk melihat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan pada rumah tangga pertanian, dengan formula sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

P_i : Persentase rumah tangga petani pada kelas ke- i

Q_i : Persentase kumulatif total pengeluaran sampai kelas ke- i

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

- ♦ $G < 0,4$ → ketimpangan rendah
- ♦ $0,4 \leq G \leq 0,5$ → ketimpangan sedang
- ♦ $G > 0,5$ → ketimpangan tinggi
- Tingkat kemiskinan di sektor pertanian atau tingkat kesejahteraan petani, dianalisis melalui:
 - Perkembangan persentase rumah tangga pertanian yang berada di bawah garis kemiskinan (Susenas).
 - Membandingkan garis kemiskinan dengan hasil analisis PDB pertanian sempit per kapita, Rata-rata pendapatan petani (Sensus Pertanian 2013) dan rata-rata pengeluaran sebagai proksi pendapatan RTP (Susenas).
- NTP merupakan salah satu proksi untuk melihat tingkat kesejahteraan petani.

Penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) =

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

NTP = Nilai Tukar Petani

I_t = Indeks harga yang diterima petani

I_b = Indeks harga yang dibayar petani

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/break even. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.

- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

III. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA PERTANIAN

3.1. Gambaran Umum Pembangunan Kualitas Hidup Manusia

Kualitas dari pembangunan suatu wilayah dapat diukur dengan suatu indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain untuk mengukur kualitas pembangunan IPM juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan pengukuran dimensi umur panjang dan umur sehat, dimensi pengetahuan serta dimensi standar hidup layak untuk suatu wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir untuk menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat. Perhitungan UHH tahun 2023-2025 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk tahun 2020. IPM ini juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan manusia menurut standar *United Nations Development Program* (UNDP), terdiri dari empat kriteria yakni IPM > 80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, IPM 60-69 kategori sedang serta IPM < 60 kategori rendah. IPM Indonesia periode 2023-2025 termasuk dalam kategori tinggi dengan besaran indeks yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2023 IPM Indonesia sebesar 74,39 kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 75,02 dan tahun 2025 kembali naik 0,88 poin menjadi 75,90. Secara rinci, IPM dan selisis IPM Indonesia dan 38 provinsi tahun 2023-2025 tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Selisih IPM menurut Provinsi, 2023 – 2025

Wilayah	IPM			Selisih IPM		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Aceh	74,70	75,36	76,23	0,59	0,66	0,87
Sumatera Utara	75,13	75,76	76,47	0,62	0,63	0,71
Sumatera Barat	75,64	76,43	77,27	0,48	0,79	0,84
Riau	74,95	75,67	76,31	0,50	0,72	0,64
Jambi	73,73	74,36	75,13	0,62	0,63	0,77
Sumatera Selatan	73,18	73,84	74,76	0,70	0,66	0,92
Bengkulu	74,30	74,91	75,68	0,62	0,61	0,77
Lampung	72,48	73,13	73,98	0,69	0,65	0,85
Kep. Bangka Belitung	74,09	74,55	75,26	0,59	0,46	0,71
Kepulauan Riau	79,08	79,89	80,53	0,60	0,81	0,64
DKI Jakarta	83,55	84,15	85,05	0,78	0,60	0,90
Jawa Barat	74,24	74,92	75,90	0,61	0,68	0,98
Jawa Tengah	73,39	73,87	74,77	0,59	0,48	0,90
DI Yogyakarta	81,09	81,62	82,48	0,44	0,53	0,86
Jawa Timur	74,65	75,35	76,13	0,60	0,70	0,78
Banten	75,77	76,35	77,25	0,52	0,58	0,90
Bali	78,01	78,63	79,37	0,61	0,62	0,74
Nusa Tenggara Barat	72,37	73,10	73,97	0,72	0,73	0,87
Nusa Tenggara Timur	68,40	69,14	69,89	0,77	0,74	0,75
Kalimantan Barat	70,47	71,19	72,09	0,76	0,72	0,90
Kalimantan Tengah	73,73	74,28	74,86	0,56	0,55	0,58
Kalimantan Selatan	74,66	75,19	76,10	0,66	0,53	0,91
Kalimantan Timur	78,20	78,79	79,39	0,84	0,59	0,60
Kalimantan Utara	72,88	73,41	74,04	0,67	0,53	0,63
Sulawesi Utara	75,04	75,68	76,32	0,52	0,64	0,64
Sulawesi Tengah	71,66	72,24	72,82	0,65	0,58	0,58
Sulawesi Selatan	74,60	75,18	75,92	0,64	0,58	0,74
Sulawesi Tenggara	72,94	73,62	74,25	0,56	0,68	0,63
Gorontalo	71,25	72,01	72,62	0,63	0,76	0,61
Sulawesi Barat	69,80	70,46	71,16	0,61	0,66	0,70
Maluku	72,75	73,40	74,09	0,71	0,65	0,69
Maluku Utara	70,98	71,84	72,52	0,72	0,86	0,68
Papua Barat	66,84	67,69	68,48	0,81	0,85	0,79
Papua Barat Daya	69,07	69,65	70,55	0,47	0,58	0,90
Papua	73,23	73,83	74,69	0,66	0,60	0,86
Papua Selatan	68,24	68,86	69,54	0,85	0,62	0,68
Papua Tengah	59,44	60,25	60,64	0,68	0,81	0,39
Papua Pegunungan	53,45	54,43	54,91	0,76	0,98	0,48
Indonesia	74,39	75,02	75,90	0,62	0,63	0,88

Sumber: BPS

Keterangan: Perhitungan Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2023-2025 menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP 2020)

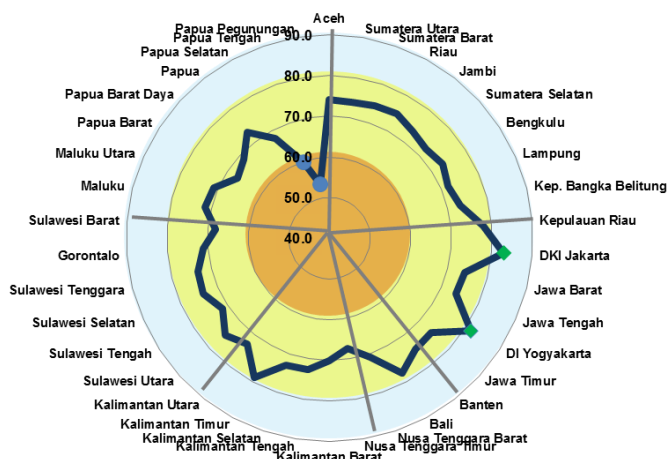
Kualitas pembangunan manusia setiap provinsi di Indonesia tahun 2025 termasuk dalam empat kategori. Terdapat 1 provinsi pada kategori rendah, 4 provinsi pada kategori sedang, 30 provinsi pada kategori tinggi dan 3 provinsi termasuk kategori sangat tinggi. IPM di tingkat provinsi tahun 2025 berkisar antara 54,91 (Papua Pegunungan) sampai 85,05 (DKI

Jakarta). Jika dilihat per wilayah, IPM sembilan provinsi yang berada di wilayah Sumatera termasuk dalam kategori tinggi dan satu provinsi (Kepulauan Riau) termasuk kategori sangat tinggi. IPM Kepulauan Riau naik 0,64 poin dan mengalami perubahan status dari tinggi menjadi sangat tinggi dengan capaian IPM sebesar 80,53. Besarnya IPM provinsi-provinsi di Sumatera yang termasuk kategori tinggi berada pada kisaran 73,98 (Lampung) sampai dengan 77,27 (Sumatera Barat).

Selanjutnya kualitas pembangunan manusia provinsi di wilayah Jawa, IPM tahun 2025 termasuk pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masing-masing memiliki IPM sebesar 85,05 dan 82,48 sehingga masuk pada kategori sangat tinggi. Sedangkan provinsi lainnya di Pulau Jawa yang masuk kategori tinggi, IPM-nya berkisar antara 74,77 (Jawa Tengah) sampai dengan 77,25 (Banten). Pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Bali dan NTB masuk pada kategori tinggi dengan IPM masing-masing sebesar 79,37 dan 73,97. Sedangkan Provinsi NTT nilai IPM-nya sebesar 69,89 yang artinya kualitas pembangunan manusianya termasuk kategori sedang.

Semua provinsi di Kalimantan dan Sulawesi kualitas pembangunan manusianya masuk kategori tinggi. IPM provinsi di Kalimantan berkisar antara 72,09 (Kalimantan Barat) sampai dengan 79,39 (Kalimantan Timur). Selanjutnya di wilayah Sulawesi IPM-nya berkisar antara 71,16 (Sulawesi Barat) sampai 76,32 (Sulawesi Utara). Terakhir untuk wilayah Maluku-Papua, provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya dan Papua termasuk pada kategori tinggi. Papua Barat Daya mengalami perubahan status pembangunan manusia dari sedang menjadi tinggi, dengan capaian IPM sebesar 70,55. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Tengah kualitas pembangunan manusianya masuk pada kategori sedang atau nilai IPM berkisar antara 60,64 sampai 69,54. Sedangkan Papua Pegunungan termasuk dalam kategori rendah dengan nilai IPM sebesar 54,91 atau naik 0,48 dibandingkan tahun 2024. Sebaran

IPM provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.1.1.



Gambar 3.1.1. IPM 34 Provinsi di Indonesia berdasarkan Kategori UNDP Tahun 2025

3.2. Gambaran Umum Rumah Tangga Pertanian

Rumah tangga secara umum dibedakan dalam tiga jenis, yaitu rumah tangga berusaha di pertanian, rumah tangga buruh tani dan rumah tangga non pertanian. Rumah tangga berusaha di pertanian adalah rumah tangga dimana satu atau lebih anggota rumah tangga tersebut melakukan kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar untuk memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko sendiri. Sedangkan rumah tangga buruh tani adalah rumah tangga dimana satu atau lebih anggota rumah tangga bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai atau pekerja bebas atau pekerja keluarga/tidak dibayar dalam kegiatan pertanian. Kegiatan tersebut meliputi usaha tanaman padi dan palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan. Sementara rumah tangga non pertanian

adalah rumah tangga lainnya yang meliputi rumah tangga perikanan, kehutanan dan rumah tangga umum.

Tabel 3.2.1 Persentase Rumah Tangga Pertanian dan Rumah Tangga Non Pertanian di Indonesia, 2023-2025

(%)

Wilayah	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Pertumb. 2025 thd 2024	Rumah Tangga Buruh Tani			Pertumb. 2025 thd 2024	Rumah Tangga Non Pertanian			Pertumb. 2025 thd 2024
	2023	2024	2025		2023	2024	2025		2023	2024	2025	
Jawa	21,00	21,37	19,56	-8,44	8,44	7,89	7,31	-7,39	70,55	70,74	73,12	3,37
Luar Jawa	34,31	34,34	33,46	-2,56	9,44	9,05	8,90	-1,61	56,25	56,62	57,64	1,81
Indonesia	26,54	26,80	25,42	-5,15	8,86	8,38	7,98	-4,72	64,60	64,82	66,60	2,74

Sumber : Susenas Maret - BPS

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) – BPS tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan persentase rumah tangga berusaha di pertanian, rumah tangga buruh tani dan rumah tangga non pertanian di Indonesia. Persentase rumah tangga berusaha di pertanian mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,15% dan rumah tangga buruh tani juga mengalami penurunan dengan persentase 4,72%, sedangkan rumah tangga non pertanian meningkat sebesar 2,74%. Persentase rumah tangga berusaha di pertanian tahun 2024 sebesar 26,80% namun turun menjadi 25,42% di tahun 2025. Selanjutnya persentase rumah tangga buruh tani turun dari 8,38% menjadi 7,98%. Sedangkan pada rumah tangga non petanian, persentasenya meningkat dari 64,82% menjadi 66,60%. Penurunan persentase rumah tangga berusaha di pertanian dan penurunan persentase rumah tangga buruh tani tahun 2025 bisa terjadi karena beberapa faktor seperti berkurangnya ketersediaan lahan garapan akibat alih fungsi lahan menjadi perumahan dan industri. Urbanisasi dan migrasi tenaga kerja, khususnya generasi muda juga menyebabkan penurunan persentase ini karena peluang kerja di sektor jasa dan industri lebih menarik dan dianggap memberikan prospek ekonomi yang lebih baik. Selain itu, kemajuan teknologi pertanian juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, sehingga menurunkan kebutuhan buruh tani.

Jika dilihat menurut wilayah, persentase rumah tangga berusaha di pertanian di luar Jawa lebih besar dibandingkan persentase di Jawa yaitu dengan perbandingan 33,46% dan 19,56% pada tahun 2025. Begitu pula dengan persentase rumah tangga buruh tani di luar Jawa (8,90%) sedikit lebih tinggi dari pada di Jawa (7,31%). Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.1. Tiga provinsi dengan persentase rumah tangga berusaha di pertanian tertinggi pada tahun 2025 yaitu Papua Pegunungan (91,82%), Papua Tengah (69,80%) dan Nusa Tenggara Timur (57,83%). Sedangkan persentase terkecil terdapat di Banten (11,74%), Kepulauan Riau (2,69%), dan DKI Jakarta (0,27%). Secara rinci disajikan pada Tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2. Persentase Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor, 2024 - 2025

(%)

Subsektor	2024			2025		
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
Rumah Tangga Berusaha di Pertanian						
Tanaman Pangan	14,07	15,95	14,86	12,91	14,57	13,61
Hortikultura	2,98	3,20	3,07	2,56	2,92	2,71
Perkebunan	1,03	13,36	6,19	1,01	13,93	6,45
Peternakan	3,28	1,83	2,67	3,09	2,04	2,65
Rumah Tangga Buruh Tani						
Tanaman Pangan	5,58	2,34	4,22	5,05	2,14	3,82
Hortikultura	1,15	0,40	0,84	0,96	0,43	0,74
Perkebunan	0,60	5,99	2,86	0,71	6,01	2,94
Peternakan	0,56	0,32	0,46	0,59	0,32	0,48

Sumber : Susenas Maret - BPS

Jika dilihat berdasarkan subsektor, pada tahun 2024 dan 2025 persentase rumah tangga berusaha di pertanian dan rumah tangga buruh tani tertinggi adalah di subsektor tanaman pangan. Secara keseluruhan persentase rumah tangga berusaha di pertanian yang bekerja pada subsektor tanaman pangan tahun 2025 sebesar 13,61% dan rumah tangga buruh tani sebesar 3,82%. Persentase tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 dimana pada tahun tersebut persentase rumah tangga

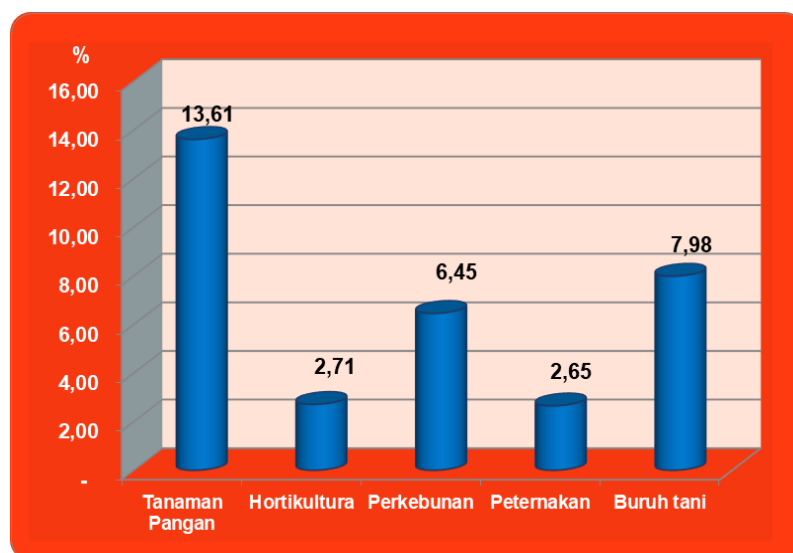
berusaha di pertanian subsektor tanaman pangan sebesar 14,86%. Penurunan persentase tersebut terjadi di Jawa dan di luar Jawa. Persentase kedua jenis rumah tangga yang bekerja di subsektor perkebunan di luar Jawa jauh lebih besar dibandingkan di Jawa. Tahun 2025 persentase rumah tangga berusaha di pertanian subsektor perkebunan di luar Jawa sebesar 13,93% sedangkan di Jawa hanya sebesar 1,01%. Ketersediaan lahan di luar Jawa, yang luas memungkinkan berkembangnya komoditas perkebunan skala besar seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan kelapa. Rumah tangga berusaha di pertanian subsektor perkebunan terbesar adalah di Jambi sebesar 33,25% kemudian Sulawesi Barat sebesar 33,22%. Sedangkan persentase rumah tangga buruh tani di subsektor perkebunan terbesar yaitu di Riau sebesar 17,88% selanjutnya Kalimantan Tengah sebesar 16,19%.

3.3. Karakteristik Kepala dan Anggota Rumah Tangga Pertanian

Karakteristik yang akan dianalisis meliputi kepala dan anggota rumah tangga usaha di pertanian berdasarkan Subsektor, umur, pendidikan dan gender.

Berdasarkan subsektor

Persentase rumah tangga usaha di pertanian per Subsektor pada tahun 2025, didominasi oleh rumah tangga pertanian Subsektor tanaman pangan mencapai 13,61%, disusul rumah tangga Subsektor perkebunan sebesar 6,45%, Subsektor hortikultura sebesar 2,71%, Subsektor peternakan sekitar 2,65% dan buruh tani sekitar 7,98% (Gambar 3.3.1).



Gambar 3.3.1. Persentase RTP Indonesia menurut Subsektor, 2025

Berdasarkan Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)

Tabel 3.3.1. Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) Usaha di Pertanian, Buruh Tani dan Rumah Tangga Lainnya di Indonesia, 2023– 2025

(Orang)

Wilayah	ART Usaha di Pertanian			ART Buruh Tani			ART Non Pertanian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Jawa	3.53	3.65	3.59	3.58	3.64	3.55	3.67	3.71	3.70
Luar Jawa	4.05	4.08	4.01	4.06	4.12	4.03	3.97	4.02	3.97
Indonesia	3.81	3.88	3.82	3.79	3.86	3.78	3.78	3.82	3.79

Sumber : Susenas - BPS

Berdasarkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga menunjukkan bahwa jumlah ART baik di rumah tangga usaha di pertanian, rumah tangga buruh tani dan rumah tangga lainnya adalah berjumlah 4 orang (Tabel 3.2.1). Jumlah ini umumnya merupakan keluarga inti yaitu terdiri dari ayah, ibu dan 2 orang anak. Namun bila dibandingkan antara Jawa dan Luar Jawa, rata-rata jumlah anggota rumah tangga pertanian di Luar Jawa lebih banyak dibandingkan di Jawa.

Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur, usia produktif (15 - 64 tahun) mendominasi pada rumah tangga usaha di pertanian yaitu berkisar 60% - 70%, dan sisanya merupakan usia non produktif (umur 0 - 14 tahun dan ≥ 65 tahun). Kondisi tersebut juga terjadi di pulau Jawa dan Luar Jawa maupun menurut Subsektor dengan kecenderungan lebih besar persentase usia produktif di pulau Jawa (Gambar 3.3.2).



Gambar 3.3.2. Persentase Anggota Rumah Tangga Petani menurut Kelompok Umur Per subsektor, 2025

Rata-rata umur kepala rumah tangga pada semua jenis rumah tangga berada pada usia produktif, yaitu usia 40 - 55 tahun, di mana tahun 2025 di pulau Jawa untuk rumah tangga usaha di pertanian sedikit lebih tua dibandingkan di luar Jawa, yakni pada kisaran 55 tahun, sedangkan di luar Jawa kisaran 50 tahun (Tabel 3.3.3).

Tabel 3.3.2. Rata- Rata Umur Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Rumah Tangga, 2023 – 2025

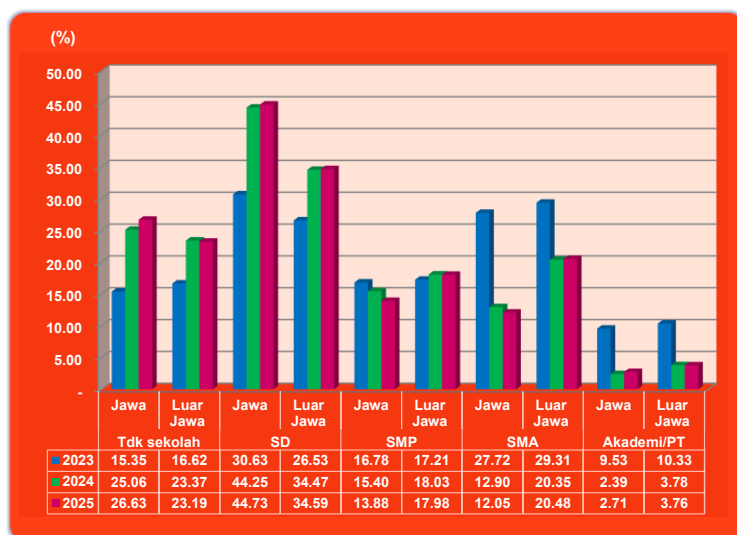
(Tahun)

No.	Wilayah	Rumah Tangga Usaha di Pertanian			Rumah Tangga Buruh Tani			Rumah Tangga Lainnya		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Jawa	55.74	55.88	56.80	52.35	53.05	53.48	48.91	48.97	49.02
2	Luar Jawa	51.26	51.79	52.10	45.73	45.86	46.09	47.78	48.06	47.94
3	Indonesia	53.33	53.68	54.19	49.42	49.80	50.01	48.50	48.64	48.63

Sumber: Susenas, BPS

Berdasarkan Pendidikan

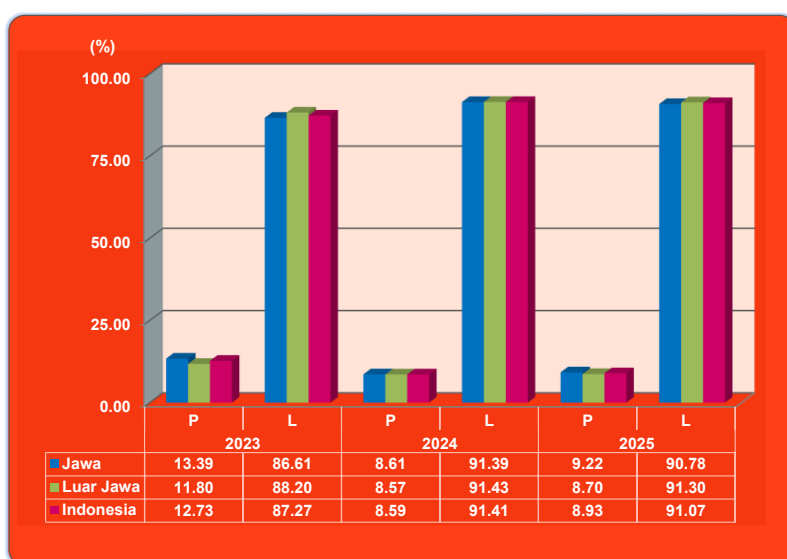
Tingkat pendidikan kepala rumah tangga usaha di pertanian masih sangat rendah, selama tahun 2023 - 2025 sekitar 15 - 27% hanya tidak sekolah/tidak tamat SD dan 30 - 45% tamat SD. Persentase kepala rumah tangga yang memiliki ijazah SMP sebesar 16 - 19%, ijazah SMA sebesar 12% - 30% serta ijazah pendidikan tinggi (Akademi/ perguruan tinggi) meningkat pada tahun 2025 menjadi 3 -11%. Bila dibandingkan antara pulau Jawa dan Luar Jawa menunjukkan persentase kepala rumah tangga yang mempunyai pendidikan menengah keatas lebih besar di luar Jawa di banding di Jawa (Gambar 3.3.3).



Gambar 3.3.3. Persentase Kepala Rumah Tangga Usaha di Pertanian menurut Tingkat Pendidikan, 2023 – 2025

Berdasarkan Gender

Secara umum kepala rumah tangga usaha di pertanian tahun 2023-2025 adalah laki-laki, baik di Jawa maupun di Luar Jawa, persentase laki-laki sebesar 86,61 dan 88,20% dan perempuan sebesar 13,39% dan 11,80% di tahun 2023 dan persentase laki-laki sebesar 91,39% dan 91,43% dan perempuan sebesar 8,61% dan 8,57% di tahun 2024 serta persentase laki-laki masing-masing sebesar 90,78% dan 91,30% dan perempuan sebesar 9,22% dan 8,70% di tahun 2025, (Gambar 3.3.4).



Gambar 3.3.4. Persentase Kepala Rumah Tangga Pertanian berdasarkan Gender, 2023 - 2025

3.4. Karakteristik Perumahan dan Pemukiman

Tingkat kesejahteraan rumahtangga pertanian dapat dilihat dari berbagai sisi, antara lain dari kondisi perumahan dan pemukiman rumah tangga tersebut. Dalam Analisis Kesejahteraan Petani tahun 2025 diperoleh informasi tentang kondisi perumahan berdasarkan status penguasaan bangunan, jenis atap, dinding, jenis lantai, sumber air minum, sumber penerangan dan bahan bakar untuk memasak pada rumah tangga pertanian. Berdasarkan status penguasaan bangunan dalam menganalisis kesejahteraan petani dapat dilihat dari sisi karakteristik perumahan dan

pemukiman terutama berdasarkan status penguasaan bangunan, jenis atap, dinding, jenis lantai, sumber air minum, sumber penerangan dan bahan bakar untuk memasak pada rumah tangga pertanian, untuk melihat perkembangan karakteristik perumahan dan pemukiman dapat di lihat dari 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2023-2025.

Berdasarkan Status Penguasaan Bangunan

Tabel 3.4.1. Persentase Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Jawa Dan Luar Jawa Rumah Tangga Pertanian dan non pertanian, 2023-2025

Wilayah	%								
	Milik Sendiri								
	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Rumah Tangga Buruh Tani			Rumah Tangga Non Pertanian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Jawa	96,91	96,98	97,36	92,45	93,21	93,38	81,53	81,01	81,43
Luar Jawa	93,07	93,84	94,59	79,29	79,81	79,39	78,43	79,31	79,61
Indonesia	94,84	95,29	95,82	86,61	87,15	86,81	80,41	80,39	80,76
Wilayah	Bukan Milik Sendiri*)								
	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Rumah Tangga Buruh Tani			Rumah Tangga Non Pertanian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Jawa	3,09	3,02	2,64	7,55	6,79	6,62	18,47	18,99	18,57
Luar Jawa	6,93	6,16	5,41	20,71	20,19	20,61	21,57	20,69	20,39
Indonesia	5,16	4,71	4,18	13,39	12,85	13,19	19,59	19,61	19,24

Sumber : Susenas, BPS

Keterangan : *) Kontrak/sewa, bebas sewa, dinas, lainnya

Penguasaan bangunan tempat tinggal pada rumah tangga berusaha di pertanian di Indonesia dengan status milik sendiri tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,56 dari tahun 2025 yaitu dari 95,29% menjadi 95,82% berarti menunjukkan bahwa petani sudah menunjukkan adanya sejahtera dalam hal penguasaan bangunannya sedangkan status bukan milik sendiri di Indonesia mengalami penurunan sebesar 11,34% yaitu dari 4,71% menjadi 4,18%, untuk kepemilikan bangunan rumah tangga tani non pertanian mengalami kenaikan sebesar 0,46%. Status kepemilikan bangunan milik sendiri pada tahun 2025 di jawa sebesar 97,36% naik dari tahun lalu, sedangkan untuk luar pulau Jawa 94,59%.

Penguasaan bangunan di rumah tangga buruh tani di Jawa mengalami kenaikan sebesar 0,19% yaitu dari 93,21% menjadi 93,38% dan luar Jawa rata-rata di atas 70%. Apabila di lihat dari tabel untuk status penguasaan bangunan di Rumah tangga berusaha di pertanian maupun buruh tani milik sendiri di Indonesia mengalami kenaikan sedangkan untuk penguasaan bangunan bukan milik sendiri mengalami penurunan. Secara rinci status penguasaan bangunan tempat tinggal dapat dilihat Tabel 3.4.1.

Tabel 3.4.2. Persentase Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Jawa dan di Luar Jawa Menurut Subsektor, 2025

Subsektor	Milik Sendiri					
	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Rumah Tangga Buruh Tani		
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
Tanaman Pangan	97,59	95,00	96,42	94,08	88,84	92,84
Hortikultura	97,47	90,67	94,38	92,24	78,76	88,92
Perkebunan	96,77	95,06	95,21	90,86	75,90	77,99
Peternakan	96,52	94,13	95,74	92,31	82,46	89,53
Subsektor	Bukan Milik Sendiri*)					
	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Rumah Tangga Buruh Tani		
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
Tanaman Pangan	2,41	5,00	3,58	5,92	11,16	7,16
Hortikultura	2,53	9,33	5,62	7,76	21,24	11,08
Perkebunan	3,23	4,94	4,79	9,14	24,10	22,01
Peternakan	3,48	5,87	4,26	7,69	17,54	10,47

Sumber : Susenas, BPS

Keterangan : *) Kontrak/sewa, bebas sewa, dinas, lainnya

Apabila di lihat dari Rumah tangga pertanian subsektor (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) tahun 2025 status penguasaan bangunan rumah tangga berusaha di pertanian untuk wilayah Jawa dan Luar Jawa rata- rata di atas 90% adalah milik sendiri, sedangkan untuk buruh tani status milik sendiri rata-rata sekitar diatas 90% di pulau jawa dan 80% di luar jawa. Untuk Penguasaan bangunan bukan milik sendiri di Indonesia rata-rata sekitar 3,58%- 5,62% di rumah tangga pertanian sedangkan rumah tangga buruh tani rata-rata sekitar 7,1%--

22,01%. Persentase Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Jawa dan di Luar Jawa Menurut Subsektor, 2025. Bila dilihat dari persentase tertinggi penguasaan bangunan tempat tinggal tahun 2025 dengan status milik sendiri dari subsektor Tanaman Pangan yang memiliki status milik sendiri terutama di pulau Jawa sebesar 97,59%, sedangkan yang terkecil ada di subsektor Peternakan sebesar 96,52% . dapat di lihat pada tabel 3.4.2

Berdasarkan Jenis Atap Terluas

Rumah tangga berusaha di pertanian jenis atap terluas di Indonesia baik di Jawa maupun Luar Jawa didominasi oleh genteng dan seng, Jenis atap yang digunakan biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat. Tahun 2025 wilayah Jawa untuk rumah tangga berusaha di pertanian sebesar 89,91% luas bangunannya menggunakan jenis atap dari genteng, sedangkan luar jawa sekitar 74,14% menggunakan jenis atap seng. Rumah tangga buruh tani tahun 2025 di pulau jawa jenis atapnya menggunakan genteng sebesar 86,48%, beton sebesar 1,45% dan seng sebesar 3,26%. RT non pertanian yang menggunakan jenis atap genteng sebesar 76,48% (Jawa) dan 17,06% (Luar jawa) (Tabel 3.4.3)

Tabel 3.4.3. Persentase Jenis Atap Terluas Pada Rumah Tangga Pertanian, Rumah Tangga Buruh Tani dan Rumah Tangga Non Pertanian di Jawa dan Luar Jawa

Wilayah	Beton			Genteng			Seng			Lainnya*)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Rumah Tangga Berusaha di Pertanian												
Jawa	1,76	1,65	1,71	90,62	90,61	89,81	3,40	3,50	4,16	4,22	4,24	4,33
Luar Jawa	0,77	0,83	0,91	19,92	19,97	18,55	72,00	72,43	74,14	7,31	6,77	6,40
Indonesia	1,22	1,21	1,24	52,60	52,71	48,38	40,29	40,48	44,84	5,88	5,60	5,53
Rumah Tangga Buruh Tani												
Jawa	1,15	1,31	1,76	87,80	87,55	86,48	3,65	3,57	3,26	7,40	7,56	8,50
Luar Jawa	0,77	0,83	1,15	22,45	20,68	19,16	69,19	71,71	73,03	7,58	6,79	6,67
Indonesia	0,98	1,09	1,45	58,83	57,30	52,69	32,71	34,39	38,27	7,48	7,21	7,58
Rumah Tangga Non Pertanian												
Jawa	2,72	2,83	3,44	77,80	77,67	76,48	3,01	2,67	2,77	16,47	16,83	17,31
Luar Jawa	1,48	1,79	1,65	17,23	17,22	17,06	74,24	74,24	75,19	7,05	6,76	6,10
Indonesia	2,27	2,45	2,76	55,86	55,56	53,82	28,81	28,84	30,39	13,06	13,15	13,04

Sumber : Susenas Maret , BPS

Keterangan : *) Jenis Atap : asbes, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan rumbia dan lainnya

Adapun Rumah tangga berusaha di pertanian dan buruh tani untuk subsektor di pulau Jawa paling banyak yang menggunakan atap genteng yang terluas adalah di subsektor Tanaman Pangan dan Peternakan tahun 2025 sebesar 93,03% dan 90,79%. Jenis atap lainnya seperti seng, asbes, bambu, kayu/sirap, jerami di dominasi oleh rumah tangga pertanian di luar Jawa subsektor Tanaman pangan sebesar 81,50%, hortikultura sebesar 85,07%, Perkebunan sebesar 78,54% dan Peternakan sebesar 62,56%. Sedangkan rumah tangga buruh tani di pulau Jawa di dominasi jenis atapnya adalah genteng rata-rata di atas 80%.

Tabel 3.4.4. Persentase Jenis Atap Terluas Pada Rumah Tangga Pertanian dan Buruh tani di Jawa Dan Luar Jawa menurut subsektor, 2025

Subsektor	Beton						%
	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Rumah Tangga Buruh Tani			
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	
Tanaman Pangan	1,23	0,67	0,98	1,09	1,08	1,09	
Hortikultura	2,37	1,28	1,87	2,27	0,47	1,83	
Perkebunan	4,58	1,15	1,46	2,19	1,07	1,23	
Pternakan	1,76	0,93	1,49	2,54	1,20	2,16	
Subsektor	Genteng						%
	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Rumah Tangga Buruh Tani			
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	
Tanaman Pangan	93,03	17,83	59,10	89,11	34,17	76,13	
Hortikultura	76,11	13,66	47,75	80,71	24,71	66,92	
Perkebunan	86,53	20,31	26,28	83,10	14,57	24,15	
Peternakan	90,79	36,51	73,19	85,28	20,96	67,11	
Subsektor	Lainnya*)						%
	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Rumah Tangga Buruh Tani			
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	
Tanaman Pangan	5,75	81,50	39,92	9,80	64,75	22,78	
Hortikultura	21,52	85,07	50,38	17,01	74,81	31,25	
Perkebunan	8,88	78,54	72,26	14,71	84,35	74,62	
Peternakan	7,45	62,56	25,33	12,18	77,84	30,73	

Sumber : Susenas Maret , BPS

Keterangan : *) Jenis Atap seng, asbes, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan rumbia dan lainnya

Berdasarkan Jenis Dinding Terluas

Jenis dinding rumah tangga berusaha di pertanian dan rumah tangga buruh tani di Indonesia pada tahun 2025 pada umumnya adalah jenis

dinding yang terbuat dari tembok sebesar 70,23% dan 73,34% sedangkan rumah tangga yang berusaha di non pertanian sekitar 88,23%. Dilihat dari tabel 3.4.3 untuk pulau jawa banyak menggunakan jenis dinding terluas adalah tembok rumah tangga pertanian sebesar 83,23%, RT buruh tani sebesar 81,94% dan Rumah tangga non pertanian sebesar 94,54%.. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel 3.4.3

Tabel 3.4.5. Persentase Jenis Dinding Terluas Pada Rumah Tangga di Jawa Dan Luar Jawa, 2023– 2025

Wilayah	Tembok			Kayu/papan			Lainnya *)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian								
Jawa	80,31	81,61	83,23	13,43	12,76	13,26	6,25	5,63	3,50
Luar Jawa	55,93	58,35	59,78	36,17	34,05	35,80	7,90	7,60	4,42
Indonesia	67,20	69,13	70,23	25,66	24,18	25,76	7,14	6,69	4,01
Rumah Tangga Buruh Tani									
Jawa	78,24	79,98	81,94	11,01	10,16	10,83	10,75	9,86	7,24
Luar Jawa	60,21	62,13	63,64	34,01	32,57	32,97	5,78	5,30	3,39
Indonesia	70,25	71,90	73,34	21,21	20,30	21,24	8,55	7,80	5,43
Rumah Tangga Non Pertanian									
Jawa	92,91	94,08	94,54	3,92	3,51	3,93	3,17	2,41	1,53
Luar Jawa	74,19	75,63	77,24	21,75	20,40	20,46	4,06	3,97	2,29
Indonesia	86,13	87,33	88,23	10,37	9,69	9,96	3,50	2,98	1,81

Sumber : Susenas, BPS

Keterangan : *) plesteraan anyaman bambu kawat, anyaman bambu, batang kayu, bambu dan lainnya

Berdasarkan Jenis Dinding Terluas Subsektor banyak Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan untuk Rumah tangga berusaha di pertanian banyak menggunakan jenis dinding dari Tembok sebesar 80% untuk pulau jawa dan luar jawa sekitar 60%. Sedangkan untuk rumah tangga buruh tani jenis dinding terluas terbuat dari tembok rata-rata sebesar 70%-80%. Untuk jenis dinding kayu/papan banyak di gunakan di RT Pertanian di luar pulau jawa sebesar 30%. Tahun 2025 Subsektor Hortikultura masyarakatnya banyak menggunakan jenis dinding terbuat dari tembok sebesar 87,99% dan Perkebunan sebesar 87,59%,

luar jawa subsektor peternakan menggunakan jenis dinding tembok sebesar 75,30%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3.4.6

Tabel 3.4.6. Persentase Jenis Dinding Terluas Pada Rumah Tangga Subsektor, 2025

%

Subsektor	Tembok					
	Rumah Tangga Berusaha di			Rumah Tangga Buruh Tani		
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
Tanaman Pangan	81,63	55,07	69,65	82,39	70,11	79,49
Hortikultura	87,99	64,74	77,43	75,14	67,93	73,36
Perkebunan	87,59	61,40	63,77	80,90	59,94	62,87
Peternakan	84,60	75,30	81,58	90,27	84,05	88,51
Subsektor	Kayu/papan					
	Rumah Tangga Berusaha di			Rumah Tangga Buruh Tani		
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
Tanaman Pangan	14,68	39,49	25,88	10,83	26,75	14,59
Hortikultura	9,09	32,24	19,61	13,66	30,14	17,72
Perkebunan	7,58	34,77	32,32	9,87	36,45	32,74
Peternakan	12,62	21,50	15,50	7,35	12,99	8,95
Subsektor	Lainnya *)					
	Rumah Tangga Berusaha di			Rumah Tangga Buruh Tani		
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
Tanaman Pangan	3,69	5,43	4,48	6,77	3,14	5,91
Hortikultura	2,92	3,02	2,96	11,20	1,94	8,92
Perkebunan	4,82	3,83	3,92	9,24	3,60	4,39
Peternakan	2,78	3,20	2,92	2,38	2,96	2,54

Sumber : Susenas Maret , BPS

Keterangan : *) plesteraan anyaman bambukawat, anyaman bambu, batang kayu, bambu dan lainnya

Berdasarkan Jenis Lantai Terluas

Jenis lantai yang dominan digunakan di rumah tangga berusaha di pertanian di Indonesia tahun 2025 di Jawa umumnya keramik/ubin/tegel/teraso sebesar 67,41%, diikuti oleh jenis lantai semen/bata merah sebesar 21,71% di pulau jawa dan untuk luar jawa jenis lantai terluas menggunakan semen/bata merah sebesar 29,50% dan semen/bata merah sebesar 45,22%. Rumah tangga buruh tani yang jenis lantainya keramik/ubin/tegel/terso untuk pulau Jawa sebesar 63,65% dan Luar Jawa sebesar 32,07%. Rumah tangga non pertanian juga sudah banyak menggunakan jenis lantai keramik/ubin/tegel/teraso sebesar 84,21%. Sedangkan yang menggunakan jenis lantai semen/bata merah

untuk rumah tangga pertanian di Jawa sebesar 21,71% dan 45,22% di luar jawa. Untuk dapat lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel.3.4.7

Tabel 3.4.7. Persentase Jenis Lantai Terluas Pada Rumah Tangga Pertanian di Wilayah Jawa Dan Luar Jawa, 2023-2025

Jenis Lantai	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Rumah Tangga Berusaha di Pertanian									
Marmer/granit	1,99	1,79	2,19	1,08	1,14	1,59	1,50	1,44	1,86
Keramik/Ubun/Tegel/teraso	65,09	67,37	67,41	27,89	29,90	31,07	45,08	47,27	47,25
Semen/bata merah	19,30	18,69	21,71	42,47	42,94	45,22	31,76	31,70	34,75
Kayu/papan	4,40	3,25	3,14	22,80	20,95	19,92	14,29	12,75	12,45
Bambu/ Tanah	8,80	8,46	5,31	5,10	4,41	1,75	6,81	6,29	3,33
Lainnya*)	0,43	0,44	0,24	0,66	0,66	0,46	0,55	0,56	0,36
Rumah Tangga Buruh Tani									
Marmer/granit	0,93	1,11	1,27	1,02	0,76	1,03	0,97	0,95	1,16
Keramik/Ubun/Tegel/teraso	59,26	62,86	63,65	24,14	25,27	26,74	43,70	45,86	46,30
Semen/bata merah	22,83	21,96	24,57	56,16	56,39	57,59	37,61	37,53	40,09
Kayu/papan	6,09	5,34	4,84	15,93	15,22	13,64	10,45	9,81	8,98
Bambu/ Tanah	10,42	8,30	5,27	2,43	2,04	0,60	6,88	5,47	3,07
Lainnya*)	0,47	0,44	0,40	0,32	0,32	0,40	0,40	0,38	0,40
Rumah Tangga Non Pertanian									
Marmer/granit	2,82	2,67	3,47	2,19	1,90	2,79	2,59	2,39	3,23
Keramik/Ubun/Tegel/teraso	82,49	84,72	84,21	51,37	53,76	54,41	71,22	73,39	73,34
Semen/bata merah	9,75	8,97	9,67	29,86	29,26	29,52	17,04	16,39	16,91
Kayu/papan	1,82	1,29	1,14	15,06	13,95	12,69	6,62	5,92	5,35
Bambu/ Tanah	2,72	1,99	1,25	1,07	0,78	0,25	2,13	1,55	0,25
Lainnya*)	0,39	0,36	0,25	0,45	0,36	0,35	0,41	0,36	0,93

Sumber : Susenas Maret, BPS

Keterangan : *) Parket/vinil/karpet, lainnya

Jenis lantai yang dominan terluas pada tahun 2025 di rumah tangga berusaha pertanian dan buruh tani subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di Jawa sudah 50% adalah jenis lantai dari keramik/ubin/tegal/teraso. Sedangkan untuk di luar jawa yang masih di bawah 40%. Subsektor Tanaman Pangan rumah tangga petani sudah menggunakan lantai dari keramik/ubin/tegel/teraso sebesar 68,84% dan luar jawa rata-rata subsektor TP, Horti dan peternakan rata-rata 35%. Untuk Rumah tangga buruh tani juga sudah banyak menggunakan jenis lantai dari keramik/ubin/teraso rata rata sebesar 63,96% dan di luar Jawa

sebesar 32,34%. Persentase jenis lantai terluas pada rumah tangga pertanian di wilayah subsektor 2025 (3.4.8)

Tabel 3.4.8. Persentase Jenis Lantai Terluas Pada Rumah Tangga Pertanian menurut Subsektor, 2025

							%
Subsektor	Marmer/granit						
	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Rumah Tangga Buruh Tani			
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	
Tanaman Pangan	2,12	1,47	1,83	1,08	0,51	0,94	
Hortikultura	1,97	1,15	1,59	1,07	2,05	1,31	
Perkebunan	4,20	1,76	1,98	2,39	1,05	1,23	
Peternakan	2,01	1,92	1,98	1,91	2,81	2,17	
Subsektor	Keramik/Ubun/Tegel/teraso						
	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Rumah Tangga Buruh Tani			
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	
Tanaman Pangan	68,84	26,90	49,92	64,00	25,57	54,92	
Hortikultura	66,18	31,87	50,60	57,55	30,83	50,97	
Perkebunan	64,56	33,91	36,68	63,17	25,77	31,00	
Peternakan	63,40	40,28	55,90	71,12	47,19	64,36	
Subsektor	Lainnya *)						
	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Rumah Tangga Buruh Tani			
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	
Tanaman Pangan	29,04	71,63	48,26	34,92	73,92	44,14	
Hortikultura	31,86	66,99	47,81	41,38	67,13	47,72	
Perkebunan	31,23	64,33	61,34	34,44	73,18	67,77	
Peternakan	34,58	57,80	42,11	26,97	50,00	33,47	

Sumber : Susenas Maret , BPS

Keterangan : *) Parket/vinil/karpet, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah dan lainnya

Berdasarkan Sumber Air Minum

Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang terpenting setelah lahan. Sumberdaya lahan dan sumberdaya air merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terutama dalam pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan penggunaan air terbesar, sehingga dalam pengelolaan air di sektor pertanian perlu dilakukan efisiensi penggunaannya. Tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung.

Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan

Tabel 3.4.9.a. Persentase Penggunaan Sumber Air Minum menurut Jenisnya di Rumah Tangga Pertanian, 2023-2025

(%)

Sumber Air Minum	Rumah Tangga berusaha di Pertanian									
	Jawa			Luar Jawa			Indonesia			
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Air kemasan bermerk	3,27	3,42	3,87	0,75	0,77	0,98	1,72	1,91	2,00	2,26
Air isi ulang	18,17	20,23	20,30	16,47	18,51	20,42	16,67	17,26	19,31	20,36
Ledeng meteran	7,17	8,38	8,28	7,26	8,01	8,11	7,21	7,22	8,18	8,19
Sumur bor/pompa	21,44	21,07	23,63	14,97	15,07	16,12	17,65	17,96	17,85	19,46
Sumur terlindung	21,61	20,68	19,41	21,56	21,14	20,24	21,73	21,58	20,93	19,87
Sumur tak terlindung	2,41	1,81	1,45	5,71	5,53	4,78	4,58	4,19	3,81	3,30
Mata air terlindung	21,04	19,68	18,37	16,40	14,82	13,66	17,70	18,54	17,08	15,76
Mata air tak terlindung	3,31	3,43	3,33	5,69	5,70	5,22	5,57	4,59	4,65	4,38
Air sungai	0,44	0,26	0,30	3,55	3,29	2,99	2,20	2,11	1,88	1,79
Air hujan	1,06	1,04	1,05	7,59	7,08	7,42	4,85	4,57	4,28	4,58
Lainnya	0,10	0,01	0,02	0,06	0,08	0,05	0,12	0,08	0,05	0,04

Sumber : Susenas, BPS

Jika dilihat berdasarkan rumah tangga berusaha di pertanian, persentase penggunaan sumber air minum pada tahun 2023 tertinggi di jawa sebesar 21,61 persen dan luar jawa sebesar 21,56 persen. Tahun 2025 tertinggi di jawa dan diluar jawa adalah sumur bor/pompa sebesar 23,63 persen, sumur terlindungi sebesar 19,41 persen, air isi ulang sebesar 20,30 persen dan mata air terlindungi sebesar 18,37 persen. (3.4.9.a.).

Tabel 3.4.9.b.Persentase Penggunaan Sumber Air Minum menurut Jenisnya di Rumah Tangga Buruh Tani, 2023-2025

(%)

Sumber Air Minum	Rumah Tangga Buruh Tani								
	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Air kemasan bermerk	2,06	1,64	2,48	0,81	0,75	0,95	1,50	1,24	1,76
Air isi ulang	20,81	22,62	25,41	30,31	33,74	34,86	25,02	27,65	29,85
Ledeng meteran	6,71	7,94	8,53	6,14	6,06	5,54	6,46	7,09	7,13
Sumur bor/pompa	24,02	24,01	22,75	17,26	15,87	18,20	21,02	20,33	20,61
Sumur terlindung	20,91	20,46	18,22	22,60	21,63	20,54	21,66	20,99	19,31
Sumur tak terlindung	2,18	1,93	1,38	6,18	5,59	5,00	3,96	3,59	3,08
Mata air terlindung	19,25	17,81	17,95	6,50	6,96	6,11	13,60	12,90	12,39
Mata air tak terlindung	2,94	3,11	2,64	1,86	1,61	1,31	2,46	2,43	2,02
Air sungai	0,54	0,24	0,33	1,98	1,46	1,37	1,18	0,79	0,82
Air hujan	0,46	0,23	0,32	6,25	6,27	6,06	3,03	2,96	3,02
Lainnya	0,13	0,01	0,00	0,10	0,07	0,05	0,12	0,04	0,02

Sumber : Susenas, BPS

Penggunaan air kemasan bermerek relatif rendah baik di Jawa maupun luar Jawa, di tingkat nasional persentasenya berkisar antara 1,50 - 1,76 persen dan cenderung meningkat sedikit pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa air kemasan tidak menjadi sumber utama bagi rumah tangga buruh tani. Air isi ulang merupakan salah satu sumber air yang paling banyak digunakan, terutama di luar Jawa. Secara nasional, terjadi peningkatan dari 25,02 persen (2023) menjadi 29,85 persen (2025). Peningkatan ini menunjukkan ketergantungan rumah tangga buruh tani pada air isi ulang yang relatif lebih terjangkau dan mudah diakses.

Penggunaan air ledeng meteran meningkat pada tingkat nasional dari 6,46 persen (2023) ke 7,13 persen (2025). Konsumsi di Jawa sedikit lebih tinggi dibanding luar Jawa, menggambarkan perbedaan infrastruktur penyediaan air antar wilayah. Sumur bor/pompa masih menjadi salah satu sumber air utama. Meskipun persentasenya sedikit menurun, tetap berada

pada kisaran 20 - 21 persen secara nasional. Penurunan kecil dari 21,02 persen (2023) menjadi 20,61 persen (2025) menunjukkan adanya pergeseran ke sumber air lain, khususnya air isi ulang. Sumur terlindungi menunjukkan kecenderungan menurun secara nasional, dari 21,66 persen (2023) ke 19,31 persen (2025), di Jawa penurunannya cukup signifikan, menggambarkan peralihan rumah tangga buruh tani ke sumber air alternatif seperti air isi ulang atau sumur bor. Sumur tak terlindungi penggunaannya relatif kecil dan cenderung menurun, dari 3,96 persen (2023) menjadi 3,08 persen (2025). Hal ini menunjukkan semakin sedikit rumah tangga buruh tani yang bergantung pada sumber air yang berisiko dari sisi kualitas. Mata air terlindungi berada pada kisaran 12 - 13 persen secara nasional dan relatif stabil selama periode tersebut. Sumber ini lebih banyak digunakan di luar Jawa dibandingkan Jawa. Persentasenya rendah dan cenderung menurun, sekitar 2,46 persen (2023) menjadi 2,02 persen (2025). Pola ini konsisten dengan tren menurunnya penggunaan sumber air yang tidak terlindungi. Air sungai dan air hujan memiliki persentase yang sangat kecil. Penggunaan air sungai berkisar 0,78–0,82 persen, sementara air hujan 3,03–3,02 persen secara nasional. Dari kedua sumber ini bukan pilihan utama rumah tangga buruh tani. (Tabel 3.4.9b).

Rumah tangga bukan tani/buruh tani persentase terbesar menggunakan air isi ulang tahun 2025 sebesar 38,31 persen di Jawa, diluar Jawa sebesar 49,23 persen, selanjutnya sumur bor/poma sebesar 18,96 persen di Jawa dan diluar Jawa sebesar 10,96 persen, air kemasan bermerk, sumur terlindungi, mata air terlindungi, ledeng meteran dan mata air tak terlindungi. Pada rumah tangga pertanian mulai beralih dari sumber air tradisional seperti mata air dan sumur tidak terlindungi menuju opsi yang lebih aman dan mudah diakses seperti air isi ulang dan sumur bor. Penurunan penggunaan mata air tak terlindungi, sumur tak terlindungi, dan air sungai menunjukkan adanya perbaikan pengetahuan dan preferensi masyarakat terhadap sumber air yang lebih higienis. (Tabel 3.4.9c).

Tabel 3.4.9.c. Persentase Penggunaan Sumber Air Minum menurut Jenisnya di Rumah Tangga Non Pertanian, 2023-2025

(%)

Sumber Air Minum	Rumah tangga bukan tani/buruh tani								
	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Air kemasan bermerk	16,28	16,88	17,67	6,07	6,55	7,17	12,58	13,10	13,84
Air isi ulang	35,37	37,99	38,31	44,88	47,98	49,23	38,81	41,64	42,29
Ledeng meteran	8,14	8,26	8,47	13,16	12,36	12,11	9,96	9,76	9,80
Sumur bor/pompa	19,15	18,56	18,96	10,89	10,10	10,96	16,16	15,46	16,04
Sumur terlindung	12,03	10,91	10,17	11,38	10,98	10,29	11,79	10,93	10,22
Sumur tak terlindung	1,05	0,69	0,45	2,20	2,03	1,63	1,46	1,18	0,88
Mata air terlindung	6,64	5,81	5,13	5,28	4,67	3,95	6,15	5,39	4,70
Mata air tak terlindung	1,00	0,75	0,65	0,95	0,81	0,63	0,98	0,77	0,64
Air sungai	0,10	0,05	0,10	1,16	0,94	0,83	0,49	0,38	0,37
Air hujan	0,14	0,11	0,09	3,97	3,54	3,15	1,53	1,36	1,21
Lainnya	0,09	0,00	0,01	0,06	0,04	0,04	0,08	0,02	0,02

Sumber : Susenas, BPS

Rumah tangga pertanian di Indonesia menggunakan berbagai sumber air minum, dengan pola pemanfaatan yang berbeda menurut wilayah dan subsektor pertanian. Secara nasional, sumber air yang paling dominan adalah air isi ulang, sumur bor/pompa, dan sumur terlindung. Perbedaan kondisi geografis, ketersediaan infrastruktur, serta karakteristik jenis usaha pertanian turut mempengaruhi variasi pilihan sumber air minum. Rumah tangga berusaha di pertanian di Jawa untuk tanaman pangan sumur bor/pompa 24,57 persen, air isi ulang 24,21 persen, dan sumur terlindung 20,85 persen. Hortikultura mata air terlindungi 39,66 persen, hal ini mengindikasikan banyak sentra hortikultura di Jawa berada di wilayah pegunungan/lereng dengan ketersediaan mata air yang baik. Perkebunan, mata air terlindungi sebesar 37,09 persen diikuti sumur bor/pompa sebesar 17,63 persen. Peternakan sumur bor/pompa 27,29

persen, peternakan memerlukan air dalam jumlah besar sehingga pilihan sumur bor/pompa yang berdebit lebih stabil sangat logis. Wilayah Jawa memiliki cakupan sumber air yang relatif beragam dan stabil, dengan dominasi sumur bor serta mata air terlindung, terutama pada subsektor yang memerlukan air cukup besar. Rumah tangga berusaha di pertanian di luar Jawa untuk tanaman pangan air isi ulang sebesar 18,12 persen dan sumur terlindungi 18,76 persen. Hortikultura sumur bor/pompa sebesar 17,29 persen dan sumur terlindungi sebesar 19,44 persen. Perkebunan air isi ulang 22,84 persen ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sumber komersial akibat variasi kondisi geografis dan keterbatasan sumber air alami. Peternakan sumur terlindungi 23,56 persen dan sumur bor/poma 18,02 persen. Bila dilihat pola penggunaan lebih terkonsentrasi pada sumur terlindungi, sumur bor, dan air isi ulang. Hal ini mencerminkan tantangan ketersediaan mata air serta infrastruktur air minum yang tidak merata di Jawa. Rumah tangga berusaha di pertanian di Indonesia, air isi ulang menjadi sumber terbesar pada subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Sumur bor/poma sangat dominan pada subsektor peternakan sebesar 24,28 persen. Mata air terlindungi tetap signifikan terutama pada hortikultura sebesar 30,48 persen. (Tabel 3.4.10a).

Tabel 3.4.10a. Persentase Penggunaan Sumber Air Minum menurut Subsektor Rumah Tangga Pertanian di Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, 2025

(%)

Sumber Air Minum	Rumah Tangga berusaha di Pertanian											
	Jawa				Luar Jawa				Indonesia			
	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak
Air kemasan bermerk	4,26	2,32	2,58	3,90	0,83	1,54	0,77	2,65	2,72	1,97	0,93	3,49
Air isi ulang	24,21	11,44	8,40	15,19	18,12	21,32	22,84	18,98	21,46	15,93	21,53	16,42
Ledeng meteran	8,26	5,87	7,27	10,69	8,24	10,43	6,60	14,20	8,25	7,94	6,66	11,83
Sumur bor/pompa	24,57	16,81	17,63	27,29	17,29	15,69	14,71	18,02	21,29	16,30	14,98	24,28
Sumur terlindung	20,85	14,81	17,71	17,74	18,76	14,94	22,40	23,56	19,91	14,87	21,98	19,63
Sumur tak terlindung	1,43	1,46	1,91	1,38	3,48	3,92	6,34	4,61	2,35	2,58	5,94	2,43
Mata air terlindung	12,44	39,66	37,09	19,45	14,45	19,44	11,92	11,73	13,34	30,48	14,19	16,95
Mata air tak terlindung	2,47	6,21	6,57	3,47	7,64	4,51	3,37	1,56	4,80	5,44	3,66	2,85
Air sungai	0,30	0,07	0,65	0,37	3,35	2,71	2,98	0,95	1,68	1,27	2,77	0,56
Air hujan	1,18	1,35	0,19	0,51	7,74	5,47	8,04	3,73	4,14	3,22	7,33	1,55
Lainnya	0,03	0,00	0,00	0,01	0,09	0,01	0,03	0,01	0,06	0,00	0,02	0,01

Sumber : Susenas, BPS

Keterangan: TP = Tanaman Pangan, Horti = Hortikultura, Bun = Perkebunan, Nak = Peternakan

Bila dilihat menurut jenisnya rumah tangga buruh tani tahun 2025 menunjukkan bahwa air isi ulang, sumur bor/pompa, dan sumur terlindung merupakan tiga sumber utama yang paling banyak digunakan baik di Jawa, luar Jawa, maupun secara nasional. Pola ini mengindikasikan peningkatan ketergantungan rumah tangga buruh tani terhadap sumber air minum yang dikelola dan relatif lebih aman. Untuk wilayah Jawa, dominasi penggunaan air isi ulang dan sumur bor/pompa mencerminkan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur air bersih. Sementara itu, sumber air seperti sungai, air hujan, dan sumur tak terlindung jarang digunakan, menandakan kualitas layanan air minum yang lebih stabil. Berbeda dengan itu, rumah tangga buruh tani di luar Jawa menunjukkan variasi lebih besar dalam pemanfaatan sumber air. Penggunaan air hujan dan air sungai lebih tinggi dibandingkan Jawa, menggambarkan keterbatasan infrastruktur air bersih di beberapa daerah. Meskipun air isi ulang tetap mendominasi, ketergantungan pada sumber alami tidak terlindung masih terlihat di

beberapa subsektor. Secara nasional, subsektor perkebunan dan peternakan tercatat paling banyak menggunakan air isi ulang, sedangkan subsektor hortikultura menunjukkan penggunaan yang tinggi pada mata air terlindung. Ini menegaskan adanya variasi penggunaan sumber air yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, ketersediaan sarana air bersih, dan karakteristik subsektor pertanian. (Tabel 3.4.10b).

Tabel 3.4.10b. Persentase Penggunaan Sumber Air Minum menurut Subsektor Rumah Tangga Buruh Tani. Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, 2025

(%)

Sumber Air Minum	Rumah Tangga Buruh Tani											
	Jawa				Luar Jawa				Indonesia			
	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak
Air kemasan bermerk	2,05	2,23	1,72	7,50	0,66	1,23	0,89	3,47	1,72	1,98	1,01	6,36
Air isi ulang	28,37	17,57	14,85	25,49	24,75	22,90	38,70	46,57	27,52	18,89	35,37	31,45
Ledeng meteran	8,16	7,75	13,42	7,08	7,47	12,65	4,04	11,41	8,00	8,96	5,35	8,31
Sumur bor/pompa	24,30	14,35	21,05	25,07	21,29	19,53	17,00	18,15	23,59	15,63	17,57	23,12
Sumur terlindung	17,89	18,65	19,12	19,19	27,82	19,67	18,53	10,76	20,24	18,90	18,62	16,80
Sumur tak terlindung	1,45	0,76	2,12	0,97	4,92	3,71	5,32	1,26	2,27	1,49	4,87	1,05
Mata air terlindung	15,26	31,19	23,15	13,30	8,15	13,32	4,96	4,41	13,58	26,79	7,50	10,78
Mata air tak terlindung	1,89	6,21	4,36	1,22	1,37	3,06	1,16	1,44	1,77	5,43	1,61	1,28
Air sungai	0,42	0,14	0,23	0,00	1,16	0,64	1,55	0,36	0,59	0,26	1,36	0,10
Air hujan	0,22	1,14	0,00	0,18	2,39	3,30	7,77	2,18	0,73	1,67	6,69	0,75
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00

Sumber : Susenas, BPS

Keterangan: TP = Tanaman Pangan, Horti = Hortikultura, Bun = Perkebunan, Nak = Peternakan

Berdasarkan Penggunaan Fasilitas BAB

Seperti halnya akses terhadap air dengan mengacu pada metadata SDGs terbaru dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di

perdesaan. Penggunaan fasilitas BAB sendiri itu adalah satu rumah tangga memiliki fasilitas BAB. Sedangkan penggunaan fasilitas BAB lainnya adalah ada dua atau lebih rumah tangga yang menggunakan satu fasilitas BAB. Bisa dimungkinkan rumah tangga tersebut menggunakan MCK umum atau bahkan tidak menggunakan fasilitas BAB dan membuang ke sungai.

Selama tiga tahun terakhir untuk rumah tangga berusaha di pertanian, tempat buang air besar (BAB) sendiri terus bertambah. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri terus meningkat di seluruh wilayah. Jawa menunjukkan kenaikan dari 85,47 persen (2023) menjadi 89,97 persen (2025). Luar Jawa meningkat dari 82,20 persen (2023) menjadi 86,90 persen (2025). Secara nasional, persentase naik dari 83,71 persen (2023) menjadi 88,27 persen (2025). Penggunaan fasilitas bersama atau umum menunjukkan penurunan, yang mengindikasikan semakin banyak rumah tangga beralih ke fasilitas pribadi, di Jawa, turun dari 9,74 persen (2023) menjadi 4,59 persen (2025). Untuk Luar Jawa, turun dari 9,14 persen (2023) menjadi 7,15 persen (2025). Nasional, turun dari 9,41 persen (2023) menjadi 7,34 persen (2025). Proporsi rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB terus menurun. Jawa menurun dari 4,80 persen (2023) menjadi hanya 2,44 persen (2025). Luar Jawa menurun dari 8,67 persen (2023) menjadi 5,73 persen (2025). Nasional menurun dari 6,88 persen (2023) menjadi 4,27 persen (2025). Penurunan ini menandakan peningkatan kesadaran sanitasi serta hasil kebijakan intervensi sanitasi pedesaan.

Rumah tangga buruh tani juga menunjukkan peningkatan akses fasilitas sanitasi, meskipun pada tingkat sedikit lebih rendah dibanding rumah tangga yang berusaha di pertanian. Jawa meningkat dari 79,80 persen (2023) menjadi 84,10 persen (2025). Luar Jawa meningkat dari 84,21 persen (2023) menjadi 88,98 persen (2025). Nasional meningkat dari 81,76 persen (2023) menjadi 86,40 persen (2025). Persentase rumah tangga buruh tani yang tidak memiliki fasilitas BAB terus membaik, di Jawa

turun dari 9,25 persen (2023) menjadi 5,89 persen (2025). Untuk luar Jawa turun dari 7,79 persen (2023) menjadi 4,08 persen (2025). Nasional turun dari 8,61 persen (2023) menjadi 5,04 persen (2025). (tabel 3.4.11a).

Tabel 3.4.11a. Persentase Penggunaan Fasilitas BAB di Rumah Tangga Pertanian dan Rumah Tangga Buruh Tani di Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, 2023 – 2025

(%)

Fasilitas BAB	Rumah Tangga berusaha di Pertanian									
	Jawa			Luar Jawa				Indonesia		
	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sendiri	85,47	88,61	89,97	79,88	82,20	85,76	86,90	83,71	87,08	88,27
Bersama/Umum	9,74	8,28	4,59	8,21	9,14	7,15	3,07	9,41	7,67	3,74
Tidak ada	4,80	3,11	2,44	11,91	8,67	7,09	5,73	6,88	5,25	4,27
Fasilitas BAB	Rumah Tangga Buruh Tani									
	Jawa			Luar Jawa				Indonesia		
	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sendiri	79,80	82,52	84,10	81,24	84,21	87,88	88,98	81,76	84,94	86,40
Bersama/Umum	10,94	10,31	5,60	8,26	8,00	6,77	2,71	9,64	8,71	4,24
Tidak ada	9,25	7,16	5,89	10,50	7,79	5,35	4,08	8,61	6,34	5,04

Sumber : Susenas, BPS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengenai persentase distribusi rumah tangga non pertanian berdasarkan fasilitas buang air besar (BAB) yang digunakan, secara keseluruhan, fasilitas BAB Sendiri menunjukkan tren peningkatan konsisten di seluruh wilayah (Jawa, Luar Jawa, dan Indonesia) dari tahun 2023 hingga 2025. Tingkat nasional (Indonesia), persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB sendiri meningkat dari 88,85 persen pada tahun 2023 menjadi 91,63 persen pada tahun 2025. Jawa peningkatan dari 88,77 persen (2023) menjadi 91,59 persen (2025). Luar Jawa peningkatan dari 89,00 persen (2023) menjadi 91,70 persen (2025). Secara persentase, wilayah Luar Jawa sedikit lebih unggul dalam penggunaan fasilitas BAB Sendiri dibandingkan Jawa pada periode 2023 dan 2025.

Penggunaan fasilitas BAB Bersama/Umum di seluruh wilayah, mencerminkan pergeseran menuju sanitasi yang lebih pribadi. Tingkat nasional (Indonesia), persentase penggunaan fasilitas Bersama/Umum menurun hampir setengahnya, dari 8,80 persen (2023) menjadi 4,92 persen (2025). Penurunan paling tajam tercatat di wilayah luar Jawa, dari 8,16 persen (2023) menjadi 3,88 persen (2025), dibandingkan dengan Jawa yang menurun dari 9,16 persen (2023) menjadi 5,51 persen (2025). Pada tahun 2025, persentase penggunaan fasilitas Bersama/Umum di Jawa 5,51 persen masih lebih tinggi dibandingkan Luar Jawa 3,88 persen. Pencapaian terbaik terlihat pada pengurangan persentase rumah tangga yang sama sekali tidak memiliki fasilitas BAB. Tingkat Nasional (Indonesia), persentase tidak ada berkurang dari 2,35 persen (2023) menjadi 1,22 persen (2025). Wilayah Luar Jawa memiliki persentase tidak ada yang lebih tinggi pada tahun 2023 sebesar 2,85 persen dibandingkan Jawa 2,06 persen. Pada tahun 2025, persentase tidak ada di Jawa berhasil ditekan hingga di bawah satu persen 0,95 persen, sementara Luar Jawa masih di angka 1,69 persen. Adanya perbaikan kondisi sanitasi yang substansial dan berkelanjutan di kalangan rumah tangga non pertanian Indonesia dari tahun 2023 hingga 2025. Peningkatan drastis pada kepemilikan fasilitas BAB Sendiri dan penurunan tajam pada kategori Bersama/Umum dan tidak ada menunjukkan keberhasilan program pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam mencapai target Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) atau Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait akses sanitasi layak (tabel 3.4.11b).

Tabel 3.4.11b. Persentase Penggunaan Fasilitas BAB di Rumah Tangga Non Pertanian di Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, 2023-2025

(%)

Fasilitas BAB	Rumah Tangga Non Pertanian								
	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sendiri	88,77	90,92	91,59	89,00	91,06	91,70	88,85	90,97	91,63
Bersama/Umum	9,16	7,75	5,51	8,16	6,29	3,88	8,80	7,22	4,92
Tidak ada	2,06	1,32	0,95	2,85	2,65	1,69	2,35	1,81	1,22

Sumber : Susenas, BPS

Rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar terbagi lagi menurut penggunaannya, di antaranya adalah tersedia fasilitas BAB dan digunakan untuk anggota rumah tangga sendiri, tersedia fasilitas tetapi penggunaan bersama anggota rumah tangga lain dan tertentu, rumah tangga menggunakan fasilitas BAB di MCK umum, dan rumah tangga memiliki fasilitas BAB tetapi tidak menggunakan. Kepemilikan fasilitas BAB Sendiri mendominasi di semua subsektor dan wilayah. Tingkat nasional persentase tertinggi penggunaan fasilitas sendiri tercatat pada subsektor perkebunan 90,38 persen, diikuti oleh hortikultura 88,82 persen. Subsektor peternakan memiliki persentase terendah 87,84 persen. Jawa secara konsisten menunjukkan tingkat kepemilikan fasilitas BAB Sendiri yang lebih tinggi berkisar antara 87,99 - 90,99 persen dibandingkan dengan Luar Jawa berkisar antara 83,52 - 90,48 persen, kecuali pada subsektor perkebunan, di mana Luar Jawa 90,48 persen sedikit melampaui Jawa 89,32 persen. Fasilitas sendiri ditemukan pada subsektor tanaman pangan, di mana Jawa mencapai 90,29 persen sedangkan Luar Jawa hanya 83,52 persen.

Penggunaan fasilitas Bersama/Umum merupakan alternatif yang paling banyak digunakan setelah fasilitas sendiri. Tingkat Nasional persentase tertinggi berada pada subsektor peternakan 8,25 persen,

sementara terendah pada subsektor perkebunan 5,84 persen. Wilayah Jawa berkisar 7,06 - 9,07 persen cenderung memiliki persentase penggunaan fasilitas Bersama/Umum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Luar Jawa berkisar 5,51 - 9,08 persen, kecuali pada subsektor hortikultura, di mana persentasenya hampir sama 7,06 persen di Jawa dan 9,08 persen di Luar Jawa. Rumah Tangga Tanpa Fasilitas BAB (tidak ada) tingkat nasional subsektor tanaman pangan dan peternakan memiliki persentase tertinggi untuk kategori ini 4,77 persen dan 3,91 persen. Wilayah Luar Jawa secara substansial memiliki persentase rumah tangga tanpa fasilitas BAB yang jauh lebih tinggi di semua subsektor dibandingkan dengan Jawa. Pada subsektor tanaman pangan, di mana Luar Jawa mencatat 7,84 persen rumah tangga tanpa fasilitas, sementara Jawa hanya 2,26 persen, di Jawa subsektor perkebunan mencatat persentase terendah tanpa fasilitas 1,60 persen (tabel 3.4.12a).

Tabel 3.4.12a. Persentase Penggunaan Fasilitas BAB menurut Subsektor Rumah Tangga berusaha di Pertanian. Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, 2025

(%)

Fasilitas BAB	Rumah Tangga berusaha di Pertanian											
	Jawa				Luar Jawa				Indonesia			
	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak
Sendiri	90,29	90,99	89,32	87,99	83,52	86,21	90,48	87,53	87,24	88,82	90,38	87,84
Bersama/Umum	7,45	7,06	9,07	8,10	8,64	9,08	5,51	8,57	7,99	7,98	5,84	8,25
Tidak ada	2,26	1,96	1,60	3,91	7,84	4,71	4,00	3,90	4,77	3,21	3,79	3,91

Sumber : Susenas, BPS

Keterangan: TP = Tanaman Pangan, Horti = Hortikultura, Bun = Perkebunan, Nak = Peternakan

Kepemilikan fasilitas BAB Sendiri menunjukkan variasi yang cukup besar antar subsektor. Tingkat nasional subsektor peternakan memiliki persentase tertinggi dalam kepemilikan fasilitas BAB Sendiri yaitu 92,18 persen, diikuti oleh perkebunan sebesar 89,66 persen. Subsektor hortikultura memiliki persentase terendah di 83,50 persen. Pada subsektor tanaman pangan Luar Jawa sebesar 84,11 persen sedikit lebih unggul

dibandingkan Jawa sebesar 83,60 persen. Pada subsektor perkebunan dan peternakan, Luar Jawa secara signifikan lebih unggul Perkebunan Luar Jawa sebesar 90,63 persen dibandingkan di Jawa sebesar 83,71 persen. Sebaliknya, pada subsektor hortikultura di Jawa sebesar 82,07 persen sedikit lebih unggul dari Luar Jawa yaitu sebesar 78,87 persen. Fasilitas BAB Bersama/umum di tingkat nasional untuk subsektor hortikultura tertinggi sebesar 12,14 persen, sedangkan peternakan dan perkebunan angkanya relatif rendah masing-masing sebesar 6,07 persen dan 6,71 persen. Untuk rumah tangga tanpa fasilitas BAB untuk nasional khususnya subsektor tanaman pangan memiliki persentase tertinggi sebesar 6,66 persen jauh di atas subsektor lainnya. Peternakan dengan persentase tersendah di 1,76 persen. Untuk wilayah Jawa menunjukkan kerentanan sanitasi tertinggi pada subsektor tanaman pangan sebesar 6,78 persen dan diluar Jawa sebesar 6,27 persen (tabel 3.4.12b).

Tabel 3.4.12b. Persentase Penggunaan Fasilitas BAB menurut Subsektor Rumah Tangga Buruh Tani. Jawa, Luar Jawa dan Indonesia, 2025

(%)

Fasilitas BAB	Rumah Tangga Buruh Tani											
	Jawa				Luar Jawa				Indonesia			
	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak
Sendiri	83,60	82,07	83,71	92,15	84,11	87,87	90,63	92,25	83,72	83,50	89,66	92,18
Bersama/Umum	9,62	12,89	12,12	6,10	9,62	9,81	5,83	5,97	0,00	12,14	6,71	6,07
Tidak ada	6,78	5,04	4,16	1,75	6,27	2,32	3,55	1,78	6,66	4,37	3,63	1,76

Sumber : Susenas, BPS

Keterangan: TP = Tanaman Pangan, Horti = Hortikultura, Bun = Perkebunan, Nak = Peternakan

Berdasarkan Sumber Penerangan

Sebagai negara agraris sektor pertanian mendapat prioritas dalam pembangunan, karena sebagian besar penduduknya tinggal di desa. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. Sumber penerangan di wilayah Jawa

dan Luar Jawa pada umumnya bersumber dari listrik. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh BUMN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya yang tidak dikelola oleh BUMN. Untuk wilayah Jawa pada tahun 2025 rumah tangga berusaha di pertanian yang menggunakan listrik PLN mencapai 96,71 persen, sedangkan di wilayah Luar Jawa yang menggunakan sumber penerangan PLN sebesar 89,37 persen. Rumah tangga berusaha di pertanian yang tidak menggunakan listrik non PLN tahun 2025 yang di Jawa sebesar 0,05 persen diluar Jawa sebesar 4,79 persen.

Tabel 3.4.13. Persentase Penggunaan Sumber Penerangan di Rumah Tangga berusaha di Pertanian dan Rumah Tangga Buruh Tani dan non Pertanian, 2023 – 2025

(%)

Sumber Penerangan	Rumah Tangga berusaha di Pertanian								
	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Listrik PLN	99,77	99,79	96,71	90,92	92,06	89,37	95,01	95,64	92,64
Listrik Non PLN	0,15	0,16	0,05	5,82	5,04	4,79	3,20	2,78	2,68
Lainnya*)	0,08	0,05	0,04	3,25	2,91	2,61	1,79	1,58	1,47
Sumber Penerangan	Rumah Tangga Buruh Tani								
	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Listrik PLN	99,88	99,86	95,01	94,24	94,94	90,81	97,38	97,64	93,04
Listrik Non PLN	0,10	0,11	0,07	5,12	4,61	3,95	2,32	2,15	1,90
Lainnya*)	0,02	0,02	0,01	0,64	0,44	0,29	0,29	0,21	0,14
Sumber Penerangan	Rumah Tangga Non Pertanian								
	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Listrik PLN	99,85	99,88	97,42	98,08	98,54	95,84	99,21	99,39	96,84
Listrik Non PLN	0,13	0,11	0,08	1,42	1,13	0,94	0,60	0,49	0,39
Lainnya*)	0,02	0,01	0,01	0,50	0,33	0,24	0,19	0,13	0,09

Sumber : Susenas, BPS

Keterangan : *) Listrik non PLN, Petromak/aladin, pelita/sentir/obor, lainnya

Wilayah Jawa pada tahun 2025 rumah tangga buruh tani yang menggunakan sumber PLN mencapai 95,01 persen, sedangkan di wilayah Luar Jawa yang menggunakan sumber penerangan PLN sebesar 90,81 persen. Tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kehidupan masyarakat, dan PLN sangat mendukung penuh cita-cita ketahanan pangan dalam negeri. Rumah tangga non pertanian yang menggunakan sumber PLN mencapai 97,42 persen, sedangkan di wilayah Luar Jawa yang menggunakan sumber penerangan PLN sebesar 95,84 persen yang tidak menggunakan listrik non PLN di Jawa sebesar 0,08 persen dan diluar Jawa sebesar 0,94 persen.

Sebagai negara agraris sektor pertanian mendapat prioritas dalam pembangunan, karena sebagian besar penduduknya tinggal di desa. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. Sumber penerangan di wilayah Jawa dan Luar Jawa pada umumnya bersumber dari listrik. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh BUMN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya yang tidak dikelola oleh BUMN. Untuk wilayah Jawa pada tahun 2025 rumah tangga berusaha di pertanian yang menggunakan listrik PLN mencapai 96,71 persen, sedangkan di wilayah Luar Jawa yang menggunakan sumber penerangan PLN sebesar 89,37 persen. Rumah tangga berusaha di pertanian yang tidak menggunakan listrik non PLN tahun 2025 yang di Jawa sebesar 0,05 persen diluar Jawa sebesar 4,79 persen. Wilayah Jawa pada tahun 2025 rumah tangga buruh tani yang menggunakan sumber PLN mencapai 95,01 persen, sedangkan di wilayah Luar Jawa yang menggunakan sumber penerangan PLN sebesar 90,81 persen. Tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kehidupan masyarakat, dan PLN sangat mendukung penuh cita-cita ketahanan pangan dalam negeri.

Rumah tangga non pertanian yang menggunakan sumber PLN mencapai 97,42 persen, sedangkan di wilayah Luar Jawa yang menggunakan sumber penerangan PLN sebesar 95,84 persen yang tidak menggunakan listrik non PLN di Jawa sebesar 0,08 persen dan diluar Jawa sebesar 0,94 persen.

Untuk wilayah Jawa pada tahun 2025 rumah tangga berusaha di pertanian yang menggunakan listrik PLN sektor tanaman pangan 99,92 persen, hortikultura 99,96 persen, perkebunan 99,89 persen dan peternakan sebesar 99,80 persen. Untuk wilayah penggunaan listrik luar Jawa PLN yang terbesar dari sektor peternakan sebesar 98,04 persen. Kehadiran PLN yang bersinergi dengan petani di sini sangat membantu dan sangat dibutuhkan oleh petani. Di samping itu bisa menghemat, sehingga hasil pertanian meningkat.

Tabel.3.4.14. Persentase Penggunaan Sumber Penerangan berdasarkan Subsektor di Rumah Tangga Berusaha di Pertanian dan Rumah Tangga Buruh tani, 2025

(%)

Sumber Penerangan	Rumah Tangga berusaha di Pertanian											
	Jawa				Luar Jawa				Indonesia			
	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak
Listrik PLN	99,92	99,96	99,89	99,80	88,29	94,01	96,02	98,04	94,67	97,25	96,37	99,23
Listrik Non PLN	0,03	0,00	0,11	0,17	7,24	3,46	3,06	0,93	3,28	1,57	2,79	0,42
Lainnya*)	0,05	0,04	0,00	0,03	4,47	2,53	0,92	1,04	2,04	1,17	0,84	0,35
Sumber Penerangan	Rumah Tangga Buruh Tani											
	Jawa				Luar Jawa				Indonesia			
	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak
Listrik PLN	99,91	100,00	99,74	100,00	99,54	98,76	93,99	99,79	99,83	99,69	94,79	99,94
Listrik Non PLN	0,09	0,00	0,15	0,00	0,31	0,73	5,68	0,21	0,14	0,18	4,90	0,06
Lainnya*)	0,00	0,00	0,11	0,00	0,15	0,50	0,33	0,00	0,04	0,13	0,30	0,00

Sumber : Susenas, BPS

Keterangan: TP = Tanaman Pangan, Horti = Hortikultura, Bun = Perkebunan, Nak = Peternakan

Penerangan listrik dapat bersumber dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan non-PLN. Listrik non-PLN menggunakan sumber penerangan dari akumulator/aki, generator, dan pembangkit listrik tenaga

surya yang tidak dikelola oleh PLN. Untuk wilayah Jawa pada tahun 2025 rumah tangga buruh tani pertanian persentase yang menggunakan sumber PLN sektor tanaman pangan 99,91 persen, hortikultura 100,00 persen, perkebunan 99,74 persen dan peternakan sebesar 100,00 persen. Untuk wilayah luar Jawa pengguna listrik PLN yang terbesar rumah tangga dari sektor peternakan sebesar 99,79 persen. Untuk sektor peternakan penggunaan listrik lebih besar, karena menggunakan sistem kandang tertutup berbasis listrik. (Tabel 3.4.14)

Berdasarkan penggunaan bahan bakar/energi untuk memasak

Tabel 3.4.15a. Persentase Penggunaan Bahan Bakar berdasarkan Sektor di Rumah Tangga berusaha di Pertanian, 2023 – 2025

(%)

Sumber Bahan Bakar	Rumah Tangga berusaha di Pertanian								
	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Listrik + Gas Kota	0,36	0,59	0,56	0,62	0,78	0,82	0,50	0,69	0,70
Gas/Elpiji	78,05	82,28	83,88	72,69	75,42	76,52	75,17	78,60	79,80
Minyak Tanah	0,02	0,01	0,00	3,12	3,26	3,85	1,69	1,75	2,14
Kayu	21,38	16,92	15,49	23,37	20,40	18,71	22,45	18,79	17,28
Lainnya*)	0,18	0,19	0,00	0,20	0,15	0,01	0,19	0,17	0,00

Sumber : Susenas, BPS

Jenis bahan bakar/energi utama yang digunakan pada rumah tangga berusaha di pertanian untuk pulau Jawa pada umumnya menggunakan gas/elpiji dengan persentase 78,05 persen pada tahun 2023 meningkat pada tahun 2025 menjadi 83,88 persen, demikian pula di luar Jawa juga menggunakan gas/elpiji sebesar 72,69 persen tahun 2023 meningkat pada tahun 2025 menjadi 76,52 persen. Penggunaan kayu untuk pulau Jawa tahun 2025 ini turun menjadi 15,49 persen dan diluar Jawa 18,71 persen. Modern ini penggunaan minyak tanah dan lainnya untuk keperluan rumah tangga berusaha di pertanian umumnya beralih ke penggunaan bahan

bakar listrik dan gas kota serta minyak tanah. Karena di sektor pertanian ini pemanfaatan energi listrik dalam proses pengairan dengan menggunakan pompa dan penggilingan Listrik (3.4.15a).

Jenis bahan bakar/energi utama yang digunakan pada rumah tangga buruh tani untuk pulau Jawa pada umumnya menggunakan gas/elpiji dengan persentase 81,23 persen tahun 2023 meningkat pada tahun 2025 menjadi 86,72 persen, demikian pula di luar Jawa juga menggunakan gas/elpiji sebesar 90,44 persen tahun 2023 meningkat pada tahun 2025 menjadi 93,44 persen. Modern ini penggunaan bahan bakar kayu, minyak tanah dan lainnya untuk keperluan rumah tangga berusaha di pertanian umumnya beralih ke penggunaan bahan bakar listrik dan gas kota serta minyak tanah.(3.4.15b)

Tabel 3.4.15b..Persentase Penggunaan Bahan Bakar berdasarkan Sektor di Rumah Tangga Buruh Tani, 2023 – 2025

(%)

Sumber Bahan Bakar	Rumah Tangga Buruh Tani								
	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Listrik + Gas Kota	0,40	0,61	0,48	0,54	0,73	0,76	0,47	0,66	0,61
Gas/Elpiji	81,23	84,79	86,72	90,44	92,32	93,04	85,31	88,20	89,69
Minyak Tanah	0,08	0,12	0,00	0,98	0,98	1,20	0,48	0,51	0,56
Kayu	18,11	14,32	12,63	7,77	5,84	4,94	13,52	10,49	9,01
Lainnya*)	0,18	0,16	0,17	0,27	0,13	0,07	0,22	0,15	0,12

Sumber : Susenas, BPS

Penggunaan sumber bahan bakar oleh rumah tangga non-pertanian di Indonesia selama periode 2023–2025 menunjukkan pola yang semakin terarah pada energi modern, terutama Gas/Elpiji. Gas/Elpiji konsisten menjadi sumber energi utama dengan pangsa lebih dari 90% secara nasional dan cenderung meningkat di semua wilayah. Hal ini mencerminkan keberlanjutan program konversi energi serta peningkatan akses distribusi. Sumber energi tradisional seperti kayu dan minyak tanah

mengalami penurunan signifikan. Penggunaan kayu turun baik di Jawa maupun luar Jawa, menandakan pergeseran menuju energi yang lebih bersih dan efisien. Sementara itu, minyak tanah hampir tidak digunakan lagi di Jawa, meskipun masih cukup terlihat di luar Jawa karena keterbatasan akses atau faktor ekonomi setempat. Penggunaan listrik dan gas kota menunjukkan tren yang berfluktuasi mengalami peningkatan pada 2024, namun kembali menurun pada 2025. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun akses gas kota berkembang, sebagian besar rumah tangga tetap lebih memilih Gas/Elpiji yang lebih mudah diperoleh. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa Indonesia terus bergerak menuju modernisasi konsumsi energi rumah tangga. Dominasi Gas/Elpiji serta penurunan penggunaan energi tradisional memperlihatkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan energi yang lebih efektif, aman, dan ramah lingkungan. (Tabel 3.4.15c)

Tabel 3.4.15c..Persentase Penggunaan Bahan Bakar berdasarkan Sektor di Rumah Tangga Non Pertanian, 2023 – 2025

(%)

Sumber Bahan Bakar	Rumah Tangga Non Pertanian								
	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Listrik + Gas Kota	1,36	1,82	1,67	2,14	2,38	2,18	1,64	2,03	1,86
Gas/Elpiji	94,07	94,59	95,52	84,15	85,00	85,73	90,48	91,08	91,95
Minyak Tanah	0,19	0,12	0,14	8,05	7,65	8,14	3,04	2,87	3,06
Kayu	3,54	2,63	2,08	5,17	4,46	3,44	4,13	3,30	2,58
Lainnya*)	0,84	0,84	0,59	0,49	0,51	0,50	0,71	0,72	0,56

Sumber : Susenas, BPS

Untuk wilayah Jawa pada tahun 2025 rumah tangga berusaha di pertanian yang menggunakan bahan bakar gas/elpiji sektor tanaman pangan 85,38 persen, hortikultura 83,45 persen, perkebunan 76,98 persen dan peternakan sebesar 80,30 persen. Untuk wilayah penggunaan bahan bakar luar jawa gas/elpiji yang terbesar dari sektor perkebunan sebesar

85,34 persen. Modern khususnya di daerah perdesaan bahan bakar kayu masih digunakan dikarenakan kenaikan harga bahan bakar minyak tanah, juga jumlah penduduk miskin dan masih takutnya rumah tangga berusaha di pertanian menggunakan gas/elpiji. Rumah tangga buruh tani orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Di Jawa penggunaan bahan bakar gas/elpiji terbesar di subsektor peternakan, karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemanasan anak ayam yang berusia 1-10 hari selama masa pemeliharaan. Untuk diluar jawa sektor perkebunan terbesar menggunakan bahan bakar gas/elpiji untuk rumah industri seperti pembuatan minyak serai. (3.4.16)

Tabel 3.4.16. Persentase Penggunaan Bahan Bakar berdasarkan Subsektor Rumah Tangga Berusaha di Pertanian dan Rumah Tangga Buruh Tani, 2025

(%)

Sumber Bahan Bakar	Rumah Tangga berusaha di Pertanian											
	Jawa				Luar Jawa				Indonesia			
	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak
Listrik + Gas Kota	0,59	0,19	0,82	0,61	0,40	0,77	1,29	0,71	0,51	0,45	1,25	0,65
Gas/Elpiji	85,38	83,45	76,98	80,30	68,44	75,16	85,34	76,03	77,74	79,69	84,59	78,92
Minyak Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	7,90	2,88	6,18	1,65	3,59	2,62	2,01
Kayu	13,97	16,34	22,14	18,97	27,44	16,14	10,36	17,03	20,05	16,25	11,43	18,34
Lainnya*)	0,05	0,02	0,07	0,11	0,00	0,03	0,12	0,05	0,06	0,02	0,12	0,09

Sumber Bahan Bakar	Rumah Tangga Buruh Tani											
	Jawa				Luar Jawa				Indonesia			
	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak
Listrik + Gas Kota	0,40	0,32	1,21	0,57	0,30	0,81	0,83	2,41	0,38	0,44	0,88	1,09
Gas/Elpiji	86,90	83,65	84,68	92,57	89,34	90,53	94,61	91,79	87,48	85,35	93,22	92,35
Minyak Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,40	1,18	1,98	0,26	0,34	1,02	0,56
Kayu	12,50	15,97	14,04	6,59	9,22	7,15	3,31	3,73	11,73	13,80	4,81	5,78
Lainnya*)	0,19	0,06	0,06	0,27	0,06	0,11	0,06	0,08	0,16	0,07	0,06	0,22

Sumber : Susenas, BPS

Keterangan: TP = Tanaman Pangan, Horti = Hortikultura, Bun = Perkebunan, Nak = Peternakan

3.5. Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa krisis, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Dalam konteks Indonesia, sistem perlindungan sosial terdiri dari dua skema yakni skema non-kontribusi-bantuan sosial yang dibiayai oleh anggaran pemerintah, dan skema kontribusi/jaminan sosial yang dibiayai melalui pembayaran kontribusi dari peserta. Saat ini, program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah antara lain: BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Bansos Rastra, BLT (Bantuan Langsung Tunai), Program Keluarga Harapan (PKH), JKN–KIS (BPJS Kesehatan), dan lain sebagainya.

Selain mendapatkan program dari pemerintah, masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian (rumah tangga tani dan rumah tangga buruh tani) juga memanfaatkan fasilitas pinjaman kredit melalui program yang disediakan oleh pemerintah maupun dari swasta sebagai modal usaha. Salah satu nya dengan mengambil kredit atau pinjaman baik dari bank, koperasi, dan lembaga lainnya. BPS sebagai instansi yang melakukan perhitungan terhadap tingkat kredit masyarakat di Indonesia melalui kegiatan Susenas telah melakukan perhitungan setiap tahunnya terkait program pinjaman apa saja yang diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya dalam tingkat rumah tangga petani, rumah tangga buruh tani, dan rumah tangga bukan tani/buruh tani. Seberapa besar perlindungan sosial yang digunakan oleh rumah tangga pertanian dan non pertanian dijelaskan dalam pembahasan di bawah ini.

Penerima Rastra dan BPNT

Program Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang

diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Berdasarkan data Susenas 2017-2019, persentase penerima Rastra oleh rumah tangga pertanian masih cukup tinggi rata-rata selama 3 tahun sebesar 39,86% yang berarti rumah tangga pertanian masih banyak yang membeli/menerima Rastra walaupun beras raskin/rastra memiliki kualitas yang rendah tetapi harga sangat terjangkau.

Pada tahun 2018 bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) dialihkan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur di masing-masing wilayah. Penyaluran BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama dengan bank. BPNT mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 daerah kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap hingga tahun 2024 ini, BPNT diperluas ke seluruh daerah kabupaten/kota sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran nontunai. Besaran bantuan yang diterima adalah Rp200.000 per bulan atau Rp400.000 per dua bulan, yang dikirim langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Apabila dilihat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Suenas) bulan Maret yang dilakukan oleh BPS, ada 3 kategori rumah tangga dalam pembagiannya yaitu rumah tangga berusaha di pertanian, rumah tangga buruh tani, dan rumah tangga non pertanian. Data hasil survei tersebut dipersentasekan berdasarkan banyaknya rumah tangga yang menerima dan yang tidak menerima sesuai kategori rumah tangga. Berdasarkan pembagian wilayah yakni Jawa dan luar Jawa, pada tahun 2023-2025 persentase rumah tangga berusaha di pertanian yang menerima bantuan sosial BPNT di wilayah Jawa menunjukkan angka lebih tinggi masing-masing sebesar 28,27%, 30,09%, dan 27,77% dibandingkan rumah tangga berusaha di pertanian yang ada di luar Jawa dengan penerima BPNT

masing-masing hanya sebesar 17,83%, 22,43%, dan 20,05%. Demikian juga persentase rumah tangga buruh tani penerima bantuan sosial BPNT di wilayah Jawa yang lebih tinggi dibanding dengan di luar Jawa, dengan persentase penerima di wilayah Jawa masing-masing sebesar 35,92%, 39,67%, dan 36,65%. Rumah tangga non pertanian juga menunjukkan di pulau Jawa lebih banyak persentase penerima BPNT dibandingkan dengan di luar Jawa yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.1 berikut.

Tabel 3.5.1. Persentase Rumah Tangga Berusaha di Pertanian, Buruh Tani dan Non Pertanian Penerima BPNT, 2023-2025

(%)

No.	Wilayah	Rumah tangga berusaha di pertanian			Rumah tangga buruh tani			Rumah tangga non pertanian		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Jawa	28,27	30,09	27,77	35,92	39,67	36,65	16,45	18,17	16,15
2	Luar Jawa	17,83	22,43	20,05	19,08	22,02	18,80	10,97	14,14	12,41
3	Indonesia	22,66	25,98	23,49	28,45	31,69	28,26	14,47	16,69	14,79

Sumber: SUSENAS Maret - BPS, diolah Pusdatin

Selanjutnya, persentase rumah tangga berusaha di pertanian penerima BPNT jika dilihat berdasarkan subsektor tahun 2023-2025 di wilayah Jawa, yang terbanyak yakni rumah tangga subsektor peternakan dengan masing-masing persentase yakni 31,63%, 33,50%, dan 32,74%. Sementara pada tahun 2023-2025 penerima BPNT terbanyak di luar Jawa adalah rumah tangga yang berusaha di pertanian dengan subsektor tanaman pangan dengan masing-masing persentase yakni 19,87%, 25,80%, dan 24,27%.

Persentase rumah tangga buruh tani pada tahun 2023-2025 yang menerima BPNT terbanyak di wilayah Jawa berasal dari subsektor tanaman pangan dengan persentase sebesar 37,79%, 40,97%, dan 38,94%. Demikian dengan persentase rumah tangga buruh tani penerima BPNT terbanyak di luar Jawa selama tahun 2023-2025 juga berasal dari subsektor tanaman pangan dengan persentase masing-masing tahun yakni 29,76%, 33,25%, dan 30,62%. Pertumbuhan persentase rumah

tangga berusaha di pertanian yang menerima BPNT di wilayah Jawa selama tahun 2024-2025 mengalami penurunan untuk semua subsektor yakni tanaman pangan (-8,33%), hortikultura (11,50%), perkebunan (-12,14%), dan peternakan (-2,28%). Untuk wilayah di luar Jawa juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan subsektor paling besar angka penurunannya yakni peternakan sebesar -17,92%. Pertumbuhan persentase rumah tangga buruh tani juga mengalami penurunan baik di wilayah Jawa dan Luar Jawa dengan penurunan terbesar di wilayah Jawa yakni subsektor hortikultura sebesar -15,18% dan untuk wilayah Luar Jawa yakni subsektor perkebunan sebesar -18,04%. Bisa disimpulkan bahwa persentase rumah tangga yang menerima BPNT di tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 untuk semua subsektor baik di wilayah Jawa dan Luar Jawa. Secara keseluruhan persentase rumah tangga berusaha di pertanian dan rumah tangga buruh tani penerima BPNT berdasarkan subsektor dirinci pada Tabel 3.5.2.

Tabel 3.5.2. Persentase Rumah Tangga Berusaha di Pertanian dan Rumah Tangga Buruh Tani Penerima BPNT Berdasarkan Subsektor, 2023-2025

Sub Sektor, 2020-2020

(%)

No.	Sub Sektor	Rumah tangga berusaha di pertanian			Rumah tangga buruh tani		
		Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
2023 (%)							
1	Tanaman Pangan	28,35	19,87	24,60	37,79	29,76	35,92
2	Hortikultura	24,84	16,12	20,74	34,36	20,76	31,33
3	Perkebunan	26,15	15,57	16,59	29,30	14,54	16,46
4	Peternakan	31,63	19,29	27,84	26,53	15,52	23,62
2024 (%)							
1	Tanaman Pangan	30,15	25,80	28,19	40,97	33,25	39,18
2	Hortikultura	27,11	21,35	24,60	38,92	24,89	36,12
3	Perkebunan	27,08	18,41	19,25	31,38	17,53	19,22
4	Peternakan	33,50	24,28	30,86	37,16	20,47	32,30
2025 (%)							
1	Tanaman Pangan	27,63	24,27	26,12	38,94	30,62	36,98
2	Hortikultura	24,00	18,42	21,47	33,01	20,71	29,98
3	Perkebunan	23,80	15,99	16,69	28,45	14,37	16,34
4	Peternakan	32,74	19,93	28,58	32,79	20,19	29,23
Pertumbuhan 2024-2025 (%)							
1	Tanaman Pangan	-8,33	-5,93	-7,37	-4,95	-7,92	-5,63
2	Hortikultura	-11,50	-13,70	-12,74	-15,18	-16,77	-17,01
3	Perkebunan	-12,14	-13,18	-13,31	-9,31	-18,04	-15,00
4	Peternakan	-2,28	-17,92	-7,37	-11,76	-1,37	-9,50

Sumber: SUSENAS Maret - BPS, diolah Pusdatin

Kredit Usaha

Berdasarkan data Susenas Maret 2025, kredit usaha yang diterima oleh anggota rumah tangga pertanian masih sangat kecil yaitu berkisar 25,50%, mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang hanya 24,50%. Artinya rumah tangga pertanian masih banyak yang tidak menerima atau belum mendapatkan manfaat dari kredit usaha yang tersedia. Jenis kredit usaha yang dimaksud meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Bank selain KUR, Program Koperasi, Kredit Perorangan, dan Kredit Lainnya. Mulai tahun 2017 sampai sekarang hasil Susenas terdapat tambahan jenis kredit usaha yang diterima oleh rumah tangga pertanian antara lain dari Bank Perkreditan Rakyat, Pegadaian, Leasing, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pinjaman online, dan PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM-Mekaar).

Jenis kredit usaha yang paling banyak diterima anggota rumah tangga adalah jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, yang 100% dananya milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi. Pembiayaan/kredit tersebut disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah berupa subsidi bunga dan ada pola penjaminan sehingga agunan pokok KUR berupa usaha atau obyek yang dibiayai. Selama periode tahun 2023-2025 persentase penerima KUR untuk rumah tangga berusaha di pertanian yakni 10,15%, 9,12%, dan 8,94% dengan pertumbuhan sebesar -6,06% (mengalami penurunan dari tahun ke tahun). Sedangkan persentase penerima kredit untuk rumah tangga buruh tani yang tertinggi yakni 7,85%, 7,35%, dan 7,01% dengan pertumbuhan sebesar -5,50% (mengalami penurunan dari tahun ke tahun). Rincian

persentase rumah tangga berusaha di pertanian, buruh tani, dan non pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.5.3.

Tabel 3.5.3. Persentase Rumah Tangga Berusaha di Pertanian, Buruh Tani, dan Non Pertanian yang Menerima Kredit menurut Jenis Kredit Usaha, 2023 – 2025

(%)

Jenis Kredit Usaha	Rumah tangga berusaha di Pertanian			Pertumb. 2024- 2025 (%)	Rumah tangga buruh tani			Pertumb. 2024- 2025 (%)	Rumah tangga non pertanian			Pertumb. 2024- 2025 (%)
	2023	2024	2025		2023	2024	2025		2023	2024	2025	
KUR	10,15	9,12	8,94	-1,96	7,85	7,35	7,01	-4,56	8,92	7,86	7,48	-4,81
Program Bank selain KUR	2,78	2,68	2,71	1,44	2,98	2,58	2,51	-2,60	3,97	3,74	3,95	5,54
Program Koperasi	3,92	2,52	2,66	5,58	5,37	2,39	3,10	29,81	4,18	2,51	2,45	-2,42
Kredit Perorangan dengan bunga	1,10	0,69	0,74	7,34	1,64	0,89	1,24	38,72	1,17	0,78	0,69	-11,74
Bank Perkreditan Rakyat	0,57	0,48	0,53	9,56	0,73	0,39	0,61	56,44	1,12	0,79	0,90	14,04
Pegadaian	0,84	0,82	0,85	4,46	0,54	0,39	0,52	32,80	0,94	0,93	1,04	11,85
Leasing	0,83	0,71	1,05	47,14	1,45	1,22	1,57	28,35	2,88	2,54	3,20	25,97
BUMDES	0,34	0,30	0,27	-6,92	0,39	0,34	0,21	-38,79	0,21	0,20	0,24	21,34
Pinjaman Online	0,09	0,12	0,13	11,08	0,17	0,09	0,24	171,10	0,23	0,33	0,56	70,72
PNM-Mekaar	-	4,64	4,90	5,45	-	8,19	9,13	11,48	-	4,95	5,22	5,34

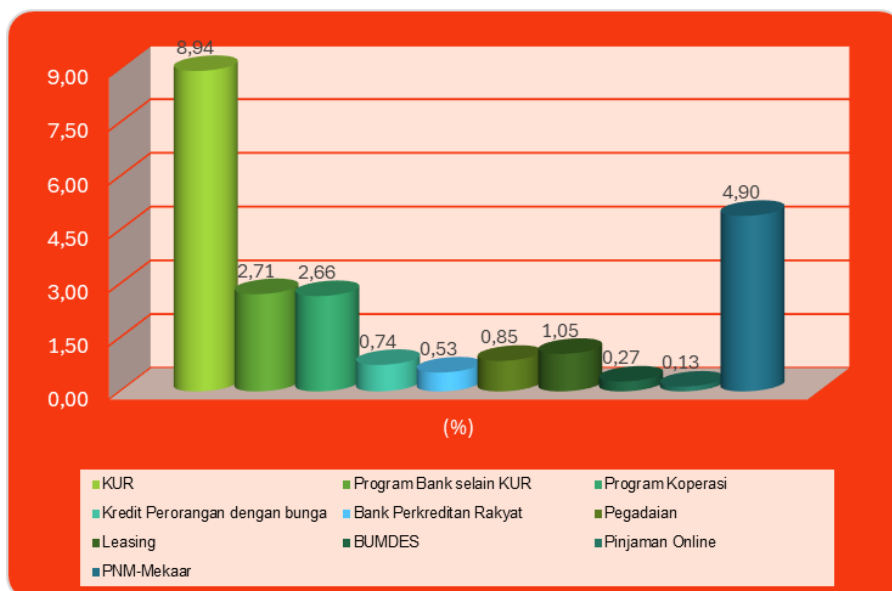
Sumber: SUSENAS Maret - BPS, diolah Pusdatin

Di tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka di tahun 2024 hampir semua program kredit yang diterima oleh rumah tangga berusaha di pertanian mengalami kenaikan kecuali KUR dan BUMDES. Secara pertumbuhan dari tahun 2024-2025, jenis kredit yang mengalami kenaikan terbesar yakni program Leasing sebesar 11,08% dan yang terbesar kedua yakni Pinjaman Online sebesar 11,08%. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan pertumbuhan program kredit yang diterima oleh rumah tangga buruh tani. Hampir semua program kredit yang diterima oleh rumah tangga buruh tani mengalami kenaikan. Program yang paling tinggi angka pertumbuhan untuk rumah tangga buruh tani yakni Pinjaman Online sebesar 171,10% dan yang terbesar kedua yakni Bank Perkreditan Rakyat sebesar 56,44%.

Pinjaman online merupakan program yang cukup pesat angka pertumbuhannya, hal tersebut dikarenakan karena kemudahan akses, proses yang cepat, dan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan dengan program kredit lainnya. Pengguna hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau situs web, tanpa harus datang ke bank atau

lembaga keuangan. Selain itu, pinjaman online sering kali menawarkan persetujuan yang lebih cepat dan pencairan dana yang langsung ke rekening, menjadikannya solusi praktis bagi mereka yang membutuhkan dana darurat. Kemudahan ini menarik banyak orang, terutama di era digital.

Persentase rumah tangga berusaha di Pertanian berdasarkan jenis kredit usaha menurut data Susenas Maret tahun 2025 bisa dilihat pada Gambar 3.5.1. sebagai berikut.



Gambar 3.5.1. Persentase Rumah Tangga Berusaha di Pertanian yang Menerima Kredit Usaha menurut Jenis Kredit, 2025

Persentase penerima kredit usaha untuk rumah tangga berusaha di pertanian di tahun 2025 jika di urutkan 3 tertinggi yakni KUR sebesar 8,94%, PNM-Mekaar sebesar 4,90%, dan Program Bank selain KUR sebesar 2,71%. Dari angka tersebut, bisa terlihat bahwa program Kredit Usaha Rakyat yang banyak diminati oleh rumah tangga berusaha di pertanian, rumah tangga buruh tani, maupun rumah tangga non pertanian selain KUR yakni PNM-Mekaar. Di tahun 2025, BPS melalui Susenas telah mendapatkan data terkait berapa banyak persentase rumah tangga

berusaha di pertanian, rumah tangga buruh tani, dan rumah tangga non pertanian yang menerima kredit dari PNM-Mekaar. PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku UMKM yang diluncurkan pada tahun 2015. Pada dasarnya, nasabah PNM Mekaar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan.

Selanjutnya, pertumbuhan persentase penerima KUR di tahun 2024-2025 untuk rumah tangga berusaha di pertanian, rumah tangga buruh tani, dan rumah tangga non pertanian menurut wilayah dapat dilihat Pada Tabel 3.5.4 berikut.

Tabel 3.5.4. Persentase Anggota Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha KUR menurut Wilayah, 2023 – 2025

(%)

Wilayah	Rumah tangga berusaha di pertanian			Pertumb. 2024-2025 (%)	Rumah tangga buruh tani			Pertumb. 2024-2025 (%)	Rumah tangga non pertanian			Pertumb. 2024-2025 (%)
	2023	2024	2025		2023	2024	2025		2023	2024	2025	
Jawa	10,78	9,70	9,36	-3,49	7,61	6,79	6,69	-1,44	9,31	8,15	7,79	-4,49
Luar Jawa	9,61	8,62	8,60	-0,18	8,16	8,02	7,37	-8,09	8,24	7,35	6,95	-5,45
Indonesia	10,15	9,12	8,94	-1,96	7,85	7,35	7,01	-4,56	8,92	7,86	7,48	-4,81

Sumber: SUSENAS Maret - BPS, diolah Pusdatin

Berdasarkan pembagian wilayah yakni Jawa dan luar Jawa, pertumbuhan persentase penerima program KUR untuk rumah tangga berusaha di pertanian mengalami penurunan yakni -3,49% untuk dan rumah tangga buruh tani juga mengalami penurunan sebesar -1,44%. Sedangkan di rumah tangga non pertanian juga mengalami penurunan sebesar -4,49%. Pertumbuhan persentase untuk wilayah Luar Jawa di tahun 2024-2025 semua rumah tangga yang menerima KUR juga mengalami penurunan, yakni sebesar -0,18% untuk rumah tangga berusaha di pertanian, -8,09% untuk rumah tangga buruh tani, dan -8,10% untuk rumah tangga non pertanian. Secara nasional semua anggota rumah

tangga mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025 yang menerima program KUR. Grafik persentase rumah tangga penerima KUR tahun 2023-2025 jika dilihat dari wilayah Jawa dan Luar Jawa dapat dilihat pada Gambar 3.5.2.



Gambar 3.5.2. Persentase Penerimaan Kredit Usaha KUR oleh Rumah Tangga Berusaha di Pertanian, Buruh Tani dan Non Pertanian, 2023 - 2025

Jika dilihat dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase rumah tangga berusaha di pertanian yang menerima KUR dari tahun 2023-2025 di dominasi rumah tangga yang bermukim di wilayah Jawa dengan persentase masing-masing tahun sebesar 10,78%, 9,70%, dan 9,36%. Di tahun 2025, persentase rumah tangga berusaha di pertanian yang menerima KUR di wilayah Jawa sebesar 9,36%, lebih besar dibandingkan di wilayah Luar Jawa yakni 8,60%. Persentase rumah tangga buruh tani yang menerima KUR di wilayah Jawa lebih sedikit dibanding dengan di wilayah Luar Jawa yakni sebesar 6,69%. Sedangkan untuk persentase rumah tangga non pertanian di wilayah Jawa lebih besar dibandingkan dengan di wilayah Luar Jawa, yakni sebesar 7,79%.

Apabila dilihat pertumbuhan penerima KUR berdasarkan subsektor di tahun 2023-2025, persentase penerimaan kredit usaha jenis KUR oleh anggota rumah tangga berusaha di pertanian wilayah Jawa lebih banyak rumah tangga subsektor hortikultura (tahun 2023 dan 2024) dan subsektor perkebunan (tahun 2025). Sementara di wilayah luar Jawa, persentase penerimaan kredit usaha jenis KUR oleh anggota rumah tangga berusaha di pertanian lebih banyak rumah tangga subsektor peternakan (tahun 2023 dan 2024) dan subsektor hortikultura (tahun 2025). Di tahun 2025, rumah tangga berusaha di pertanian subsektor perkebunan wilayah Jawa yang menerima KUR sebesar 11,51%, sedangkan di luar Jawa di subsektor hortikultura berkisar 10,87%. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusaha di Pertanian dan Buruh Tani yang Menerima Kredit Usaha KUR menurut Wilayah, 2023 – 2025 dilihat pada Tabel 3.5.5.

Tabel 3.5.5. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusaha di Pertanian dan Buruh Tani yang Menerima Kredit Usaha KUR menurut Wilayah, 2023 – 2025

(%)

No.	Sub Sektor	Rumah tangga berusaha di pertanian			Rumah tangga buruh tani		
		Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
2023							
1	Tanaman Pangan	10,14	8,96	9,62	7,33	6,97	7,24
2	Hortikultura	14,45	11,74	13,17	7,59	7,95	7,67
3	Perkebunan	11,37	9,53	9,70	8,67	8,74	8,73
4	Peternakan	10,41	12,06	10,92	9,36	7,28	8,81
2024							
1	Tanaman Pangan	9,16	8,22	8,74	6,34	5,42	6,12
2	Hortikultura	12,28	9,68	11,15	7,95	10,21	8,40
3	Perkebunan	10,87	8,52	8,75	8,11	8,95	8,85
4	Peternakan	9,33	10,88	9,77	7,53	6,93	7,35
2025							
1	Tanaman Pangan	8,56	7,64	8,15	6,08	6,20	6,11
2	Hortikultura	11,22	10,87	11,06	8,27	5,12	7,49
3	Perkebunan	11,51	8,92	9,15	7,42	8,04	7,95
4	Peternakan	10,49	10,03	10,34	8,50	5,75	7,72
Pertumbuhan 2024-2025 (%)							
1	Tanaman Pangan	-6,51	-7,02	-6,74	-4,04	14,26	-0,28
2	Hortikultura	-8,67	12,34	-0,77	3,99	-49,86	-10,81
3	Perkebunan	5,91	4,60	4,56	-8,44	-10,16	-10,09
4	Peternakan	12,42	-7,77	5,80	12,86	-17,02	4,98

Sumber: SUSENAS Maret - BPS, diolah Pusdatin

Rumah tangga buruh tani di tahun 2023-2025 yang menerima KUR di wilayah Jawa terbanyak dari subsektor peternakan, dengan persentase tertinggi di tahun 2023 sebesar 9,36%. Sementara di luar Jawa, rumah tangga buruh tani penerima KUR terbanyak pada tahun 2024 berasal dari subsektor hortikultura 10,21%, Dilihat dari pertumbuhan kredit KUR selama periode 2024-2025, penerimaan KUR baik di rumah tangga berusaha di pertanian maupun rumah tangga buruh tani untuk semua subsektor di wilayah Indonesia sebagian besar mengalami penurunan. Kenaikan untuk rumah tangga yang berusaha di pertanian terjadi pada subsektor perkebunan sebesar 4,56% dan subsektor peternakan sebesar 5,80% per tahun. Sedangkan untuk rumah tangga buruh tani, kenaikan hanya terjadi pada subsektor peternakan sebesar 4,98% per tahun.

Jika dilihat berdasarkan provinsi, maka provinsi dengan pertumbuhan tertinggi dalam persentase penerimaan KUR tahun 2024-2025 di rumah tangga berusaha di pertanian adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pertumbuhan 80,97% per tahun. Persentase anggota rumah tangga berusaha di pertanian penerima KUR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 sebesar 4,61% dan terus meningkat menjadi 8,34% di tahun 2025. Provinsi dengan peningkatan terendah adalah Provinsi Papua dengan pertumbuhan hanya 2,17% per tahun, sedangkan provinsi dengan penurunan terbesar adalah Provinsi Papua Tengah yakni -53,70% per tahun. Provinsi yang memiliki persentase anggota rumah tangga berusaha di pertanian penerima KUR terbanyak pada tahun 2025 adalah Provinsi DKI Jakarta, dengan persentase penerima KUR sebesar 17,76%. Angka ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2024 yakni sebesar 0,00%. Sedangkan provinsi yang memiliki persentase anggota rumah tangga berusaha di pertanian dengan penerima KUR terkecil pada tahun 2025 adalah Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,04%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 yakni sebesar 0,00% dikarenakan masih menjadi provinsi baru. (Tabel 3.5.6)

Tabel 3.5.6. Persentase Anggota Rumah Tangga Pertanian yang Menerima Kredit Usaha KUR menurut Provinsi, 2023 – 2025

(%)

Provinsi	Rumah tangga berusaha di pertanian (%)			Pertumb. 2024-2025 (%)
	2023	2024	2025	
Aceh	2,74	1,85	2,64	42,43
Sumatera Utara	9,90	8,06	10,01	24,22
Sumatera Barat	12,89	9,88	11,50	16,47
Riau	9,39	9,30	8,62	-7,32
Jambi	11,59	9,87	11,00	11,41
Sumatera Selatan	7,58	7,12	7,52	5,61
Bengkulu	17,17	16,37	13,34	-18,50
Lampung	8,58	9,08	8,50	-6,35
Kepulauan Bangka Belitung	5,90	4,61	8,35	80,97
Kepulauan Riau	3,30	4,20	2,65	-37,04
DKI Jakarta	13,09	0,00	17,76	-
Jawa Barat	9,84	8,06	7,14	-11,34
Jawa Tengah	12,89	11,79	11,18	-5,16
DI Yogyakarta	15,95	11,04	13,40	21,32
Jawa Timur	10,29	9,65	9,53	-1,33
Banten	1,27	2,14	2,34	8,99
Bali	12,03	11,88	13,28	11,84
Nusa Tenggara Barat	16,07	14,14	11,47	-18,88
Nusa Tenggara Timur	8,27	7,59	6,87	-9,59
Kalimantan Barat	7,94	7,84	5,38	-31,36
Kalimantan Tengah	7,73	6,86	4,99	-27,26
Kalimantan Selatan	7,33	5,48	7,75	41,27
Kalimantan Timur	6,55	7,16	5,60	-21,81
Kalimantan Utara	7,66	7,74	8,08	4,36
Sulawesi Utara	10,32	8,13	8,62	6,11
Sulawesi Tengah	15,50	11,83	10,70	-9,57
Sulawesi Selatan	14,06	13,33	13,86	3,94
Sulawesi Tenggara	15,34	11,52	10,12	-12,18
Gorontalo	21,77	16,61	14,16	-14,74
Sulawesi Barat	13,68	13,61	15,78	15,92
Maluku	5,25	4,49	3,35	-25,37
Maluku Utara	2,67	2,30	2,36	2,70
Papua Barat	3,35	1,37	1,25	-8,49
Papua Barat Daya	0,00	1,99	2,51	26,36
Papua	1,28	3,03	3,10	2,17
Papua Selatan	0,00	8,00	8,83	10,44
Papua Tengah	0,00	0,42	0,20	-53,70
Papua Pegunungan	0,00	0,00	0,04	-
Jawa	10,78	9,70	9,36	-3,49
Luar Jawa	9,61	8,62	8,60	-0,18
Indonesia	10,15	9,12	8,94	-1,96

Sumber: SUSENAS Maret - BPS, diolah Pusdatin

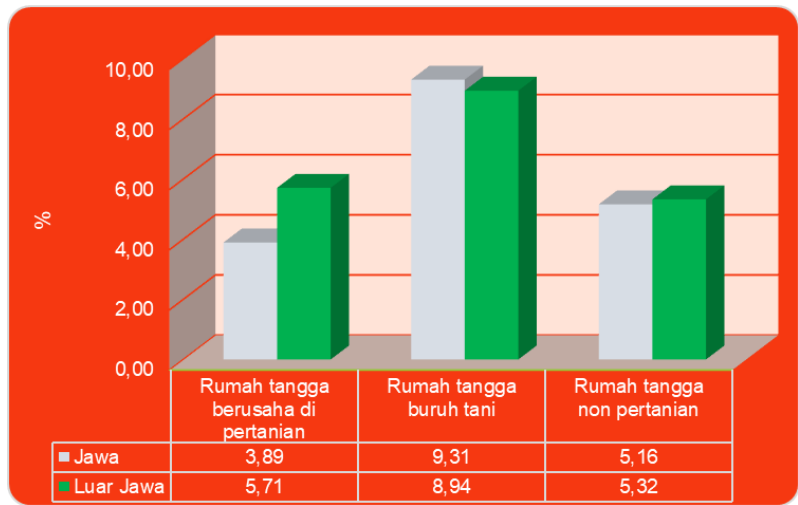
Selanjutnya, jika dilihat selama periode tahun 2025, jenis kredit PNM-Mekaar menempati urutan kedua tertinggi yang diminati oleh anggota rumah tangga setelah program KUR. Program kredit PNM-Mekaar baru masuk perhitungan Susenas di tahun 2024 dikarenakan banyaknya masyarakat yang menerima program kredit ini. Jika dilihat berdasarkan

wilayah, persentase rumah tangga berusaha di pertanian di wilayah Jawa sebesar 3,89% lebih rendah jika dibandingkan wilayah Luar Jawa yakni sebesar 5,71%. Sedangkan pada rumah tangga buruh tani, persentase rumah tangga di wilayah Jawa sebesar 9,31% lebih tinggi dibandingkan wilayah Luar Jawa sebesar 8,94%. (Tabel.3.5.7). dan Persentase Penggunaan Bahan Bakar berdasarkan Sektor di Rumah Tangga Non Pertanian, 2023 – 2025

Tabel 3.5.7. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dari PNM-Mekaar menurut Wilayah, 2025

(%)			
Wilayah	Rumah tangga berusaha di pertanian	Rumah tangga buruh tani	Rumah tangga non pertanian
Jawa	3,89	9,31	5,16
Luar Jawa	5,71	8,94	5,32
Indonesia	4,90	9,13	5,22

Sumber: SUSENAS Maret - BPS, diolah Pusdatin



Gambar 3.5.3. Perkembangan Persentase Penerimaan Kredit PNM-Mekaar oleh Rumah Tangga, 2025

Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan subsektor selama tahun 2024-2025, maka persentase tertinggi penerimaan kredit PNM-Mekaar oleh anggota rumah tangga berusaha di pertanian wilayah Jawa yakni di subsektor hortikultura sebesar 5,99% di tahun 2024 dan di wilayah Luar

Jawa lebih banyak juga berasal dari rumah tangga subsektor hortikultura sebesar 6,66% di tahun 2025.

Persentase penerimaan kredit PNM-Mekaar oleh rumah tangga buruh tani tahun 2024-2025 di wilayah Jawa dan Luar Jawa terbanyak dari subsektor hortikultura yaitu sebesar 12,07% dan 14,74% di tahun 2025. Secara nasional, persentase rumah tangga berusaha di pertanian dan rumah tangga buruh tani terbanyak dari subsektor hortikultura sebesar 6,02% di tahun 2024 dan 12,73% di tahun 2025. Rincian persentase rumah tangga yang menerima kredit PNM-Mekaar per subsektor di Jawa dan Luar Jawa, 2024 bisa dilihat pada Tabel 3.5.8.

Tabel 3.5.8. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusaha di Pertanian dan Buruh Tani yang Menerima Kredit PNM-Mekaar menurut Wilayah, 2024 – 2025

(%)

No.	Sub Sektor	Rumah tangga berusaha di pertanian			Rumah tangga buruh tani		
		Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
2024							
1	Tanaman Pangan	3,73	4,63	4,14	8,03	9,92	8,47
2	Hortikultura	5,99	6,07	6,02	11,63	9,89	11,29
3	Perkebunan	5,45	4,83	4,89	7,24	7,11	7,12
4	Peternakan	5,06	5,97	5,32	7,43	4,78	6,66
2025							
1	Tanaman Pangan	3,43	5,22	4,24	8,55	11,17	9,17
2	Hortikultura	4,65	6,66	5,56	12,07	14,74	12,73
3	Perkebunan	3,06	5,91	5,66	11,65	7,78	8,32
4	Peternakan	5,46	6,39	5,76	8,50	7,91	8,33
Pertumbuhan 2024-2025 (%)							
1	Tanaman Pangan	-8,14	12,78	2,47	6,39	12,60	8,21
2	Hortikultura	-22,31	9,68	-7,65	3,77	48,98	12,78
3	Perkebunan	-43,91	22,39	15,62	61,00	9,48	16,83
4	Peternakan	8,01	7,10	8,38	14,28	65,54	25,08

Sumber: SUSENAS Maret - BPS, diolah Pusdatin

Merujuk pada Tabel 3.5.8 tersebut, rata-rata pertumbuhan rumah tangga berusaha di pertanian yang melakukan kredit PNM-Mekaar untuk wilayah Jawa, yang mengalami kenaikan hanya subsektor peternakan sebesar 8,01%, sedangkan untuk wilayah Luar Jawa yang mengalami kenaikan tertinggi yakni subsektor perkebunan sebesar 22,39%. Untuk

rumah tangga buruh tani di wilayah Jawa pertumbuhan terbesar terjadi pada subsektor perkebunan sebesar 61,00% sedangkan di wilayah luar jawa pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor peternakan sebesar 65,54%.

Usia Perkawinan Pertama

Rata-rata umur perkawinan pertama perempuan berumur 10 tahun ke atas pada semua jenis rumah tangga di Indonesia pada tahun 2023-2025 berkisar antara usia 19-21 tahun. Tahun 2025 usia perkawinan pertama perempuan pada rumah tangga berusaha di pertanian di luar Jawa lebih tua dibanding usia perkawinan pertama di pulau Jawa, yaitu usia 20,800 tahun di luar Jawa sedangkan di Jawa usia 19,24 tahun (Tabel. 3.5.9).

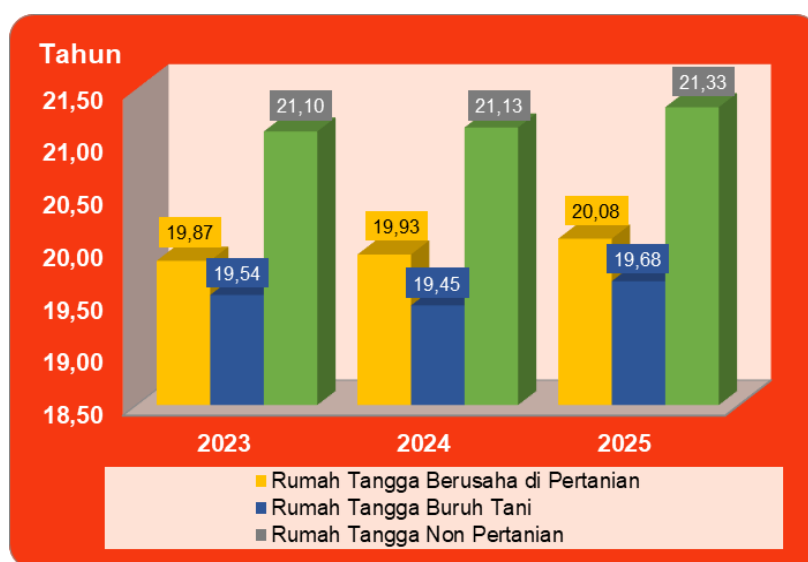
Tabel 3.5.9. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Berstatus Kawin/Cerai, 2023-2025

												(Tahun)
Wilayah	Rumah Tangga Berusaha di Pertanian			Pertumb. 2025 thd	Rumah Tangga Buruh Tani			Pertumb. 2025 thd	Rumah Tangga Non Pertanian			Pertumb. 2025 thd
	2023	2024	2025	2024 (%)	2023	2024	2025	2024 (%)	2023	2024	2025	2024 (%)
Jawa	19,00	19,10	19,24	0,77	18,99	18,88	19,00	0,65	20,78	20,84	21,04	0,95
Luar Jawa	20,65	20,70	20,80	0,49	20,27	20,18	20,49	1,56	21,65	21,64	21,83	0,87
Indonesia	19,87	19,93	20,08	0,75	19,54	19,45	19,68	1,18	21,10	21,13	21,33	0,91

Sumber : Susenas Maret - BPS

Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan berumur 10 tahun keatas di rumah tangga buruh tani lebih rendah dibandingkan Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan berumur 10 tahun keatas di rumah tangga buruh tani lebih rendah dibandingkan rumah tangga berusaha di pertanian dan rumah tangga non pertanian, yakni berusia sekitar 19,68 tahun dengan pertumbuhan tahun 2025 naik sebesar 1,18%. Kemudian pertumbuhan rata-rata usia perkawinan pertama perempuan pada rumah tangga berusaha di pertanian juga meningkat sebesar 0,75%. Begitu pula dengan rata-rata umur perkawinan pertama perempuan di rumah tangga non pertanian tahun 2025 yang naik naik sebesar 0,91% atau pada usia

21,33 tahun. Rumah tangga buruh tani umumnya berada pada kelompok ekonomi yang lebih rentan, dengan tingkat pendidikan relatif lebih rendah dan akses yang terbatas terhadap layanan pendidikan. Selain itu, pekerjaan buruh tani yang bersifat musiman dan tidak memerlukan tingkat keterampilan formal yang tinggi membuat dorongan untuk melanjutkan pendidikan menjadi lebih lemah. Sebaliknya, rumah tangga berusaha di pertanian yang memiliki aset lahan dan rumah tangga non pertanian yang umumnya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan lebih tinggi cenderung menunda usia perkawinan karena memiliki peluang kerja yang lebih beragam.



Gambar 3.5.4. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Berumur 10 Tahun ke atas yang Berstatus Kawin/Cerai, 2023 – 2025

. Tabel 3.5.10. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Berstatus Kawin/Cerai per Subsektor, 2023 - 2024

(Tahun)

Subsektor	2024			2025		
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
Rumah Tangga Berusaha di Pertanian						
Tanaman Pangan	19,12	20,90	19,89	19,26	21,03	20,03
Hortikultura	18,91	20,99	19,76	19,04	21,04	19,88
Perkebunan	19,12	20,38	20,25	19,08	20,50	20,36
Peternakan	19,16	20,83	19,61	19,39	20,84	19,85
Rumah Tangga Buruh Tani						
Tanaman Pangan	18,83	20,30	19,16	18,93	20,50	19,29
Hortikultura	18,87	20,07	19,11	18,90	20,82	19,35
Perkebunan	18,90	20,11	19,95	18,94	20,43	20,21
Peternakan	19,30	20,69	19,71	19,81	21,10	20,17

Sumber : Susenas Maret - BPS

Rata-rata umur perkawinan perempuan pada rumah tangga berusaha di pertanian di empat subsektor di Indonesia adalah usia 19-20 tahun. Rata-rata umur perkawinan perempuan pada subsektor perkebunan lebih tua dibandingkan subsektor lainnya yaitu umur rata-rata 20,36 tahun. Jika dibandingkan berdasarkan wilayahnya, maka umur perkawinan perempuan pada rumah tangga berusaha di pertanian yang ada di luar Jawa berkisar antara 20,50 sampai 21,04 tahun, lebih tua dibandingkan umur perkawinan perempuan di Jawa. Sedangkan rata-rata umur perkawinan perempuan pada rumah tangga buruh tani di empat subsektor pertanian tahun 2025 berkisar umur 19,29 sampai 20,21 tahun.

Pendidikan Tertinggi

Tingkat pendidikan penduduk berumur 5 tahun keatas di rumah tangga berusaha di pertanian dan rumah tangga buruh tani masih cukup rendah, selama tahun 2023-2025 persentase penduduk yang tidak sekolah dan tamat SD tiap tahunnya lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk di rumah tangga berusaha di pertanian lebih tinggi dibandingkan di rumah tangga buruh

tani. Tahun 2025 persentase penduduk yang tamat SD di rumah tangga berusaha di pertanian sebesar 29,82% turun dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 29,84%. Sedangkan penduduk di rumah tangga buruh tani yang tamat SD lebih banyak yaitu sebesar 32,35%. Walaupun persentase pendidikan penduduk yang sampai jenjang perguruan tinggi lebih kecil dibandingkan tingkat pendidikan lainnya, namun terjadi peningkatan persentase tahun 2025 dibandingkan 2024. Persentase penduduk di rumah tangga berusaha di pertanian yang tamat perguruan tinggi pada tahun 2025 sebesar 4,62% meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,44%. Kenaikan persentase penduduk yang tamat perguruan tinggi juga terjadi pada rumah tangga buruh tani, tahun 2025 persentasenya sebesar 2,09%. (Tabel 3.5.11)

Tabel 3.5.11. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas di Rumah Tangga Pertanian menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 2023-2025

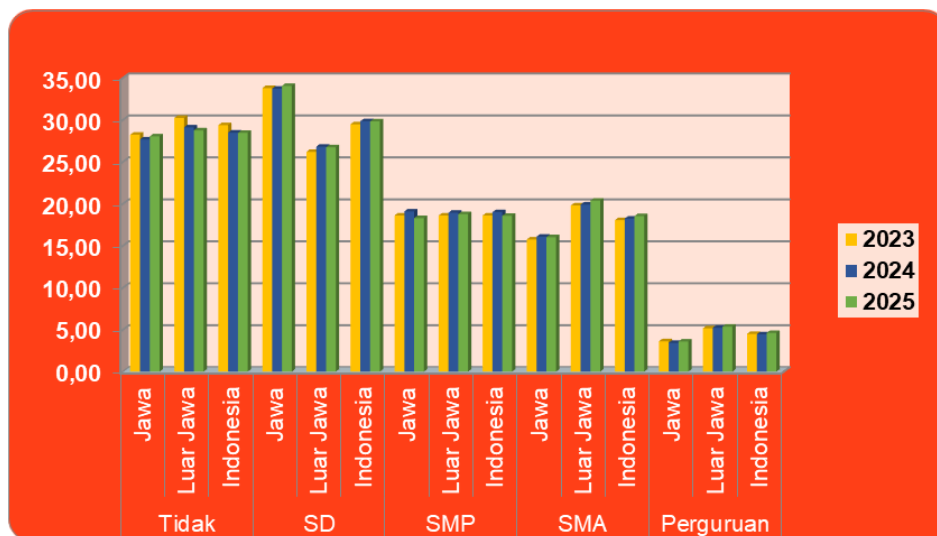
(%)

Wilayah	2023					2024					2025				
	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	PT	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	PT	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	PT
Rumah Tangga Berusaha di Pertanian															
Jawa	28,23	33,79	18,61	15,75	3,62	27,68	33,71	19,09	16,09	3,43	28,04	34,05	18,29	16,02	3,59
Luar Jawa	30,23	26,19	18,61	19,80	5,16	29,11	26,80	18,94	19,91	5,23	28,75	26,73	18,77	20,38	5,37
Indonesia	29,37	29,48	18,61	18,05	4,49	28,48	29,84	19,01	18,23	4,44	28,45	29,82	18,57	18,54	4,62
Rumah Tangga Buruh Tani															
Jawa	29,21	35,25	19,75	14,13	1,66	28,92	37,09	19,94	12,92	1,13	29,38	37,07	19,60	12,69	1,27
Luar Jawa	28,61	27,24	20,43	20,39	3,32	27,49	27,86	21,18	20,55	2,93	27,20	27,50	21,23	21,14	2,93
Indonesia	28,93	31,51	20,07	17,05	2,44	28,24	32,71	20,53	16,54	1,99	28,30	32,35	20,41	16,86	2,09

Sumber : Susenas Maret - BPS

Tingkat pendidikan penduduk di rumah tangga berusaha di pertanian dan rumah tangga buruh tani yang cenderung rendah ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial. Karakteristik pekerjaan pertanian yang secara umum tidak mensyaratkan tingkat pendidikan formal yang tinggi membuat kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan menjadi lemah. Rumah tangga berusaha di pertanian terutama yang berskala kecil dan rumah tangga buruh tani sering berada pada kelompok pendapatan rendah, sehingga keterbatasan ekonomi mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan hingga jenjang menengah tinggi. Selain itu,

struktur demografis petani Indonesia yang saat ini didominasi oleh kelompok usia tua juga sangat mempengaruhi. Generasi petani yang lebih tua tumbuh pada periode akses pendidikan masih terbatas dan pendidikan formal belum dipandang sebagai faktor penting untuk mobilitas ekonomi.



Gambar 3.5.5. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas di Rumah Tangga Pertanian Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, 2023 –2025

Pada rumah tangga berusaha di pertanian, persentase penduduk yang tamat SD di Jawa lebih besar dibandingkan di luar Jawa. Sedangkan persentase penduduk tamatan SMA dan perguruan tinggi lebih besar di luar Jawa dibanding di Jawa. Walaupun persentase penduduk yang tamat SMA dan perguruan tinggi pada rumah tangga berusaha di pertanian tidak sebanyak penduduk yang tamat SMP, SD maupun tidak sekolah, namun persentasenya meningkat setiap tahun dari 2023 sampai 2025.

Tabel 3.5.12. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan per subsektor Tahun 2025

(%)

Subsektor	Jawa					Luar Jawa					Indonesia				
	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	PT	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	PT	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	PT
Rumah Tangga Berusaha di Pertanian															
Tanaman Pangan	27,30	34,31	18,21	16,52	3,67	31,12	26,24	18,26	19,43	4,95	29,14	30,42	18,23	17,92	4,29
Hortikultura	27,35	35,90	19,01	14,56	3,18	27,35	24,31	19,21	23,48	5,64	27,35	30,47	19,10	18,75	4,33
Perkebunan	26,22	36,51	18,36	14,37	4,54	26,37	28,11	19,33	20,70	5,49	26,36	28,82	19,24	20,17	5,41
Peternakan	32,26	30,62	18,01	15,79	3,31	29,51	24,57	18,14	20,60	7,19	31,33	28,57	18,06	17,42	4,62
Rumah Tangga Buruh Tani															
Tanaman Pangan	30,44	37,25	19,20	12,20	0,91	27,39	29,28	22,84	18,24	2,26	29,66	35,22	20,13	13,74	1,26
Hortikultura	31,20	38,17	19,96	9,31	1,36	26,80	28,22	19,56	21,32	4,09	30,06	35,59	19,86	12,43	2,07
Perkebunan	27,26	38,74	19,64	12,69	1,67	27,44	27,13	20,85	21,68	2,91	27,41	28,58	20,70	20,55	2,75
Peternakan	20,89	32,43	22,06	21,20	3,41	22,36	22,07	19,93	29,63	6,01	21,32	29,39	21,44	23,68	4,17

Sumber : Susenas Maret - BPS

Tahun 2025 persentase penduduk yang tidak sekolah tertinggi pada rumah tangga berusaha di pertanian subsektor peternakan. Sedangkan penduduk yang tamat perguruan tinggi terbanyak terdapat pada subsektor perkebunan yaitu sebesar 5,41%. Sedangkan pada rumah tangga buruh tani, persentase penduduk yang tidak sekolah paling besar yaitu pada subsektor hortikultura sebesar 30,06%. Persentase penduduk yang tamat perguruan tinggi baik pada rumah tangga berusaha di pertanian maupun rumah tangga buruh tani di luar Jawa lebih besar dibandingkan di Jawa. Komposisi subsektor pertanian yang banyak di perkebunan di luar Jawa berkontribusi dalam meningkatkan capaian tingkat pendidikan rumah tangga berusaha di pertanian dan rumah tangga buruh tani dibandingkan di Jawa. Subsektor perkebunan seperti kepala sawit, karet, kopi dan kakao memiliki karakteristik usaha yang lebih terorganisasi, melibatkan perusahaan besar atau kebun rakyat dengan akses penyuluhan dan pelatihan yang memberikan dorongan lebih kuat terhadap peningkatan keterampilan dan pendidikan.

Tempat /Cara Berobat

Tabel 3.5.13. Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat/cara berobat, 2023-2025

(%)

Tempat/Cara Berobat	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Rumah Tangga Berusaha di Pertanian									
Rumah Sakit Pemerintah	5,83	6,90	7,51	8,18	8,83	9,25	7,01	7,82	8,34
Rumah Sakit Swasta	6,04	6,50	7,06	3,60	3,53	3,93	4,81	5,09	5,56
Praktik Dokter/Bidan	51,46	51,65	55,72	39,81	39,50	43,00	45,59	45,85	49,65
Klinik/Praktik Dokter Bersama	13,63	15,60	9,43	8,50	10,04	6,82	11,04	12,95	8,18
Puskesmas/Pustu	22,15	19,48	22,60	37,87	36,80	36,46	30,07	27,74	29,22
Tempat lainnya	8,64	5,99	4,51	9,38	8,73	8,76	9,01	7,30	6,54
Rumah Tangga Buruh Tani									
Rumah Sakit Pemerintah	4,98	5,23	5,02	6,97	7,34	7,10	5,83	6,08	5,86
Rumah Sakit Swasta	4,59	4,11	4,50	2,90	3,53	4,82	3,86	3,88	4,63
Praktik Dokter/Bidan	46,84	46,65	49,33	47,53	46,04	50,00	47,13	46,41	49,60
Klinik/Praktik Dokter Bersama	14,67	15,14	10,40	10,90	11,79	9,19	13,06	13,80	9,91
Puskesmas/Pustu	27,60	28,52	34,81	28,94	29,95	27,53	28,17	29,10	31,85
Tempat lainnya	6,06	6,00	5,24	8,93	7,24	7,70	7,28	6,50	6,24

Sumber : Susenas Maret - BPS

Keterangan: Tempat lainnya terdiri dari UKBM (poskesdes, polindes, posyandu, balai pengobatan), praktik pengobatan tradisional/alternatif dan lainnya

Facilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas/puspu dan praktik dokter/bidan merupakan layanan Kesehatan yang paling mudah dijangkau di wilayah perdesaan, baik dari segi lokasi maupun biaya. Sementara akses ke rumah sakit sering kali terbatas oleh jarak, transportasi dan biaya layanan. Hal ini dapat terlihat dari persentase penduduk di rumah tangga berusaha di pertanian yang ada di pulau Jawa lebih dari 50% memilih berobat jalan ke praktik dokter/bidan. Pada tahun 2025 mencapai 55,72% dan naik dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 51,65%. Selanjutnya sebesar 22,60% memilih berobat jalan ke puskesmas/puspu, naik dibandingkan tahun 2024. Hal sama juga terjadi di rumah tangga buruh tani, persentase penduduk yang memilih tempat berobat jalan di praktik dokter/bidan (49,33%) dan puskesmas/puspu (34,81%) tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Semakin meningkatnya persentase yang berobat jalan di kedua tempat tersebut, menyebabkan penurunan persentase yang berobat ke klinik/praktik dokter bersama. Persentase penduduk di pulau Jawa pada tahun 2025 yang berobat ke rumah sakit pemerintah atau swasta juga meningkat. Begitu

pula dengan penduduk di luar Jawa paling banyak berobat ke praktik dokter/bidan. Persentase rumah tangga berusaha di pertanian di luar Jawa yang berobat di praktik dokter/bidan sebesar 43,00% dan rumah tangga buruh tani sebesar 50,00%.

Secara umum pada tahun 2025, penduduk Indonesia yang ada pada rumah tangga berusaha di pertanian dan rumah tangga buruh tani paling banyak berobat ke praktik dokter/bidan dengan persentase yang meningkat dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Persentase penduduk Indonesia di rumah tangga berusaha di pertanian tahun 2025 yang berobat ke praktik dokter/bidan yaitu sebesar 49,65%. Kemudian penduduk Indonesia pada rumah tangga buruh tani sebesar 49,60%. Selanjutnya penduduk lebih memilih berobat ke puskesmas/puspu.

Tabel 3.5.14. Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat/cara berobat per subsektor tahun 2025

(%)

Tempat/Cara Berobat	Jawa				Luar Jawa				Indonesia			
	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak	TP	Horti	Bun	Nak
Rumah Tangga Berusaha di Pertanian												
Rumah Sakit Pemerintah	7,50	8,25	7,19	7,01	8,92	10,12	10,07	6,87	8,07	8,93	9,69	6,97
Rumah Sakit Swasta	7,45	6,46	7,76	5,74	3,13	5,11	4,40	5,17	5,73	5,97	4,84	5,55
Praktik Dokter/Bidan	54,28	59,17	57,88	58,03	39,92	44,00	45,88	47,08	48,56	53,63	47,44	54,35
Klinik/Praktik Dokter Bersama	9,99	9,97	9,49	6,67	5,87	4,90	7,89	9,48	8,35	8,12	8,10	7,61
Puskesmas/Pustu	23,49	19,61	19,84	22,37	41,69	36,57	30,42	32,35	30,74	25,80	29,04	25,73
Tempat lainnya	4,53	4,78	1,83	5,04	9,07	5,81	8,95	9,21	6,34	5,15	8,02	6,44
Rumah Tangga Buruh Tani												
Rumah Sakit Pemerintah	5,46	3,13	2,55	7,90	7,26	6,59	6,55	12,81	5,90	3,75	5,80	9,31
Rumah Sakit Swasta	4,38	4,34	3,80	6,37	4,05	11,41	4,36	7,66	4,30	5,61	4,25	6,74
Praktik Dokter/Bidan	47,88	56,25	57,01	38,85	46,30	60,03	51,64	42,67	47,49	56,93	52,64	39,94
Klinik/Praktik Dokter Bersama	9,33	10,53	8,12	20,27	4,90	7,58	11,12	13,91	8,25	10,00	10,56	18,45
Puskesmas/Pustu	37,28	25,80	34,29	34,47	38,15	19,78	22,76	27,69	37,49	24,72	24,92	32,53
Tempat lainnya	4,82	5,67	9,51	2,99	5,97	6,72	9,15	2,43	5,10	5,86	9,22	2,83

Sumber : Susenas Maret - BPS

Keterangan: (1) Tempat lainnya terdiri dari UKBM (poskesdes, polindes, posyandu, balai pengobatan), praktik pengobatan tradisional/alternatif dan lainnya

(2) TP = Tanaman Pangan, Horti = Hortikultura, Bun = Perkebunan, Nak = Peternakan

Penduduk pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang termasuk dalam rumah tangga berusaha di pertanian paling banyak memilih berobat ke praktik dokter/bidan. Persentase terbesar yaitu pada subsektor peternakan dengan persentase 54,35%. Pilihan tempat berobat terbanyak kedua adalah ke puskesmas/puspu dengan persentase sekitar 25,73% sampai 30,74%.

Preferensi pemilihan tempat berobat penduduk rumah tangga berusaha di pertanian pada subsektor tanaman pangan yang ada di Jawa berbeda dengan di luar Jawa. Jika di Jawa banyak yang memilih berobat di praktik dokter/bidan sedangkan di luar Jawa lebih memilih berobat di puskesmas/puspu. Sedangkan untuk subsektor lainnya baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, paling banyak memilih berobat di praktik dokter/bidan dengan persentase diatas 40%.

Pada rumah tangga buruh tani, penduduk di subsektor tanaman pangan, hortikultura perkebunan, dan peternakan juga lebih memilih berobat di praktik dokter/bidan, dengan besaran persentase masing-masing pada subsektor tersebut adalah: subsektor tanaman pangan 47,49%, hortikultura 56,93%, perkebunan 52,64%, dan peternakan 39,94%.

IV. KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PERTANIAN

4.1. *Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*

4.1. *Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda internasional yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai *stakeholder* dari seluruh penjuru dunia. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs/TPB dan menyelaraskan dengan pembangunan nasional.(BPS, 2021)

SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Kurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Bappenas, 2022).

Kementerian Pertanian berkaitan langsung dengan tujuan 2 SDGs yaitu menghilangkan kelaparan. Ketersediaan data indikator-indikator

SDGs sangat diperlukan demi kelancaran program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya data-data indikator-indikator SDGs maka perkembangan target-target SDGs dapat dimonitor serta kegiatan yang mendukung program pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dievaluasi (BPS, 2021). Untuk menjawab kebutuhan akan data di bidang pertanian serta untuk memenuhi kebutuhan data SDGs sektor pertanian, atas rekomendasi FAO BPS melaksanakan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI)/ *Agricultural Integrated Survey* (AGRIS). Rangkaian kegiatan SITASI BPS telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 di 3 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada tahun 2021 SITASI dilaksanakan dengan cakupan seluruh provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2023 BPS melaksanakan Sensus Pertanian (ST2023). ST2023 diinisiasi untuk mengakomodasi variabel yang diperlukan guna menyajikan data pertanian yang sangat dinamis. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat nasional dan internasional, serta dirancang agar hasilnya sesuai dengan standar internasional, mengacu pada program *Food and Agricultural Organization* (FAO) yang dikenal dengan *World Programme for the Census of Agriculture* (WCA) 2020. ST2023 juga diharapkan dapat menyajikan data yang dapat dibandingkan secara internasional. Salah satu *output* dari hasil ST2023 yaitu terpenuhinya data pertanian untuk agenda global misalnya indikator SDGs di sektor pertanian dan isu strategis yang ada di RPJMN.

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan menjadi tujuan kedua dalam SDGs. Di level nasional, terdapat 11 indikator yang telah berhasil disusun untuk menghitung capaian tujuan kedua SDGs tersebut. Di antara 11 indikator tersebut terdapat dua indikator SDGs yang dihasilkan dari ST2023, yaitu indikator : 2.3.1. Pendapatan Petani Skala Kecil dan Bukan Skala Kecil per Hari Kerja dan Indikator 5.a.1 kepemilikan atau Hak Atas Lahan Pertanian Pada Rumah Tangga Pertanian.

Menurut FAO, setidaknya terdapat 2 (dua) ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu unit usaha pertanian termasuk dalam kategori skala kecil atau bukan skala kecil. Ukuran pertama adalah ukuran fisik. Ukuran fisik dari unit usaha pertanian meliputi lahan pertanian yang dikelola serta ternak yang dipelihara. Lahan pertanian memberikan kontribusi, baik langsung maupun tak langsung, terhadap penyediaan makanan. Ukuran berikutnya adalah ukuran ekonomi dari unit usaha pertanian. Ukuran ekonomi yang digunakan adalah pendapatan atau nilai produksi dari unit usaha pertanian selama setahun. Dari kedua ukuran tersebut, baik fisik maupun ekonomi, ditentukan ambang batas 40 persen terbawah dari masing-masing distribusi luas lahan, jumlah ternak, serta pendapatan usaha pertanian selama setahun.

Berdasarkan hasil ST2023 dapat disimpulkan bahwa suatu unit usaha pertanian akan digolongkan sebagai petani skala kecil apabila menggarap lahan pertanian seluas 1,02 Ha atau kurang, atau memelihara ternak sebanyak 2TLU (setara dengan 2 ekor sapi) atau kurang, dan mampu menghasilkan pendapatan maksimal tidak lebih dari Rp 26,60 juta dalam setahun. Berdasarkan kriteria ukuran fisik dan ekonomi tersebut, dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 19,2 juta petani (68,10%) termasuk dalam kategori petani skala kecil dan hanya 8,9 juta petani (31,90%) yang termasuk dalam kategori bukan petani skala kecil seperti terlihat pada Gambar 4.1.1 dan Tabel 4.1.1.



Gambar 4.1.1. Persentase Petani di Indonesia Menurut Skala Usaha, 2023

Tabel 4.1.1. Jumlah dan Persentase Petani Skala Kecil serta Bukan Petani Skala Kecil Menurut Provinsi, 2023

No	Provinsi	Petani Skala Kecil		Bukan Petani Skala Kecil	
		Jumlah (unit)	(%)	Jumlah (unit)	(%)
1	Aceh	572.624	71,73	225.643	28,27
2	Sumatera Utara	933.903	63,58	534.904	36,42
3	Sumatera Barat	497.538	65,73	259.441	34,27
4	Riau	265.162	37,62	439.683	62,38
5	Jambi	215.968	38,71	341.910	61,29
6	Sumatera Selatan	531.904	45,82	628.834	54,18
7	Bengkulu	147.507	44,33	185.224	55,67
8	Lampung	807.279	60,21	533.448	39,79
9	Kepulauan Bangka Belitung	69.205	45,49	82.923	54,51
10	Kepulauan Riau	34.542	68,13	16.158	31,87
11	DKI Jakarta	7.352	84,91	1.307	15,09
12	Jawa Barat	2.639.310	83,50	521.403	16,50
13	Jawa Tengah	3.426.698	81,34	786.173	18,66
14	DI Yogyakarta	338.585	80,75	80.707	19,25
15	Jawa Timur	4.126.141	74,90	1.382.825	25,10
16	Banten	510.698	87,95	69.952	12,05
17	Bali	221.715	61,25	140.281	38,75
18	Nusa Tenggara Barat	456.828	61,51	285.810	38,49
19	Nusa Tenggara Timur	626.830	70,89	257.368	29,11
20	Kalimantan Barat	315.439	44,58	392.119	55,42
21	Kalimantan Tengah	132.385	45,94	155.800	54,06
22	Kalimantan Selatan	304.371	66,19	155.483	33,81
23	Kalimantan Timur	78.264	42,67	105.147	57,33
24	Kalimantan Utara	20.964	46,50	24.123	53,50
25	Sulawesi Utara	168.449	65,43	88.993	34,57
26	Sulawesi Tengah	231.406	53,84	198.364	46,16
27	Sulawesi Selatan	556.446	53,35	486.480	46,65
28	Sulawesi Tenggara	165.966	53,77	142.694	46,23
29	Gorontalo	66.719	47,86	72.700	52,14
30	Sulawesi Barat	108.176	56,22	84.243	43,78
31	Maluku	137.580	71,58	54.633	28,42
32	Maluku Utara	81.839	55,11	66.671	44,89
33	Papua Barat	33.065	71,79	12.996	28,21
34	Papua Barat Daya	20.012	75,04	6.655	24,96
35	Papua	45.758	70,19	19.432	29,81
36	Papua Selatan	30.547	65,04	16.419	34,96
37	Papua Tengah	151.397	75,66	48.701	24,34
38	Papua Pegunungan	130.572	59,05	90.552	40,95
Indonesia		19.209.144	68,10	8.996.199	31,90

Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2023

Tabel 4.1.1 juga menunjukkan bahwa hampir semua provinsi di Indonesia memiliki persentase petani skala kecil yang lebih banyak dibandingkan persentase bukan petani skala kecil. Terdapat 10 provinsi dengan persentase petani skala kecil yang lebih sedikit, antara lain adalah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Gorontalo.

Indikator SDGs 2.3.1 mengukur produktivitas petani skala kecil per hari kerja selama setahun. Agar dapat dibandingkan secara internasional, indikator SDGs 2.3.1 ini dinyatakan dalam US\$ PPP/ *Purchasing Power Parity* (1 US\$ PPP = Rp 5.239,05 per hari kerja). Hari kerja yang dimaksud adalah hari-hari dimana setiap unit usaha pertanian menjalankan kegiatan usaha pertaniannya. Indikator SDGs 2.3.1 dihitung dengan metodologi sebagai berikut :

$$\text{SDG 2.3.1} = \frac{\text{Output}}{\text{Input Tenaga Kerja}} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Hari Kerja dalam Setahun}}$$

Secara umum di tingkat nasional, pada tahun 2023 petani skala kecil di Indonesia mampu memperoleh pendapatan sebesar 8,50 US\$ PPP atau setara dengan Rp 44.507 per hari kerja. Sementara itu, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil mampu memperoleh pendapatan sebesar 368,34 US\$ PPP atau setara dengan Rp 1.929.764 per hari kerja (Gambar 4.1.2).



Gambar 4.1.2. Produktivitas Petani menurut Skala Usaha, 2023

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dari unit usaha skala kecil memiliki dampak positif bagi penurunan kemiskinan, mengingat sebagian besar dari petani skala kecil termasuk rumah tangga miskin. Di tingkat provinsi, terdapat tiga provinsi dengan nilai indikator SDGs 2.3.1 tertinggi pada petani skala kecil yaitu DKI Jakarta (20,43 US\$ PPP atau setara Rp 107.044 per hari kerja), Riau (17,57 US\$ PPP atau setara Rp 92.035 per hari kerja), dan Kalimantan Tengah (17,46 US\$ PPP atau setara Rp 91.472 per hari kerja). Sementara itu tiga provinsi dengan indikator SDGs 2.3.1 terendah pada petani skala kecil yaitu Provinsi Maluku Utara (12,41 US\$ PPP atau Rp 65.040 per hari kerja), Sumatera Selatan (12,33 US\$ PPP atau setara Rp 64.590 per hari kerja), dan Kalimantan Barat (8,96 US\$ PPP atau setara Rp 46.920 per hari kerja) seperti terlihat pada Tabel 4.1.2.

Sedangkan pada petani yang tidak termasuk skala kecil, terdapat tiga provinsi dengan nilai indikator SDGs 2.3.1 tertinggi yaitu Provinsi Papua (10.350,65 US\$ PPP atau setara Rp 54.227.574 per hari kerja), Papua Barat Daya (4.059,27 US\$ PPP atau Rp 21.266.705 per hari kerja), dan Papua Tengah (2.815,54 US\$ PPP atau setara Rp 14.750.734 per hari kerja).

Tabel 4.1.2. Indikator SDGs 2.3.1 Produktivitas Per Hari Kerja Petani Skala Kecil dan Bukan Petani Skala Kecil Menurut Provinsi, 2023

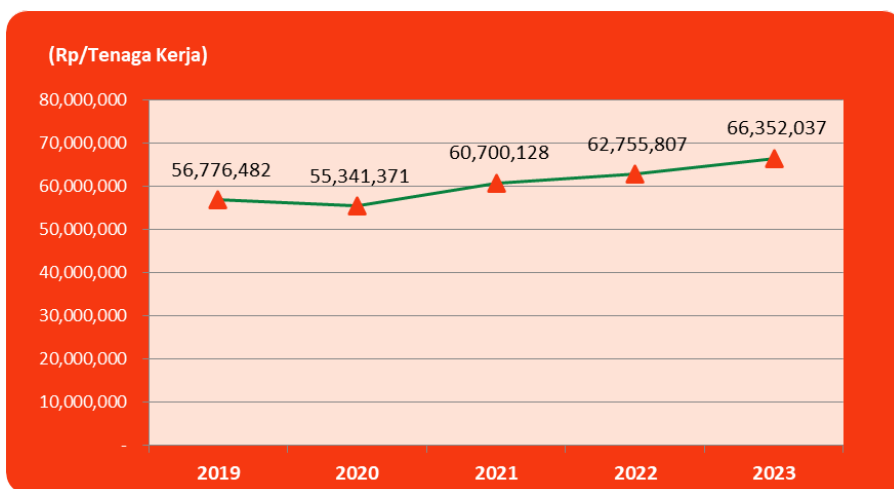
No	Provinsi	Indikator SDGs 2.3.1			
		Petani Skala Kecil		Bukan Petani Skala Kecil	
		dalam Rupiah	dalam US\$ PPP	dalam Rupiah	dalam US\$ PPP
1	Aceh	70.115	13,38	2.159.994	412,29
2	Sumatera Utara	62.575	11,94	2.660.712	507,86
3	Sumatera Barat	62.003	11,83	1.507.882	287,82
4	Riau	92.035	17,57	1.754.218	334,84
5	Jambi	72.074	13,76	1.597.070	304,84
6	Sumatera Selatan	64.590	12,33	871.648	166,38
7	Bengkulu	84.616	16,15	1.854.087	353,90
8	Lampung	49.922	9,53	1.490.685	284,53
9	Kepulauan Bangka Belitung	48.763	9,31	1.449.149	276,61
10	Kepulauan Riau	35.931	6,86	1.418.507	270,76
11	DKI Jakarta	107.044	20,43	9.951.747	1.899,53
12	Jawa Barat	41.169	7,86	1.579.894	301,56
13	Jawa Tengah	35.945	6,86	1.633.659	311,82
14	DI Yogyakarta	30.656	5,85	822.092	156,92
15	Jawa Timur	31.494	6,01	663.171	126,58
16	Banten	42.816	8,17	5.985.191	1.142,42
17	Bali	31.513	6,02	375.058	71,59
18	Nusa Tenggara Barat	51.907	9,91	489.041	93,35
19	Nusa Tenggara Timur	35.777	6,83	540.754	103,22
20	Kalimantan Barat	46.920	8,96	1.406.913	268,54
21	Kalimantan Tengah	91.472	17,46	3.335.989	636,75
22	Kalimantan Selatan	46.667	8,91	5.435.512	1.037,50
23	Kalimantan Timur	85.038	16,23	6.038.743	1.152,64
24	Kalimantan Utara	55.616	10,62	3.540.818	675,85
25	Sulawesi Utara	53.863	10,28	2.003.797	382,47
26	Sulawesi Tengah	42.926	8,19	7.051.848	1.346,02
27	Sulawesi Selatan	55.082	10,51	2.020.997	385,76
28	Sulawesi Tenggara	40.336	7,70	1.395.757	266,41
29	Gorontalo	49.518	9,45	533.980	101,92
30	Sulawesi Barat	49.784	9,50	2.111.119	402,96
31	Maluku	35.234	6,73	2.547.373	486,23
32	Maluku Utara	65.040	12,41	1.761.282	336,18
33	Papua Barat	47.278	9,02	2.010.336	383,72
34	Papua Barat Daya	54.014	10,31	21.266.705	4.059,27
35	Papua	49.086	9,37	54.227.574	10.350,65
36	Papua Selatan	43.492	8,30	13.494.554	2.575,76
37	Papua Tengah	58.467	11,16	14.750.734	2.815,54
38	Papua Pegunungan	50.704	9,68	284.399	54,28
Indonesia		44.507	8,50	1.929.764	368,34

Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2023

Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai indikator SDGs 2.3.1 termasuk nilai produksi selama satu tahun, jumlah hari kerja selama satu tahun, dan jenis komoditas pertanian yang diusahakan. Jika diasumsikan bahwa jumlah hari kerja selama satu tahun dan jenis komoditas pertanian yang diusahakan sama, maka semakin tinggi nilai produksi pertanian selama satu tahun akan menghasilkan nilai

indikator SDGs 2.3.1 yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika diasumsikan nilai produksi selama satu tahun dan jenis komoditas pertanian sama, semakin banyak jumlah hari kerja produksi dalam satu tahun akan menurunkan nilai indikator SDGs 2.3.1. Di sisi lain, jenis komoditas pertanian yang diusahakan sangat berkaitan dengan harga jual komoditas tersebut dan secara positif memengaruhi nilai produksi pertanian selama satu tahun.

Indikator SDGs 2.3.1.(a) nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/ petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang. Indikator nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/kehutanan di Indonesia mengacu pada hasil Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian (BPS) sebagaimana secara nasional dapat dilihat pada Gambar 4.1.3 dan secara rinci menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.1.3.



Gambar 4.1.3. Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja Menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/Peternakan/Perikanan/ Kehutanan, 2019-2023

Pada Gambar 4.1.3 terlihat bahwa nilai tambah pertanian per tenaga kerja secara nasional cenderung meningkat selama periode tahun 2019-2023, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun

2020 namun kembali meningkat pada tahun berikutnya. Pada tahun 2019 nilai tambah pertanian per tenaga kerja secara nasional sebesar Rp 56.776.482 menjadi Rp 66.352.037 per tenaga kerja pada tahun 2023. Pada tahun 2019 nilai tambah pertanian per tenaga kerja tertinggi terdapat pada Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp 159.684.833 per tenaga kerja, namun pada tahun selanjutnya selama periode tahun 2020-2023 nilai tambah pertanian per tenaga kerja tertinggi terdapat pada Provinsi Riau dengan nilai tambah pertanian tahun 2023 sebesar Rp 235.350.879 per tenaga kerja.

Sementara itu, nilai tambah pertanian terendah selama periode tahun 2019-2023 terdapat di Provinsi Papua. Pada tahun 2019 nilai tambah pertanian di Papua sebesar Rp 19.752.010 per tenaga kerja, mengalami peningkatan pada tahun 2020 namun kemudian cenderung terus menurun pada tahun berikutnya hingga menjadi Rp 17.412.788 per tenaga kerja pada tahun 2023.

Provinsi dengan pertumbuhan nilai tambah pertanian tertinggi selama tahun 2022-2023 adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan 20,96%. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp 76.396.727 per tenaga kerja, meningkat menjadi Rp 92.409.538 per tenaga kerja pada tahun 2023. Pertumbuhan terendah selama tahun 2022-2023 terjadi di Provinsi Papua sebesar -10,95%. Pada tahun 2022 nilai tambah pertanian per tenaga kerja di Provinsi Papua sebesar Rp 19.554.487, mengalami penurunan menjadi Rp 17.412.788 per tenaga kerja pada tahun 2023 (Tabel 4.1.3).

Tabel 4.1.3. Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja Menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/Peternakan/Perikanan/ Kehutanan, 2019-2023

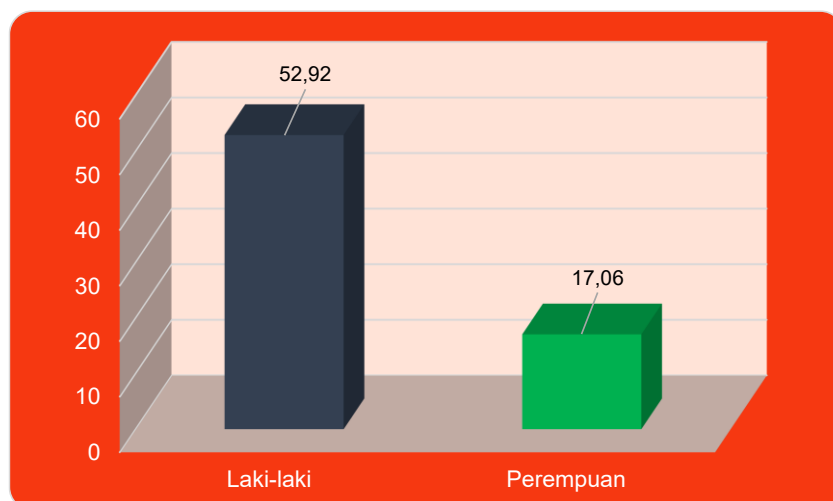
No	Provinsi	Nilai Tambah Pertanian Dibagi Jumlah Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian (Rp/Tenaga Kerja)					Pertumb. 2022-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Aceh	58.476.041	58.692.850	65.183.290	64.225.825	73.688.193	14,73
2	Sumatera Utara	65.883.233	71.399.202	75.608.129	88.019.559	96.896.334	10,09
3	Sumatera Barat	63.444.677	57.871.786	61.279.813	64.389.430	68.222.977	5,95
4	Riau	154.991.101	165.160.425	185.539.365	199.870.061	235.350.879	17,75
5	Jambi	78.268.309	78.880.562	91.346.177	96.923.669	114.799.869	18,44
6	Sumatera Selatan	35.645.547	36.935.389	38.628.180	38.739.831	41.893.250	8,14
7	Bengkulu	45.400.557	42.961.110	48.164.913	49.938.015	56.376.196	12,89
8	Lampung	60.430.497	54.946.581	57.057.297	60.299.268	61.626.263	2,20
9	Kepulauan Bangka Belitung	65.571.850	67.903.078	90.148.456	99.810.829	106.363.876	6,57
10	Kepulauan Riau	109.921.407	88.571.947	86.461.641	102.373.401	113.759.532	11,12
11	DKI Jakarta	95.408.352	83.074.739	72.446.102	99.345.461	106.087.810	6,79
12	Jawa Barat	63.388.237	52.424.691	53.840.414	57.926.741	61.515.409	6,20
13	Jawa Tengah	45.008.038	41.796.719	46.495.260	46.405.272	45.955.883	-0,97
14	DI Yogyakarta	31.942.484	32.839.862	35.959.246	41.060.676	43.977.578	7,10
15	Jawa Timur	40.496.540	39.532.353	42.284.443	44.843.331	45.595.346	1,68
16	Banten	62.737.336	56.656.856	63.574.707	65.661.036	70.355.142	7,15
17	Bali	73.198.088	62.021.072	65.020.413	69.409.278	76.004.137	9,50
18	Nusa Tenggara Barat	39.324.374	34.673.641	36.850.522	35.719.129	38.122.544	6,73
19	Nusa Tenggara Timur	23.520.940	21.650.180	22.857.041	24.418.856	26.510.375	8,57
20	Kalimantan Barat	35.620.192	36.949.977	41.881.655	43.634.497	43.309.514	-0,74
21	Kalimantan Tengah	59.040.664	65.600.023	74.393.415	76.396.727	92.409.538	20,96
22	Kalimantan Selatan	41.207.390	37.133.903	39.959.087	42.296.245	49.982.148	18,17
23	Kalimantan Timur	159.684.833	154.191.705	164.941.699	185.990.703	190.742.067	2,55
24	Kalimantan Utara	153.748.725	160.272.315	175.583.697	165.546.301	170.104.697	2,75
25	Sulawesi Utara	81.806.695	84.330.002	106.417.958	116.465.173	123.161.766	5,75
26	Sulawesi Tengah	70.864.028	65.727.944	73.883.027	74.253.847	87.184.754	17,41
27	Sulawesi Selatan	73.094.626	68.677.992	78.886.358	79.840.148	87.928.707	10,13
28	Sulawesi Tenggara	69.038.358	66.389.333	74.423.893	84.265.429	97.368.042	15,55
29	Gorontalo	89.919.294	88.765.761	98.222.904	88.461.849	103.082.643	16,53
30	Sulawesi Barat	62.224.227	59.066.732	68.363.267	64.986.586	73.032.494	12,38
31	Maluku	40.554.135	42.129.664	43.157.494	46.640.698	51.741.443	10,94
32	Maluku Utara	37.101.243	37.763.454	57.138.176	60.965.458	67.615.538	10,91
33	Papua Barat	65.668.506	60.919.528	59.081.780	50.608.064	47.959.481	-5,23
34	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
35	Papua	19.752.010	21.606.160	19.837.607	19.554.487	17.412.788	-10,95
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
38	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
Indonesia		56.776.482	55.341.371	60.719.102	62.755.807	66.352.037	5,73

Sumber : Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian BPS

Indikator 5.a.1 secara umum bertujuan untuk mengukur prevalensi kepemilikan atau hak atas lahan pertanian pada rumah tangga pertanian. Indikator 5.a.1 dihitung melalui konsep “Hak yang aman atas lahan pertanian”. Dalam hal ini, hak yang diukur menggunakan tiga variabel proksi yaitu kepemilikan atas dokumen yang sah, adanya hak untuk

menjual lahan pertanian, dan adanya hak untuk mewariskan lahan pertanian. Ketiga variabel tersebut adalah variabel proksi untuk mengukur hak yang aman atas lahan pertanian. Minimal satu dari ketiga kriteria sudah ada, sudah dianggap cukup untuk mendefinisikan seseorang sebagai pemilik atau pengelola dan memiliki hak kepemilikan atas lahan pertanian.

Hasil dari ST2023 menunjukkan adanya disparitas yang tinggi dalam kepemilikan lahan pertanian yang aman antara laki-laki dan perempuan seperti terlihat pada Gambar 4.1.4. Indikator 5.a.1.(a) pada laki-laki menunjukkan bahwa sekitar 52,92 persen atau lebih dari setengah dari total penduduk laki-laki dewasa di rumah tangga pertanian memiliki hak yang aman atas lahan pertanian. Namun, pada perempuan, indikator 5.a.1.(a) menunjukkan bahwa hanya sekitar 17,06 persen dari total penduduk perempuan dewasa di sektor pertanian yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian. Atau dapat dikatakan bahwa dari seratus perempuan dewasa, hanya sekitar 17 perempuan yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian.



Gambar 4.1.4. Kepemilikan Lahan Pertanian yang Aman antara Laki-Laki dan Perempuan, 2023

Tabel 4.1.4. Indikator 5.a.1. Kepemilikan Hak yang Aman Atas Lahan Pertanian Menurut Provinsi, 2023

No	Provinsi	Indikator 5.a.1.(a) Laki-Laki	Indikator 5.a.1.(a) Perempuan	Indikator 5.a.1.(b)
1	Aceh	46,35	14,47	24,02
2	Sumatera Utara	51,41	15,45	23,65
3	Sumatera Barat	27,08	30,70	53,85
4	Riau	62,25	13,62	17,45
5	Jambi	65,49	15,82	18,82
6	Sumatera Selatan	59,10	12,08	16,25
7	Bengkulu	60,72	14,45	18,42
8	Lampung	59,61	11,40	15,20
9	Kepulauan Bangka Belitung	50,81	10,24	15,43
10	Kepulauan Riau	44,53	12,56	20,85
11	DKI Jakarta	21,74	4,96	16,01
12	Jawa Barat	49,30	16,07	23,17
13	Jawa Tengah	51,81	20,34	27,54
14	DI Yogyakarta	48,29	24,37	33,62
15	Jawa Timur	55,26	19,27	25,85
16	Banten	41,92	11,88	20,41
17	Bali	45,55	4,54	8,91
18	Nusa Tenggara Barat	51,55	11,66	18,71
19	Nusa Tenggara Timur	55,67	15,19	22,49
20	Kalimantan Barat	61,63	17,86	21,39
21	Kalimantan Tengah	64,12	19,24	21,84
22	Kalimantan Selatan	51,33	18,28	25,51
23	Kalimantan Timur	57,48	12,17	16,05
24	Kalimantan Utara	52,76	13,52	18,60
25	Sulawesi Utara	48,17	12,74	19,68
26	Sulawesi Tengah	59,65	12,22	16,11
27	Sulawesi Selatan	49,58	21,61	30,82
28	Sulawesi Tenggara	57,36	15,81	21,66
29	Gorontalo	39,98	6,66	13,52
30	Sulawesi Barat	54,40	17,49	23,98
31	Maluku	49,02	12,12	19,62
32	Maluku Utara	59,87	14,24	18,81
33	Papua Barat	47,79	14,94	23,46
34	Papua Barat Daya	38,86	15,51	27,95
35	Papua	46,43	12,38	19,95
36	Papua Selatan	43,33	15,21	24,71
37	Papua Tengah	58,26	11,31	14,65
38	Papua Pegunungan	64,18	21,91	23,51
	Indonesia	52,92	17,06	23,90

Sumber : BPS, Sensus Pertanian 2023

Sementara itu Tabel 4.1.4 menunjukkan bahwa hanya 23,90% penduduk perempuan dewasa di sektor pertanian yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian, dari total penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian. Dapat disimpulkan bahwa penduduk dewasa yang memiliki hak aman atas lahan pertanian didominasi oleh laki-laki dengan persentase 76,10%.

Pada tingkat provinsi juga menunjukkan bahwa terjadi disparitas yang tinggi dalam kepemilikan lahan pertanian yang aman antara laki-laki

dan perempuan di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali di Provinsi Sumatera Barat. Sekitar 27,08% penduduk laki-laki dewasa di rumah tangga pertanian di Provinsi Sumatera Barat memiliki hak yang aman atas lahan pertanian, sementara penduduk perempuan dewasa yang memiliki hak aman atas lahan pertanian di Sumatera Barat sebesar 30,70%. Persentase kepemilikan lahan yang lebih besar pada penduduk perempuan di Sumatera Barat ini dapat dikarenakan budaya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang masih kental dengan sistem kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan, pewarisan harta, dan kepemimpinan dihitung berdasarkan garis ibu.

Tahun 2024 BPS melaksanakan Survei Ekonomi Pertanian Tahun 2024 (SEP 2024) yang merupakan rangkaian dari kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023). Survei Ekonomi Pertanian (SEP) merupakan salah satu survei lanjutan setelah dilakukan pencacahan lengkap ST2023 yang diharapkan dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan rekomendasi dari *The Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO). Sebagai bagian dari upaya global dalam mencapai pertanian yang berkelanjutan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menetapkan berbagai indikator untuk memonitor kemajuan sektor pertanian. Tujuan 2 yaitu "Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan", SEP 2024 menghasilkan indikator utama yang menjadi tolak ukur pencapaian, di antaranya indikator 2.3.2 dan indikator 2.4.1. Indikator SDGs 2.3.2 akan dibahas pada subbab 4.3.

Indikator SDGs 2.4.1 mengukur proporsi lahan pertanian yang dikelola secara berkelanjutan. Aspek ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam praktik pertanian, seperti penggunaan sumber daya yang efisien, keberlanjutan ekosistem, serta kesejahteraan petani dan komunitas lokal. Keberlanjutan dalam sektor pertanian menjadi semakin krusial mengingat tekanan perubahan iklim, degradasi lahan,

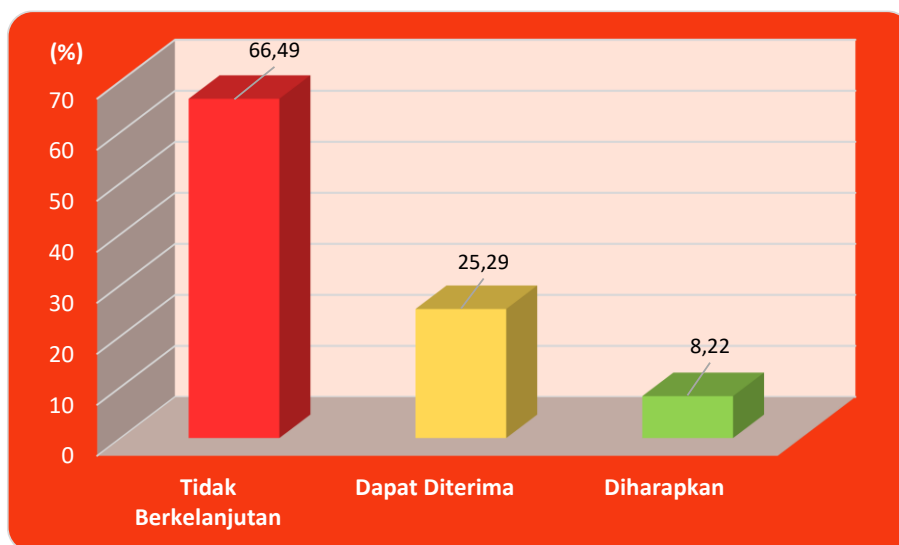
serta meningkatnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan populasi global.

Dalam konteks SGD, konsep lahan pertanian berkelanjutan tercermin dalam indikator SDGs 2.4.1., yang mengukur proporsi lahan pertanian yang dikelola dengan praktik yang memenuhi kriteria keberlanjutan. Indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan sumber daya, penerapan teknik konservasi tanah, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Indikator 2.4.1 didefinisikan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{SDG 2.4.1} = \frac{\text{Luas lahan pertanian produktif dan berkelanjutan}}{\text{Luas lahan pertanian}}$$

Indikator 2.4.1 terdiri dari beberapa subindikator, salah satunya yang berkaitan dengan produktivitas lahan pertanian adalah subindikator nilai produksi pertanian per hektar. Subindikator ini mengukur total luas lahan pertanian (yang mengusahakan tanaman dan/ atau ternak) berdasarkan nilai output per hektar. Subindikator ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat kriteria keberlanjutan yaitu :

- Hijau (diharapkan): Nilai produktivitas usaha pertanian $\geq 2/3$ dari persentil ke-90 yang sesuai.
- Kuning (dapat diterima): Nilai produktivitas usaha pertanian $\geq 1/3$ dan $< 2/3$ dari persentil ke-90 yang sesuai.
- Merah (tidak berkelanjutan): Dalam semua kasus lainnya, yaitu nilai produktivitas usaha pertanian $< 1/3$ dari persentil ke-90 yang sesuai.



Gambar 4.1.5. Persentase Lahan Pertanian Berkelanjutan pada Subindikator Nilai Produksi per Hektar di Indonesia, 2024

Gambar 4.1.5 menunjukkan subindikator nilai produksi pertanian per hektar secara nasional, sebanyak 66,49% lahan pertanian di Indonesia dikategorikan sebagai tidak berkelanjutan. Hal ini berarti nilai produktivitas lahan pertanian masih cukup rendah, yaitu kurang dari sepertiga dari nilai produktivitas tertinggi (persentil ke-90) dari seluruh lahan pertanian di Indonesia.

Sementara itu, Tabel 4.1.5 menunjukkan bahwa menurut distribusi wilayah, terdapat dua provinsi dengan persentase tertinggi lahan tidak berkelanjutan menurut nilai produktivitasnya yaitu Provinsi Maluku Utara sebesar 94,23% dan Provinsi Gorontalo sebesar 90,05%. Tingginya persentase lahan pertanian tidak berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara dan Gorontalo, karena adanya penurunan luas lahan sawah akibat alih fungsi lahan dan kendala produktivitas seperti keterbatasan irigasi serta tanaman yang menua. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah lahan tidak berkelanjutan menurut nilai produktivitasnya yaitu Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,45%. Hal ini tidak secara langsung dapat diartikan bahwa produktivitas lahan pertanian di Papua Pegunungan masih cukup tinggi, karena meskipun provinsi ini memiliki potensi besar dengan

lahan yang luas, namun kenyataannya, produktivitas per hektar masih menghadapi berbagai tantangan dan memerlukan peningkatan.

Tabel 4.1.5. Persentase Lahan Pertanian Berkelanjutan pada Subindikator Nilai Produksi per Hektar Menurut Provinsi di Indonesia, 2024

No	Provinsi	Kondisi Lahan		
		Tidak Berkelanjutan	Dapat Diterima	Diharapkan
1	Aceh	72,50	22,57	4,94
2	Sumatera Utara	61,18	30,24	8,58
3	Sumatera Barat	71,63	22,08	6,29
4	Riau	67,90	26,80	5,30
5	Jambi	87,28	11,54	1,18
6	Sumatera Selatan	70,67	14,77	14,57
7	Bengkulu	72,63	25,19	2,18
8	Lampung	72,64	23,94	3,42
9	Kepulauan Bangka Belitung	64,54	26,57	8,89
10	Kepulauan Riau	78,35	11,44	10,21
11	DKI Jakarta	55,44	27,01	17,55
12	Jawa Barat	52,17	31,97	15,86
13	Jawa Tengah	51,93	31,30	16,78
14	DI Yogyakarta	69,19	20,46	10,34
15	Jawa Timur	57,02	27,73	15,25
16	Banten	60,31	36,00	3,69
17	Bali	42,00	35,69	22,31
18	Nusa Tenggara Barat	72,66	20,63	6,71
19	Nusa Tenggara Timur	77,20	16,32	6,48
20	Kalimantan Barat	83,64	14,15	2,21
21	Kalimantan Tengah	48,18	38,46	13,36
22	Kalimantan Selatan	84,78	14,41	0,81
23	Kalimantan Timur	65,43	28,64	5,93
24	Kalimantan Utara	61,37	36,67	1,96
25	Sulawesi Utara	85,68	9,59	4,73
26	Sulawesi Tengah	78,73	15,72	5,55
27	Sulawesi Selatan	67,59	26,31	6,11
28	Sulawesi Tenggara	82,70	12,72	4,58
29	Gorontalo	90,05	8,64	1,31
30	Sulawesi Barat	63,45	28,34	8,21
31	Maluku	79,05	13,51	7,44
32	Maluku Utara	94,23	3,99	1,78
33	Papua Barat	70,43	29,31	0,25
34	Papua Barat Daya	46,83	5,07	48,10
35	Papua	61,39	37,21	1,40
36	Papua Selatan	37,52	44,09	18,39
37	Papua Tengah	20,52	59,72	19,76
38	Papua Pegunungan	0,45	0,28	99,27
	Indonesia	66,49	25,29	8,22

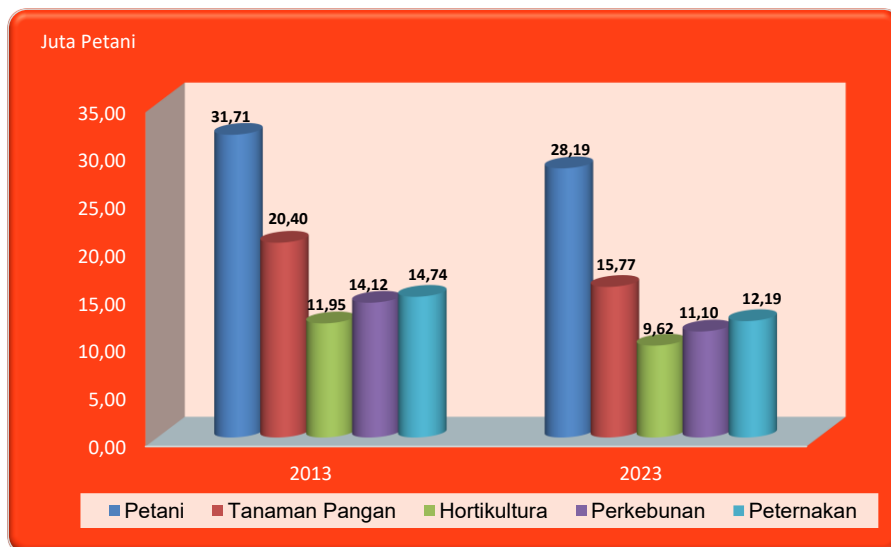
Sumber : BPS - Hasil Survei Ekonomi Pertanian 2024

4.2. Kesejahteraan Petani dengan Pendekatan SDGs Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan Indonesia dengan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian dengan potensi yang dimilikinya menjadi salah satu sektor yang strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia masih bergantung pada pertanian sebagai sumber mata pencaharian utamanya.

Sektor pertanian memiliki dampak ganda sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain memberikan kontribusi langsung terhadap nilai tambah ekonomi melalui produksi pertanian, sektor ini juga menjadi sumber daya manusia dan pasar bagi sektor-sektor lain seperti industri pengolahan makanan, agribisnis, dan agroindustri. Penerapan teknologi modern dan praktik pertanian yang berkelanjutan, sektor pertanian Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Diversifikasi produk pertanian dan pengembangan agribisnis juga membuka peluang baru untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.

Petani sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian, harus menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat kesejahteraan petani menjadi hal penting untuk ditingkatkan guna memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu dari visi dan misi pembangunan pertanian dalam mencapai swasembada pangan. Untuk itu diperlukan data dukung yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan petani secara menyeluruh.



Gambar 4.2.1. Jumlah Petani Total dan Per Sub Sektor Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023



Gambar 4.2.2. Jumlah Petani Total, Pengguna Lahan dan Gurem Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST 2023) jumlah petani turun dari ST 2013 yang sebelumnya 31,71 juta orang menjadi 28,19 juta di ST 2023. Petani di sini adalah Usaha Pertanian Perorangan

(UTP) yang hanya berusaha pada sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Menurut sub sektor, petani tanaman pangan adalah yang paling banyak dibandingkan sub sektor lain yaitu 15,77 juta unit. Selain itu, subsektor berikutnya yang banyak diusahakan berturut-turut adalah peternakan, perkebunan, dan hortikultura masing-masing 12,190 juta, 11,10 juta, dan 9,62 juta (Gambar 4.2.1).

Jika dilihat berdasarkan kepemilikan lahan, petani yang kepemilikan lahannya di bawah 0,5 hektar atau disebut juga petani gurem ada 17,25 juta orang atau naik cukup signifikan dari hasil ST 2013 sebesar 7,34 juta. Kenaikan jumlah ini seiring dengan kenaikan jumlah petani pengguna lahan menjadi 27,8 juta di tahun 2023 dari 24,36 juta di tahun 2013. Bisa diperkirakan bahwa kenaikan jumlah petani pengguna lahan ini didominasi oleh petani gurem atau petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar (Gambar 4.2.2). Sesuai dengan rekomendasi FAO, ST 2023 juga diharapkan menghasilkan data yang dapat dibandingkan secara internasional. Pada bahasan di subbab 4.1 telah dijelaskan mengenai petani skala kecil yang berbeda konsep dan definisinya dengan petani kecil yang selama ini menggunakan pendekatan petani gurem.

Indikator kesejahteraan yang digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan sektor pertanian dari SDGs dapat dibagi dalam dimensi ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Salah satu persyaratan suatu indikator SDGs dapat dijadikan indikator kesejahteraan petani adalah indikator tersebut tersedia datanya dan dapat dilakukan disagregasi untuk sektor pertanian. Bahkan jika memungkinkan dapat dilakukan disagregasi untuk 4 sub sektor pertanian. Data SDGs pertanian yang dapat diolah dengan data Susenas adalah seperti pada Tabel 4.2.1 berikut.

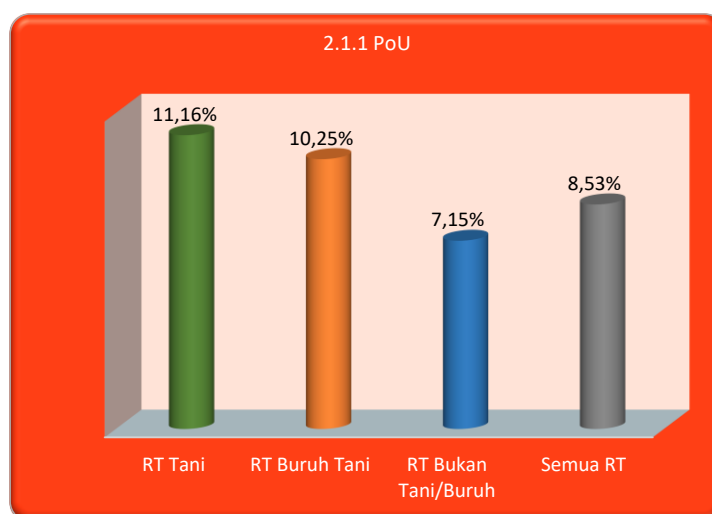
Tabel 4.2.1. Indikator SDGs Pertanian Tahun 2025 (dalam persen)

SDGs	RT Tani	RT Buruh Tani	RT Bukan Tani/Buruh	Semua RT
Ketahanan Pangan				
2.1.1* - Prevalence of Undernourishment (PoU),	11,16	10,25	7,15	8,53
Kesehatan				
3.1.2* (a) - Proporsi perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang penolong kelahiran terakhir adalah tenaga kesehatan,	95,31	97,30	97,99	97,35
3.8.1 (a) - Proporsi penduduk yang sakit dan tidak berobat jalan	6,18	6,03	4,91	5,32
3.a.1* - Proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang merokok tembakau	31,41	34,87	26,82	28,68
Pendidikan				
4.1.2* (a) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	96,25	96,87	98,27	97,65
4.1.2* (b) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/ sederajat	87,87	87,25	93,30	91,46
4.1.2* (c) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat	63,84	61,65	78,91	74,00
Standar Hidup Layak				
6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum layak	87,69	89,86	95,73	93,22
6.2.1* (a) - Proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	76,35	76,49	84,22	81,60
6.2.1* (b) - Proporsi rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	81,71	79,82	87,42	85,37
7.1.2 (b) - Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar gas untuk memasak	80,10	89,98	93,35	89,71
11.1.1 (a) - Proporsi rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni	66,84	63,00	69,63	68,40
16.9.1 * - Proporsi anak berumur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	82,09	82,72	88,60	86,76

Pada dimensi ketahanan pangan, RT tani masih tertinggal dibandingkan RT bukan tani, dimana nilai PoU-nya (11,16%) lebih tinggi dibandingkan RT bukan tani/buruh (7,15%) yang dihitung dari data Susenas. Hal ini dapat diasumsikan bahwa RT tani sebagai rumah tangga produsen justru lebih rentan terhadap kekurangan pangan. Sementara itu PoU Nasional tahun 2023 adalah 8,53% (Gambar 4.2.3).

Secara teori, terlepas dari kelemahan PoU sebagai pengukur ketahanan pangan, sebuah RT produsen yang menghasilkan komoditas pangan seharusnya lebih tahan terhadap kekurangan pangan. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan rumah tangga petani sebagai produsen menjadi lebih rentan rawan pangan dibandingkan rumah tangga umum. Faktor penyebab ini diantaranya adalah karena ketergantungan pada musim dan hasil panen. Petani sangat bergantung pada hasil panen, yang dapat berfluktuasi karena faktor seperti cuaca ekstrem, serangan

hama, atau penyakit tanaman. Ketika panen gagal, pendapatan menurun, dan akses ke makanan juga berkurang. Ketidakpastian musim juga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pasokan makanan, terutama bagi petani kecil yang tidak memiliki cadangan pangan atau sumber pendapatan alternatif.



Gambar 4.2.3. Nilai PoU Tahun 2023

Faktor lainnya adalah karena pendapatan petani yang rendah dan tidak stabil. Meskipun petani sebagai produsen menghasilkan pangan atau makanan, banyak di antaranya adalah petani kecil subsisten yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri atau bahkan kurang dari itu. Sementara itu harga hasil pertanian sering kali dikendalikan oleh tengkulak atau pasar, sehingga keuntungan yang mereka peroleh tidak cukup untuk membeli makanan tambahan yang bergizi.

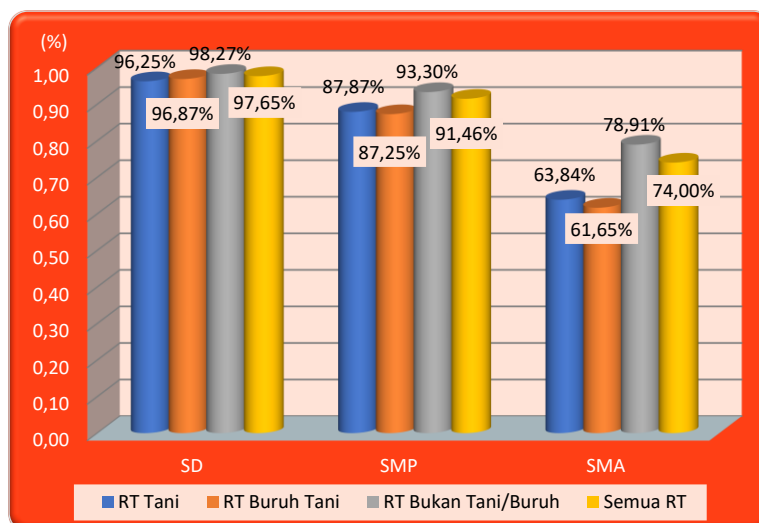
Banyak rumah tangga petani mengonsumsi hasil panen mereka sendiri, yang seringkali tidak mencukupi secara nutrisi. Misalnya, mereka mungkin hanya memproduksi karbohidrat (seperti padi atau jagung) tanpa cukup sumber protein, lemak, atau mikronutrien. Minimnya diversifikasi tanaman membuat pola makan menjadi monoton dan berisiko mengalami kekurangan gizi.

Pada dimensi kesehatan dan pendidikan, RT tani juga masih tertinggal dibandingkan RT bukan tani/buruh. Namun ketertinggalan ini relatif lebih kecil dibandingkan dimensi lainnya. Proporsi RT tani yang sakit dan tidak berobat relatif kecil yaitu 6,18% sementara di RT bukan tani/buruh sebesar 6,03%. Sementara proporsi terendah penduduk di atas 15 tahun yang merokok tembakau adalah RT bukan tani/buruh berada pada 26,68%. Sementara pada RT tani sebesar 31,41% bahkan pada RT buruh tani mencapai 34,87% (Gambar 4.2.4).



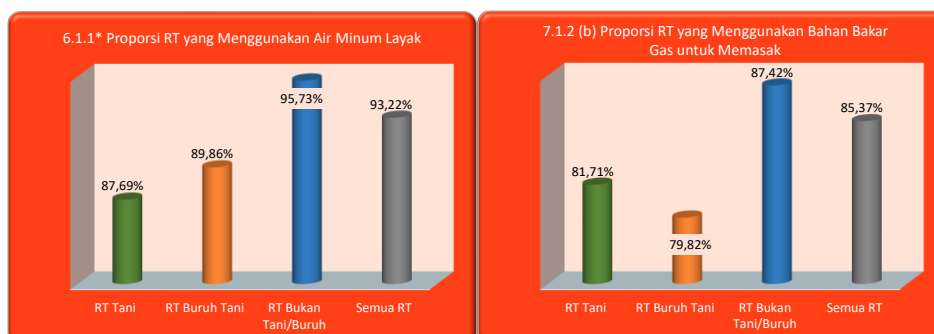
Gambar 4.2.4. Proporsi Penduduk yang Sakit dan Tidak Berobat serta Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok, Tahun 2025

Pada dimensi pendidikan, secara umum ketertinggalan RT tani maupun buruh tani terlihat tidak signifikan dibandingkan RT bukan tani/buruh maupun rata-rata secara nasional untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Namun untuk jenjang pendidikan SMA cukup terlihat perbedaan proporsinya. RT tani yang menamatkan jenjang SMA hanya 63,84% sementara di RT umum sekitar 78,91%. Secara umum terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, proporsi tingkat penyelesaiannya semakin rendah. Proporsi jenjang SMA terlihat lebih rendah dibandingkan jenjang SD dan SMP (Gambar 4.2.5).

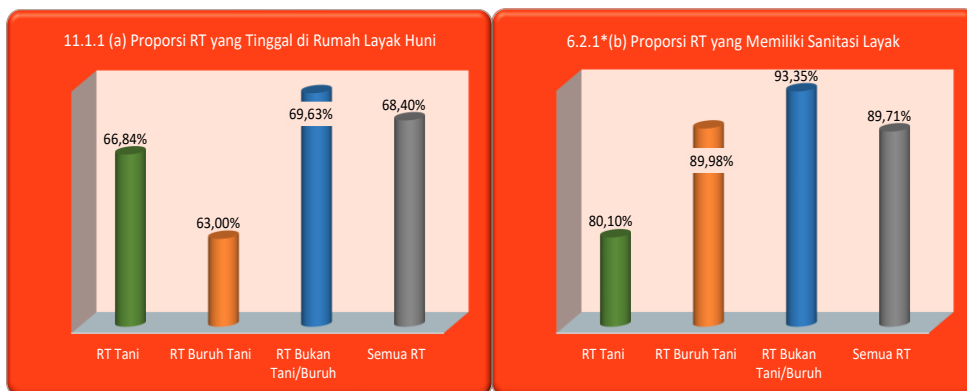


Gambar 4.2.5. SDGs 4.1.2* (a) Tingkat Penyelesaian Pendidikan, Tahun 2025

Pada dimensi standar hidup layak, RT tani juga masih tertinggal dibandingkan RT bukan tani/buruh maupun rata-rata nasional. Indikator yang dicermati untuk standar hidup layak ini di antaranya air minum layak, fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun, sanitasi layak, bahan bakar gas untuk memasak dan rumah layak huni (Gambar 4.2.6). Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani perlu dilakukan secara komprehensif dan kolaborasi antar lembaga, tidak hanya Kementerian Pertanian saja.



Gambar 4.2.6. Proporsi Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak dan Menggunakan Bahan Bakar Gas untuk Memasak 2025



Gambar 4.2.7. Proporsi Rumah Tangga yang Tinggal di Rumah Layak Huni dan Memiliki Sanitasi Layak, Tahun 2025

Indikator standar hidup layak juga dapat dilihat dari pendapatan yang diperoleh suatu rumah tangga pertanian. Pada Survei Ekonomi Pertanian Tahun 2024 (SEP 2024) dilakukan pengumpulan data untuk menghitung SDGs pertanian yaitu terkait petani skala kecil SDGs 2.3.2 yang akan dibahas pada subbab 4.3.

4.3. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pertanian

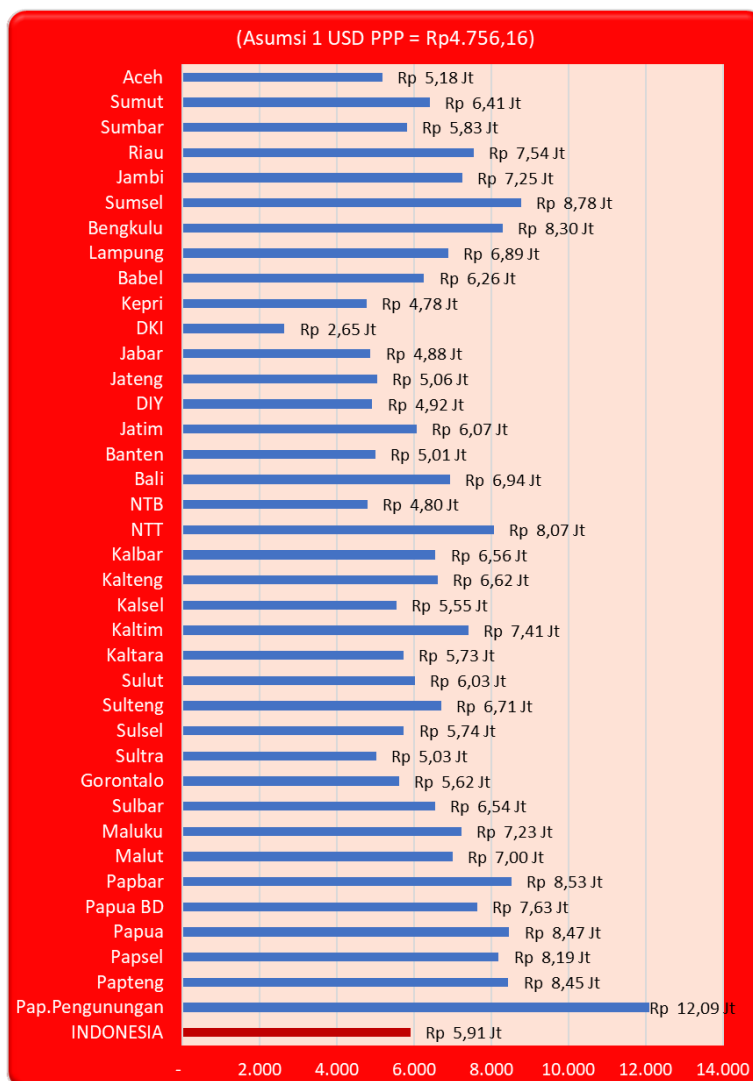
Tahun 2024 BPS melaksanakan Survei Ekonomi Pertanian Tahun 2024 (SEP 2024) yang merupakan rangkaian dari kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST 2023). Sesuai rekomendasi FAO, SEP 2024 dilaksanakan untuk mendapatkan indikator SDGs 2.3.2 terkait pendapatan. Pada analisis ini akan dibahas pendapatan khusus untuk petani skala kecil. Konsep definisi petani skala kecil mengacu kepada konsep FAO dengan menggunakan 2 (dua) ukuran yaitu ukuran fisik dan ekonomi. Berdasarkan hasil ST 2023, yang disebut petani skala kecil adalah apabila lahan garapan 1,02 hektar atau kurang, atau memelihara ternak sebanyak 2 TLU (Tropical Livestock Unit/setara 2 sapi) atau kurang dan mampu menghasilkan pendapatan maksimal Rp26,60 juta setahun.



Gambar 4.3.1. Perbandingan Pendapatan Petani Hasil SEP 2024

Berdasarkan hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam tingkat pendapatan bersih antara petani skala kecil dan bukan petani skala kecil. Petani skala kecil rata-rata hanya mampu memperoleh pendapatan bersih sebesar 1.242,48 US\$ PPP atau sekitar 5.909.429 rupiah per tahun. Sebaliknya, bukan petani skala kecil mampu meraih pendapatan bersih jauh lebih tinggi, yakni 16.978,56 US\$ PPP atau setara dengan 80.752.908 rupiah per tahun (Gambar 4.3.1).

kesenjangan ekonomi yang cukup lebar dapat berpotensi memperburuk disparitas kesejahteraan antara petani kecil dan petani dengan skala usaha lebih besar. Petani skala kecil sebagian besar merupakan usaha perorangan dengan sumber daya yang terbatas. Sementara itu, yang bukan petani skala kecil mencakup perusahaan pertanian berbadan hukum serta usaha pertanian lainnya, memiliki kapasitas lebih besar dalam mengadopsi teknologi modern, mengakses modal dengan skema yang lebih menguntungkan, serta mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi yang lebih efisien (BPS, 2025).



Gambar 4.3.2. Pendapatan Bersih Petani Skala Kecil Hasil SEP 2024

Data hasil SEP 2024 indikator SDGs 2.3.2 pendapatan petani skala kecil per provinsi disajikan dalam USD PPP. Berdasarkan asumsi secara nasional 1 US PPP setara dengan Rp4.756,16 maka sebaran pendapatan menurut provinsi dalam rupiah dapat dilihat pada Gambar 4.3.2. Beberapa provinsi terpantau penghasilan petani skala kecilnya berada di bawah rata-rata Indonesia Rp5,91 juta. Provinsi dengan penghasilan bersih per tahun adalah Papua Pegunungan Rp12,09 juta dan terendah DKI Jakarta Rp2,56

juta. Jika dilihat berdasarkan distribusi wilayah, provinsi-provinsi di Papua mendominasi lima besar dalam daftar daerah dengan nilai pendapatan bersih tertinggi bagi petani di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya karakteristik khusus dalam sistem pertanian di Papua yang membedakannya dari wilayah lain. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya pendapatan bersih petani di Papua adalah harga jual komoditas pertanian yang relatif tinggi.

Lebih jauh BPS menjelaskan bahwa sistem pertanian yang diterapkan oleh sebagian besar petani skala kecil di Papua juga memainkan peran penting dalam perhitungan pendapatan bersih mereka. Banyak petani di Papua cenderung tidak mengeluarkan biaya operasional secara langsung dalam bentuk uang tunai. Sebaliknya, mereka lebih banyak menggunakan sumber daya alam sebagai input produksi, seperti pupuk organik dari kotoran hewan, sistem irigasi alami, serta praktik pertanian tradisional yang tidak bergantung pada bahan kimia sintetis. Selain itu, pemerintah juga memiliki berbagai program bantuan dan subsidi yang ditujukan untuk mendukung petani di Papua, baik dalam bentuk distribusi benih, alat pertanian, maupun pendampingan teknis.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun angka pendapatan bersih petani di Papua terlihat tinggi, hal ini belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan petani di wilayah lain. Tingginya harga kebutuhan pokok di Papua, termasuk biaya transportasi dan akses terhadap barang dan jasa dasar, dapat mengurangi daya beli petani secara signifikan. Oleh karena itu, meskipun pendapatan bersih yang dicatat lebih tinggi, daya beli riil petani di Papua mungkin masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Besarnya pendapatan suatu rumah tangga pertanian juga dipengaruhi oleh sumber penghasilan lainnya di luar pertanian. Persentase RTP menurut sumber penghasilan terbesarnya berdasarkan Susenas tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.3.1 di bawah ini. Tahun 2023 – 2025, jumlah RTP dengan sumber penghasilan terbesar dari pertanian

terus mengalami penurunan. Jumlah RTP dengan sektor pertanian luas menjadi sumber penghasilan terbesar berturut-turut 80,83%, 80,18% dan 79,33%. dari total RTP. Tahun 2025, sumber penghasilan lainnya secara umum kurang dari 5% saja, yaitu dari perdagangan, hotel dan rumah makan sebesar 4,07%, konstruksi bangunan 3,57%, industri pengolahan 2,23% dan jasa 1,15%. Penerimaan pendapatan dalam survey ini ditambahkan ke dalam rincian sumber penghasilan utama.

Tabel 4.3.1. Persentase Rumah Tangga Pertanian Menurut Sumber Penghasilan Terbesar di Jawa – Luar Jawa, 2023 – 2025

Sumber Penghasilan Terbesar	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
1 Pertanian	76,20	84,81	80,83	75,39	84,33	80,18	73,12	84,33	79,33
2 Pertambangan dan penggalian	0,44	0,83	0,65	0,33	0,75	0,56	0,34	0,88	0,64
3 Industri pengolahan	3,28	1,35	2,24	3,57	1,26	2,33	3,69	1,23	2,33
4 Listrik dan gas	0,05	0,09	0,07	0,11	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08
5 Konstruksi/bangunan	4,55	2,18	3,28	4,78	2,35	3,48	5,03	2,39	3,57
6 Perdagangan, hotel dan rumah makan	4,80	2,51	3,57	5,10	2,68	3,80	5,73	2,75	4,07
7 Transportasi, pergudangan, informasi, dan komunikasi	1,13	1,16	1,15	1,17	1,05	1,11	1,32	1,06	1,18
8 Keuangan dan asuransi	0,13	0,13	0,13	0,15	0,12	0,13	0,19	0,11	0,15
9 Jasa	1,16	0,68	0,91	1,33	0,94	1,12	1,61	0,77	1,15
10 Penerima pendapatan	6,25	3,17	4,59	6,00	3,22	4,51	6,64	3,06	4,65
11 Lainnya	2,02	3,08	2,59	2,08	3,22	2,69	2,26	3,34	2,86
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : diolah dari Susenas - BPS

Tahun 2023 – 2025 jumlah RTP dengan sumber penghasilan terbesarnya dari pertanian khususnya di wilayah Luar Jawa lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Persentase ini seperti juga total Indonesia cenderung turun pada periode 2023 – 2025. Tahun 2025 di Luar Jawa persentase ini cenderung stagnan sebaliknya di Jawa turun sedikit signifikan. Tahun 2025 sebanyak 84,33% RTP di Luar Jawa penghasilan terbesarnya dari pertanian sementara di Jawa sekitar 73,12% (Tabel 4.3.1).

Proporsi Pengeluaran Untuk Makanan

Pengeluaran rumah tangga untuk makanan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa makanan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap individu, sehingga perubahan dalam pola dan proporsi pengeluaran makanan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ekonomi rumah tangga. Dalam konteks pengukuran sosial ekonomi, indikator ini telah lama digunakan secara luas oleh berbagai lembaga statistik dan penelitian internasional.

Salah satu landasan teoretis yang mendukung penggunaan indikator ini adalah Hukum Engel, yang menyatakan bahwa proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung menurun seiring meningkatnya pendapatan. Dengan demikian, rumah tangga berpendapatan rendah umumnya mengalokasikan porsi yang lebih besar dari pendapatannya untuk kebutuhan makanan, sedangkan rumah tangga yang lebih sejahtera memiliki kemampuan untuk mengalihkan pengeluarannya kepada kebutuhan bukan makanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, atau rekreasi. Perbedaan proporsi ini menjadi sinyal yang jelas tentang tingkat kesejahteraan dan kapasitas ekonomi rumah tangga.

Selain itu, pengeluaran untuk makanan juga mencerminkan ketahanan rumah tangga terhadap perubahan ekonomi. Ketika terjadi kenaikan harga atau penurunan pendapatan, rumah tangga miskin cenderung langsung terdampak karena sebagian besar pengeluarannya tertuju pada kebutuhan yang tidak dapat dikurangi, yaitu makanan. Sebaliknya, rumah tangga yang lebih sejahtera memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pengeluaran nonmakanan terlebih dahulu sebelum mengurangi konsumsi pangan. Oleh karena itu, pola pengeluaran makanan dapat digunakan untuk menilai kerentanan ekonomi dan ketangguhan rumah tangga dalam menghadapi guncangan.

Dari perspektif kualitas hidup, komposisi pengeluaran makanan juga

menggambarkan akses rumah tangga terhadap pangan bergizi, yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. Rumah tangga dengan pendapatan rendah cenderung mengonsumsi jenis pangan yang lebih murah dan kurang beragam, sedangkan rumah tangga sejahtera memiliki kemampuan untuk membeli pangan berprotein tinggi, buah-buahan, dan produk bergizi lainnya. Perbedaan ini berimplikasi pada status gizi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia.

Pengeluaran makanan juga merupakan komponen yang mudah diukur, stabil, dan dapat dibandingkan antar waktu maupun antar wilayah. Hal ini menjadikannya indikator yang andal dalam survei sosial-ekonomi seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Bahkan, dalam metode perhitungan resmi garis kemiskinan, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) menjadi komponen utama yang menggambarkan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Secara keseluruhan, penggunaan indikator pengeluaran untuk makanan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi kesejahteraan masyarakat. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kemampuan ekonomi dasar rumah tangga, tetapi juga mengungkap struktur konsumsi, tingkat kerentanan, serta kualitas hidup secara lebih luas. Dengan demikian, pengeluaran untuk makanan menjadi instrumen yang relevan dan penting dalam analisis sosial ekonomi dan perumusan kebijakan pembangunan.

Susenas merilis data konsumsi dan pengeluaran dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu makanan dan bukan makanan. Kelompok komoditas untuk makanan terdiri dari 14 kelompok mulai dari padi-padian sampai rokok dan tembakau. Sementara kelompok komoditas bukan makanan terdiri dari 6 kelompok mulai dari perumahan dan fasilitas rumah tangga sampai keperluan pesta dan upacara/kenduri. Hasil Susenas yang dirilis resmi BPS adalah untuk rumahtangga secara umum, sementara dalam analisis

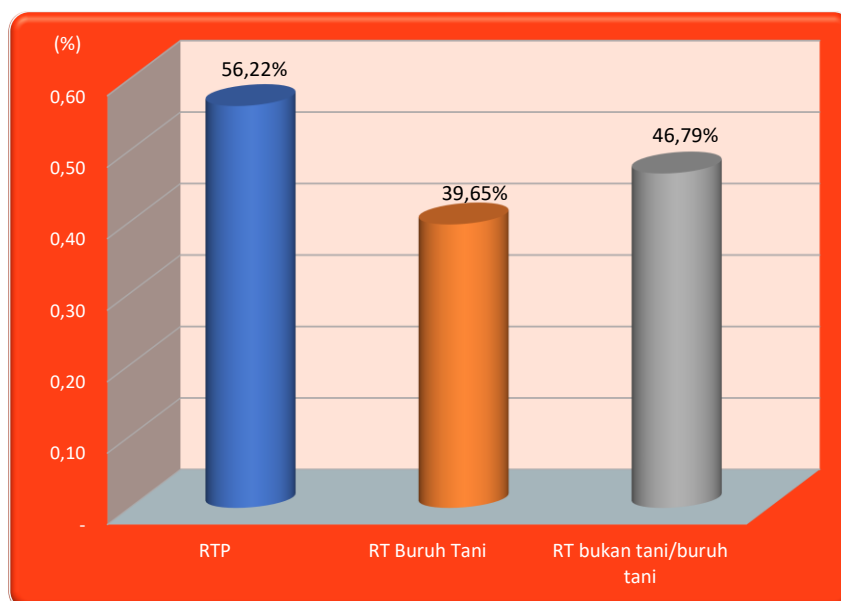
ini data Susenas diolah untuk dapat menghitung pengeluaran rumah tangga yang dibedakan menjadi rumah tangga pertanian, buruh tani dan bukan tani/buruh.

Tabel 4.3.2. Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan, Tahun 2025

(Rupiah/Kapita/Bulan)

Rumah Tangga	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
RTP	671.466	548.196	1.219.662	743.673	558.719	1.302.392	711.518	554.033	1.265.551
RT Buruh Tani	633.135	404.353	1.037.488	749.498	517.780	1.267.279	687.833	1.046.733	1.734.566
RT bukan tani/buruh tani	897.439	1.096.748	1.994.186	865.675	959.622	1.825.297	885.853	1.007.588	1.893.442

Sumber: diolah dari Susenas, BPS

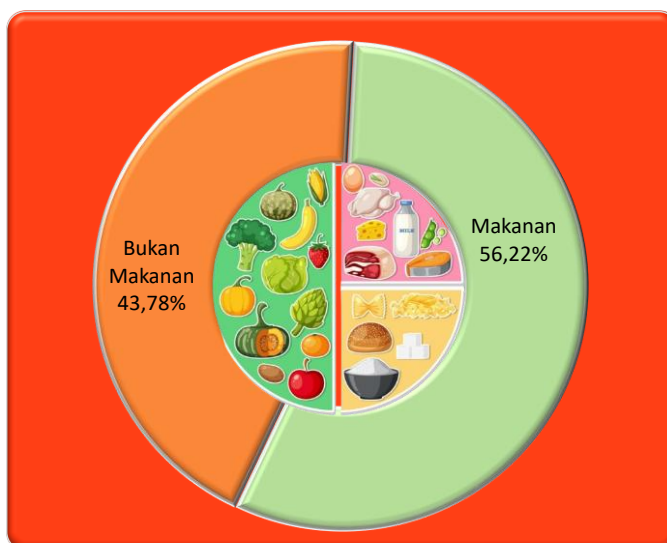


Gambar 4.3.3. Persentase Pengeluaran untuk Makanan menurut Jenis Rumah Tangga, Tahun 2025

Total pengeluaran rumah tangga umum (bukan tani/buruh tani) pada tahun 2025 adalah Rp.1.893.442,- per kapita dalam sebulan. Sebesar 46,79% adalah pengeluaran untuk makanan (Rp.885.853,-). Pengeluaran untuk makanan di RTP adalah Rp.711.518,- atau 56,22% dari total

pengeluarannya. Sementara RT buruh tani pengeluaran untuk makanannya 35,65% (Rp.687,833,-) dari total pengeluarannya. Berdasarkan data ini dapat diasumsikan bahwa tingkat kesejahteraan RTP lebih rendah dibandingkan RT umum, karena porsi pengeluaran untuk makanannya lebih besar. (Tabel 4.3.2 dan Gambar 4.3.3).

Pengeluaran rumah tangga pertanian (RTP) secara umum dibagi dalam pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Proporsi pengeluaran rumah tangga pertanian (RTP) untuk makanan dan non makanan dapat dilihat pada gambar 4.3.4. Tahun 2025 secara nasional persentase pengeluaran RTP untuk makanan sebesar 56,22% dan masih mendominasi pola pengeluaran rumah tangga pertanian di Indonesia. Pengeluaran RTP untuk bukan makanan tahun 2025 sebesar 43,78%.



Gambar 4.3.4. Proporsi Pengeluaran RTP Untuk Makanan dan Non Makanan, 2025

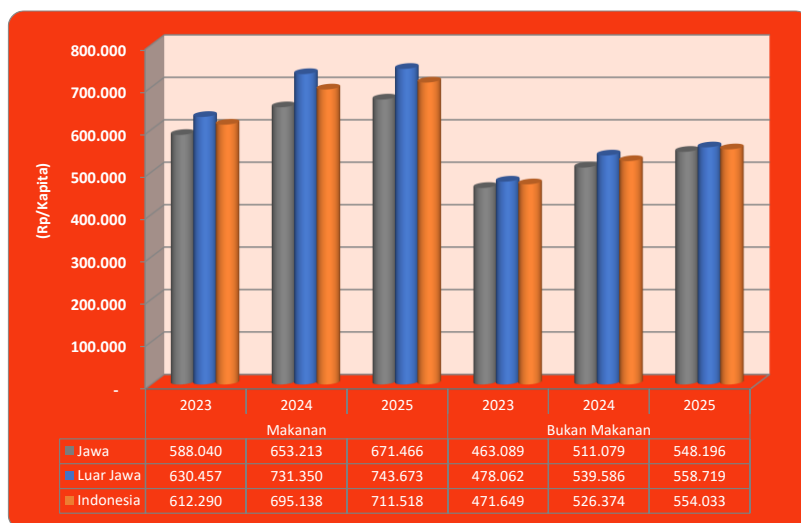
Tabel 4.3.3. Persentase Pengeluaran RTP untuk Makanan dan Bukan Makanan Menurut Wilayah, 2023 – 2025

(%)

Uraian	Makanan			Bukan makanan		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Jawa	55,94	56,10	55,05	44,06	43,90	44,95
Luar Jawa	56,87	57,54	57,10	43,13	42,46	42,90
Indonesia	56,49	56,91	56,22	43,51	43,09	43,78

Sumber: diolah dari Susenas BPS

Berdasarkan wilayah Jawa dan Luar Jawa, pengeluaran untuk makanan oleh RTP di Luar Jawa sedikit lebih besar dibandingkan RTP di Jawa (Tabel 4.3.3). Pengeluaran untuk makanan oleh RTP di Luar Jawa tahun 2025 adalah sebesar 57,10%. Sementara untuk Jawa adalah 55,05% di tahun 2025 turun dari sebelumnya 56,10%. Pengeluaran untuk bukan makanan secara umum naik dibandingkan tahun 2024 baik untuk wilayah Jawa, Luar Jawa maupun secara nasional. Sebaliknya pengeluaran untuk makanan menurun baik di Jawa, Luar Jawa maupun secara nasional.



Gambar 4.3.5. Rata-Rata Pengeluaran Nominal Untuk Makanan dan Bukan Makanan per Kapita Selama Sebulan, 2023 – 2025

Secara nominal, rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan dalam sebulan oleh RTP di Indonesia tahun 2024 adalah Rp 711.518,- (Tabel 4.3.4). Nominal pengeluaran ini naik dari tahun 2023 sebesar 2,36%. Rata-rata nominal pengeluaran untuk makanan di Luar Jawa lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Jika dibandingkan secara nasional, rata-rata pengeluaran nominal di Luar Jawa bahkan juga berada di atas rata-rata pengeluaran nominal secara nasional (Gambar 4.3.5).

Tabel 4.3.4. Rata-rata Pengeluaran RTP per Kapita untuk Makanan dan Bukan Makanan dalam Sebulan di Jawa – Luar Jawa, 2023 – 2025

Uraian	2023	2024	2025	Pertumbuhan 2024-2025 (%)
Makanan (Rp/kapita/bulan)				
Jawa	588.040	653.213	671.466	2,79
Luar Jawa	630.457	731.350	743.673	1,69
Indonesia	612.290	695.138	711.518	2,36
Bukan Makanan (Rp/kapita/bulan)				
Jawa	463.089	511.079	548.196	7,26
Luar Jawa	478.062	539.586	558.719	3,55
Indonesia	471.649	526.374	554.033	5,25
Total (Rp/kapita/bulan)				
Jawa	1.051.129	1.164.292	1.219.662	4,76
Luar Jawa	1.108.519	1.270.935	1.302.392	2,48
Indonesia	1.083.939	1.221.512	1.265.551	3,61

Sumber: diolah dari Susenas BPS

Rata-rata pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan meningkat setiap tahunnya baik di Jawa maupun Luar Jawa. Tahun 2025 rata-rata pengeluaran untuk makanan di Luar Jawa sebesar Rp.743.673,- naik dari Rp. 731.350,- per kapita per bulan di tahun 2024. Sementara di

Jawa tahun 2025 sebesar Rp. 671.466,- naik dari tahun 2024 sebesar Rp. 653.213,-. Persentase kenaikan di Jawa cenderung lebih besar dibandingkan di Luar Jawa baik untuk makanan maupun bukan makanan (Tabel 4.3.4 dan Gambar 4.3.5).

Berdasarkan analisis deskriptif di atas, tahun 2025 kenaikan pengeluaran untuk bukan makanan cenderung lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk makanan. Laju pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok makanan ini mencerminkan dinamika perubahan struktur konsumsi masyarakat sejalan dengan peningkatan tingkat kesejahteraan dan perkembangan kondisi sosial ekonomi. Fenomena ini sejalan dengan pola umum bahwa ketika pendapatan masyarakat meningkat, proporsi dan pertumbuhan pengeluaran bukan makanan cenderung mengalami akselerasi.

Kedua, peningkatan pengeluaran bukan makanan mencerminkan alih konsumsi menuju kebutuhan sekunder dan tersier. Pada tahun 2025, beberapa kategori pengeluaran bukan makanan seperti transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, rekreasi, dan perlengkapan rumah tangga mengalami peningkatan yang lebih signifikan. Hal ini mencerminkan peningkatan akses dan preferensi masyarakat terhadap layanan yang meningkatkan kualitas hidup, sejalan dengan peningkatan pendapatan dan pemulihan ekonomi.

Secara keseluruhan, lebih tingginya laju pengeluaran kelompok bukan makanan mencerminkan struktur konsumsi masyarakat yang semakin modern dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Sementara kebutuhan pangan relatif stabil, peningkatan pendapatan dan perubahan preferensi konsumsi menyebabkan kategori pengeluaran nonmakanan mengalami pertumbuhan yang lebih kuat. Pola ini menjadi indikator positif dari perbaikan kesejahteraan sekaligus menunjukkan pergeseran perilaku konsumsi rumah tangga menuju struktur yang lebih beragam dan berorientasi pada pelayanan.

Tabel 4.3.5. Distribusi Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan, Tahun 2025

Jenis RT	(Rupiah/Kapitan/Bulan)					
	Jawa			Luar Jawa		
	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi
RT Tani	447.424	730.197	1.339.543	468.229	739.728	1.374.831
RT Buruh Tani	460.564	820.687	1.526.596	491.710	826.464	1.443.969
RT Bukan Tani/Buruh Tani	449.973	783.385	1.521.150	464.363	772.975	1.397.494

Sumber: diolah dari data Susenas BPS 2025

Tabel 4.3.5 pengeluaran rumah tangga tani berdasarkan wilayah Jawa dan luar Jawa serta kelompok kesejahteraan menunjukkan gambaran mengenai kondisi ekonomi petani sebagai salah satu kelompok utama dalam struktur sosial pedesaan. Rumah tangga tani umumnya memiliki akses terhadap lahan, baik sebagai pemilik maupun penggarap, yang membedakannya dari rumah tangga buruh tani. Perbedaan ini tercermin dalam pola dan tingkat pengeluaran yang menggambarkan perbedaan kapasitas ekonomi, ketahanan, dan kemampuan konsumsi.

Pengeluaran rumah tangga tani menunjukkan pola peningkatan yang konsisten seiring naiknya kelompok kesejahteraan, baik di Jawa maupun luar Jawa. Di Jawa, rumah tangga pada kelompok 40 persen terbawah memiliki pengeluaran sebesar Rp447.424, meningkat menjadi Rp730.197 pada kelompok menengah, dan mencapai Rp1.339.543 pada kelompok 20 persen teratas. Sementara itu, di luar Jawa, pengeluaran berada pada tingkat yang sedikit lebih tinggi untuk setiap kelompok, yaitu Rp468.229, Rp739.728, dan Rp1.374.831 secara berurutan.

Pengeluaran rumah tangga tani menunjukkan pola peningkatan yang konsisten seiring naiknya kelompok kesejahteraan, baik di Jawa maupun luar Jawa. Di Jawa, rumah tangga pada kelompok 40 persen terbawah memiliki pengeluaran sebesar Rp447.424, meningkat menjadi Rp730.197 pada kelompok menengah, dan mencapai Rp1.339.543 pada kelompok 20 persen teratas. Sementara itu, di luar Jawa, pengeluaran berada pada tingkat yang sedikit lebih tinggi untuk setiap kelompok, yaitu Rp468.229, Rp739.728, dan Rp1.374.831 secara berurutan (Tabel 4.3.5).

Secara umum rumah tangga tani di luar Jawa memiliki tingkat pengeluaran yang sedikit lebih tinggi di semua kelompok kesejahteraan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan biaya hidup atau kondisi pendapatan yang lebih baik, terutama terkait struktur pertanian, skala usaha, atau keberagaman komoditas pertanian di luar Jawa. Ketimpangan internal dalam rumah tangga tani dapat dilihat dari perbandingan antara kelompok terbawah dan kelompok teratas. Di Jawa, pengeluaran rumah tangga kelompok tertinggi tercatat sekitar 3,0 kali lebih besar dibandingkan kelompok terbawah. Pola hampir serupa juga terjadi di luar Jawa, dengan tingkat disparitas sekitar 2,9 kali.

Pola ini menegaskan bahwa rumah tangga tani memiliki tingkat heterogenitas kesejahteraan yang nyata, dengan kelompok tertinggi mencatat pengeluaran hampir tiga kali lebih besar daripada kelompok terbawah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan daya beli yang cukup signifikan meskipun seluruh kelompok berada dalam sektor pertanian secara umum. Kelompok tertinggi umumnya adalah rumah tangga tani yang memiliki akses modal lebih baik, mengusahakan komoditas bernilai tinggi, atau memiliki diversifikasi pendapatan dari sumber lain.

Jika dibandingkan dengan rumah tangga buruh tani, rumah tangga tani menunjukkan tingkat pengeluaran yang sedikit lebih rendah pada beberapa kelompok tetapi lebih merata secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan karakteristik pendapatan rumah tangga tani yang lebih stabil dari usaha tani sendiri tetapi tidak selalu lebih tinggi, terutama pada kelompok bawah. Perbedaan yang lebih kecil antar wilayah pada rumah tangga tani juga menunjukkan pola ekonomi yang lebih seragam, didorong oleh aktivitas usaha tani sebagai sumber pendapatan utama.

Temuan ini memiliki beberapa implikasi penting bagi perumusan kebijakan. Pertama, peningkatan kesejahteraan rumah tangga tani memerlukan penguatan akses terhadap input pertanian, terutama bagi kelompok terbawah yang memiliki tingkat pengeluaran paling rendah dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Kedua, kesenjangan antar kelompok

menuntut adanya kebijakan dengan perlakuan berbeda, karena kebutuhan rumah tangga pada kelompok terbawah berbeda dengan kelompok tertinggi.

Selain itu, perbedaan antar wilayah menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan pertanian yang mempertimbangkan karakteristik lokal. Wilayah luar Jawa yang mencatat pengeluaran lebih tinggi memiliki potensi peningkatan produktivitas yang dapat terus dimaksimalkan, sementara wilayah Jawa membutuhkan strategi intensifikasi dan peningkatan efisiensi.

Tabel 4.3.6. Persentase Rumah Tangga menurut Kuantil pengeluaran per Kapita, Tahun 2025

(%)

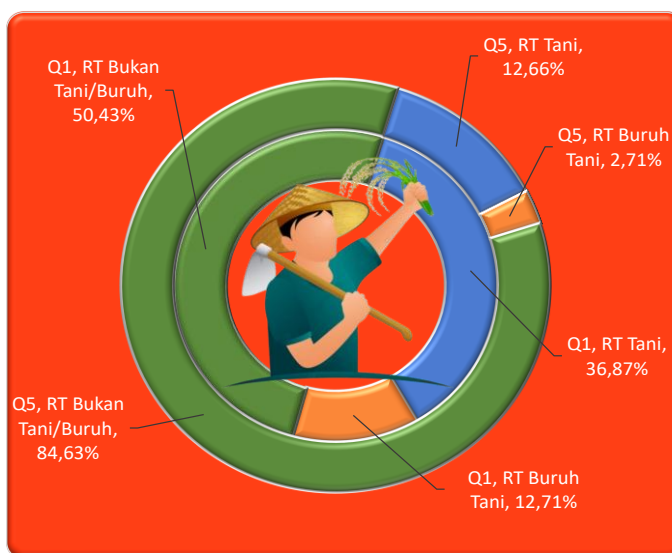
Jenis Rumah Tangga	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Jawa					
RT Tani	30,53	25,37	20,98	16,56	8,06
RT Buruh Tani	14,09	10,72	7,34	4,93	1,55
RT Bukan Tani/Buruh Tani	55,37	63,90	71,68	78,51	90,40
Luar Jawa					
RT Tani	47,55	38,36	34,47	32,58	20,03
RT Buruh Tani	10,59	11,53	10,48	8,75	4,61
RT Bukan Tani/Buruh Tani	41,86	50,12	55,05	58,67	75,36
Indonesia					
RT Tani	36,87	30,82	27,16	24,00	12,66
RT Buruh Tani	12,71	10,96	8,71	6,73	2,71
RT Bukan Tani/Buruh Tani	50,43	58,22	64,13	69,27	84,63

Sumber: diolah dari data Susenas BPS 2025

Tabel 4.3.5 menggambarkan bagaimana komposisi tiga jenis rumah tangga utama terdistribusi pada lima kelompok kuintil pengeluaran (Q1 = 20% terbawah hingga Q5 = 20% tertinggi). Pola ini dapat digunakan sebagai indikator struktural kesejahteraan ekonomi, karena pergeseran proporsi antarkuintil mencerminkan tingkat keterhubungan rumah tangga dengan sumber penghidupan (pertanian/bukan pertanian) dan tingkat

pendapatan. Secara umum, terlihat bahwa RT Bukan Tani/Buruh Tani mendominasi pada kuintil atas (Q4 dan Q5), sementara RT Tani dan terutama RT Buruh Tani terkonsentrasi pada kuintil bawah. Hal ini mengonfirmasi adanya perbedaan struktural kesejahteraan antara jenis rumah tangga tersebut.

Proporsi RT Tani secara nasional turun dari Q1 36,87% menjadi Q5 12,66%. Data ini mengindikasikan bahwa RT Tani umumnya berada pada kuintil rendah-menengah, dengan sebagian kecil berada di kuintil atas. Sementara RT buruh tani mengecil secara signifikan dari Q1 12,71% menjadi Q5 2,71% mengindikasikan keterbatasan struktural dari ekonominya. Sebaliknya RT bukan tani/buruh tani meningkat dari Q1 50,43% menjadi Q5 84,63%. Artinya, rumah tangga yang bekerja di sektor nonpertanian merupakan kelompok dominan di strata ekonomi tinggi (Gambar 4.3.6).



Gambar 4.3.6. Persentase Rumah Tangga Kuintil 1 dan 5, Tahun 2025

Secara wilayah, kelompok pengeluaran Q1 di Jawa didominasi oleh RT bukan tani/buruh sebanyak 55,37%, sementara di Luar Jawa didominasi RT Tani sebesar 47,55%. Namun pada kelompok Q5 baik Jawa maupun Luar Jawa didominasi oleh RT bukan tani/buruh. Perbedaan

struktural Jawa dan Luar Jawa menunjukkan bahwa Jawa memiliki dominasi sektor nonpertanian yang lebih kuat, sehingga proporsi RT nonpertanian sangat tinggi di kuintil atas. Sementara Luar Jawa masih sangat tergantung pada pertanian untuk kelompok pengeluaran rendah. Perbedaan antara Jawa dan luar Jawa memperlihatkan dinamika ekonomi regional yang berbeda, di mana Jawa lebih maju secara struktural ke sektor nonpertanian.

Ketimpangan antar jenis rumah tangga sangat jelas terlihat, dimana RT Buruh Tani adalah kelompok paling rentan, hampir seluruhnya berada di kelompok pengeluaran rendah. RT Tani berada pada posisi menengah-bawah, menunjukkan keterbatasan produktivitas dan akses sumber daya. Sebaliknya RT bukan tani/buruh tani menguasai kelompok pengeluaran menengah-atas, yang mengindikasikan tingginya peluang ekonomi di luar pertanian.

Tabel 4.3.7. Pengeluaran untuk Makanan dan Bukan Makanan menurut Subsektor, Tahun 2025

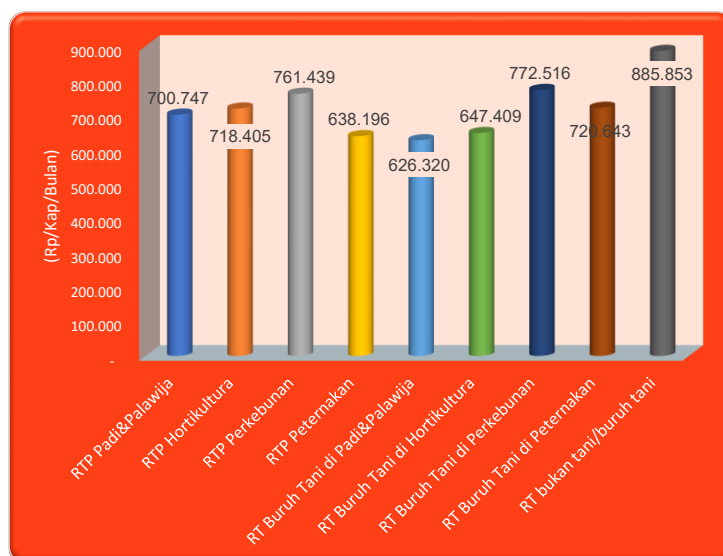
(Rupiah/Kapita/Bulan)

Rumah Tangga	Jawa			Luar Jawa			Indonesia		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
RTP Padi&Palawija	685.176	537.202	1.222.378	719.688	504.788	1.224.476	700.747	522.578	1.223.325
RTP Hortikultura	660.368	555.257	1.215.626	788.174	589.876	1.378.051	718.405	570.978	1.289.383
RTP Perkebunan	688.270	783.898	1.472.168	768.695	602.502	1.371.196	761.439	618.867	1.380.306
RTP Peternakan	617.919	511.572	1.129.491	680.429	600.468	1.280.897	638.196	540.408	1.178.604
RT Buruh Tani di Padi&Palawija	620.887	381.663	1.002.550	643.892	398.979	1.042.872	626.320	385.753	1.012.073
RT Buruh Tani di Hortikultura	609.995	401.462	1.011.456	761.914	524.361	1.286.275	647.409	431.729	1.079.137
RT Buruh Tani di Perkebunan	687.536	472.302	1.159.838	786.318	555.450	1.341.768	772.516	543.833	1.316.349
RT Buruh Tani di Peternakan	709.557	520.740	1.230.296	748.795	597.138	1.345.934	720.643	542.326	1.262.969
RT bukan tani/buruh tani	897.439	1.096.748	1.994.186	865.675	959.622	1.825.297	885.853	1.046.733	1.932.586

Sumber: diolah dari Susenas, BPS

Tabel 4.3.7 menunjukkan data menurut subsektor. Jika dirinci menurut subsektor, RTP perkebunan menunjukkan pola pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan subsektor lainnya. Secara total nasional pengeluaran untuk makanan RTP perkebunan adalah Rp. 761.439,- Sementara RTP subsektor peternakan pengeluaran untuk makanannya

terendah dibandingkan subsektor lain. RTP buruhtani subsektor perkebunan pengeluaran untuk makanannya lebih tinggi dibandingkan RTP buruh tani subsektor lain yaitu Rp. 772.516,-. Bahkan pengeluaran RTP buruhtani subsektor perkebunan ini lebih tinggi dibandingkan RTP usaha tani (Tabel 4.3.7 dan Gambar 4.3.7).



Gambar 4.3.7. Pengeluaran untuk Makanan menurut Subsektor, Tahun 2025

Jika pengeluaran ini menjadi pendekatan untuk perhitungan penghasilan, maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani perkebunan sering kali lebih baik dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Beberapa faktor utama yang berkaitan dengan jenis komoditas, akses pasar, dan potensi pendapatan menjadi alasan hal tersebut. Komoditas perkebunan juga dikenal bernilai ekonomi tinggi, dan potensi pendapatan petani sektor perkebunan cenderung lebih stabil karena tanaman perkebunan dominan tanaman tahunan dengan masa panen yang lebih panjang dan berulang.

Skala usaha perkebunan juga cenderung lebih besar dibandingkan petani sub sektor lain. Petani perkebunan cenderung memiliki lahan yang lebih luas dibandingkan petani sub sektor lain. Luas lahan yang lebih besar

memungkinkan mereka meningkatkan skala ekonomi, sehingga produktivitas dan keuntungan juga lebih tinggi. Komoditas perkebunan juga sering menjadi bagian dari rantai pasok internasional. Petani perkebunan, baik secara langsung maupun melalui koperasi atau perusahaan pengelola, memiliki akses ke pasar ekspor yang memberikan harga lebih kompetitif dibandingkan pasar lokal. Beberapa produk perkebunan seperti kopi dan teh juga memiliki label khusus misalnya organik, yang meningkatkan nilai jual.

4.4. Nilai Indeks Gini

Ukuran yang dapat menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah koefisien gini (gini ratio) yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan atau pemerataan pendapatan. Gini ratio (G) adalah ukuran dispersi statistik untuk mewakili distribusi pendapatan suatu populasi dan merupakan ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah koefisien gini (gini ratio), Nilai G berkisar antara 0 sampai 1 dimana dapat dikatakan terjadi ketimpangan yang rendah jika nilai $G < 0,4$; ketimpangan sedang jika $0,4 \leq G \leq 0,5$ dan terjadi ketimpangan tinggi jika nilai $G > 0,5$. Koefisien bervariasi antara 0 sampai 1. Nilai $G = 0$ mencerminkan kesetaraan lengkap di mana semua nilai sama (dimana setiap orang memiliki pendapatan yang sama); dan $G = 1$ menunjukkan ketimpangan lengkap, dimana satu orang memiliki semua pendapatan atau konsumsi dan semua orang lain tidak memilikinya. Nilai Gini Ratio (G) yang dihitung berdasarkan hasil Susenas dalam analisis ini adalah menggunakan pendekatan pengeluaran. Secara umum interpretasinya tidak berbeda dengan nilai G yang dihitung menggunakan pendekatan pendapatan. Gini

Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Tahun 2023 – 2025 nilai G di wilayah Jawa, Luar Jawa dan Indonesia baik untuk rumah tangga tani, rumah tangga buruh tani, maupun rumah tangga non pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.4.1.

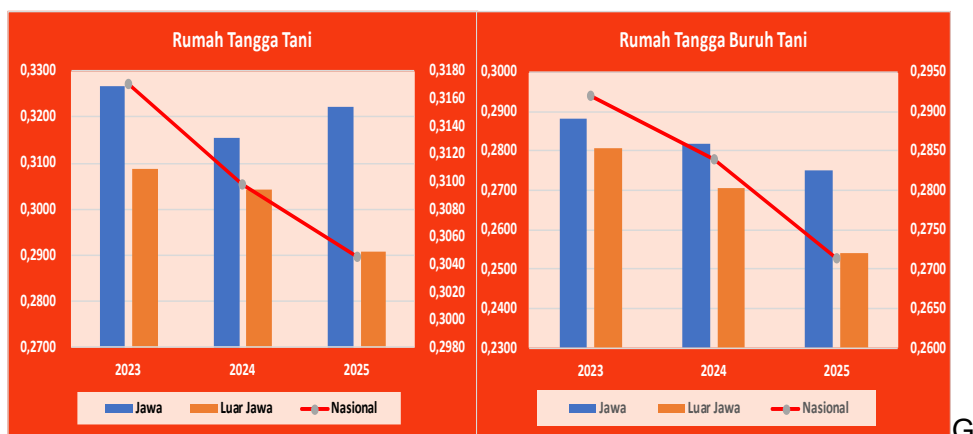
Tabel 4.4.1. Nilai Gini Ratio Pada Rumah Tangga Tani, Buruh Tani dan Non Pertanian, Tahun 2023 – 2025

Wilayah	Rumah Tangga Tani			Rumah Tangga Buruh Tani			Rumah Tangga Non Pertanian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Jawa	0,3268	0,3154	0,3221	0,2883	0,2820	0,2751	0,4233	0,4145	0,4075
Luar Jawa	0,3088	0,3042	0,2908	0,2807	0,2706	0,2542	0,3516	0,3433	0,3440
Nasional	0,3170	0,3098	0,3046	0,2920	0,2840	0,2714	0,3987	0,3898	0,3854

Sumber : Diolah dari Data Susenas Maret, BPS

Pada periode Maret 2023 sampai Maret 2025, secara nasional gini ratio pada rumah tangga tani, rumah tangga buruh tani dan rumah tangga non pertanian terjadi penurunan, yang berarti terjadi perubahan distribusi pengeluaran pada masing-masing rumah tangga tersebut kearah yang membaik. Penurunan ketimpangan distribusi pengeluaran Maret 2025 dibandingkan tahun 2024 masing-masing 0,005 poin pada rumah tangga tani, 0,013 poin pada rumah tangga buruh tani.dan 0,004 poin pada rumah tangga non pertanian (Tabel 4.4.1). Secara umum bila dilihat antar rumah tangga tani, rumah tangga buruh tani dan rumah tangga non pertanian terlihat terjadi ketimpangan yang lebih melebar antar rumah tangga non pertanian, mengingat sumber pendapatan dengan lapangan usaha yang bervariasi yang mengakibatkan distribusi pengeluaran juga bervariasi. Sementara pada rumah tangga tani dan buruh tani terlihat relatif homogen sehingga distribusi pengeluaran di rumah tangga tani dan buruh tani relatif lebih merata dibandingkan pengeluaran di rumah tangga non pertanian. Nilai gini ratio untuk rumah tangga non pertanian secara nasional berkisar antara 0,3854 sampai 0,3987 pada periode 2023 – 2025. Nilai G ini

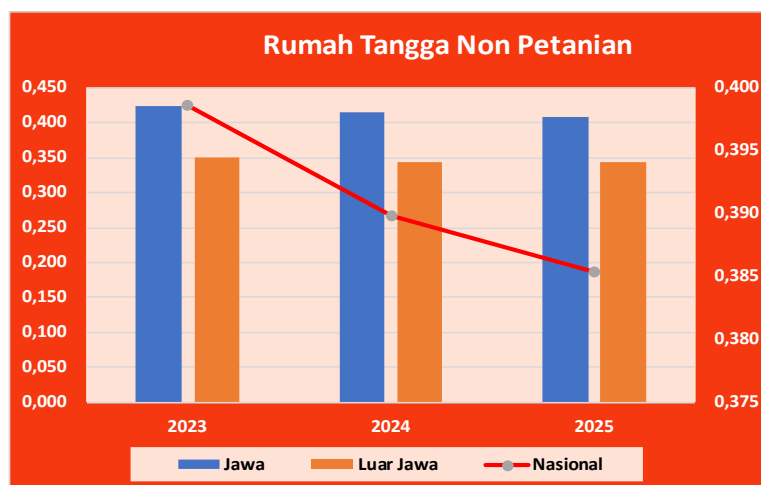
berada pada kisaran $0,385 \leq G \leq 0,399$ artinya termasuk dalam kategori ketimpangan rendah namun mendekati ketimpangan sedang. Sementara nilai G untuk rumah tangga tani pada periode yang sama lebih rendah yaitu 0,3046 sampai 0,3170, hal ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah demikian pula di rumah tangga buruh tani memiliki nilai G yang lebih rendah dengan kisaran 0,2714 – 0,2920. Hal ini menunjukkan distribusi pengeluaran di rumah tangga buruh tani dan rumah tangga tani relatif seragam dengan rata-rata pengeluaran tahun 2025 masing-masing sebesar Rp 1.082.011 per kapita/bulan dan Rp 1.181.628 per kapita/bulan sementara rata-rata di rumah tangga non pertanian lebih tinggi yaitu Rp 1.776.167 per kapita/bulan.



Gambar 4.4.1. Nilai Gini Ratio Pendapatan di Rumah Tangga Tani dan Buruh Tani, 2023–2025

Pada Gambar 4.4.2 dapat dilihat nilai G untuk rumah tangga tani dan buruh tani di Jawa 2023 – 2025 cenderung lebih tinggi dibandingkan Luar Jawa maupun secara nasional. Sehingga terlihat bahwa di Jawa dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan lebih bervariasi sumber pendapatannya, sehingga berdampak terhadap kecenderungan ketimpangan yang lebih melebar dibandingkan luar Jawa atau distribusi pengeluaran makin bervariasi antar penduduk. Pola yang sama juga terjadi gini ratio di rumah tangga non pertanian di Jawa 2023 – 2025 cenderung

lebih tinggi dibandingkan Luar Jawa maupun secara nasional dengan nilai gini ratio yang lebih tinggi dibandingkan di rumah tangga tani dan buruh tani (Gambar 4.4.2).



Gambar 4.4.2. Nilai Gini Ratio Pendapatan di Rumah Tangga Non Pertanian, 2023–2025

4.5. Kemiskinan di Pedesaan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Program-program yang telah dilakukan antara lain program KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PIP (Program Indonesia Pintar), PKH (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

(BPS, 2020). Jumlah penduduk miskin yang disajikan dalam analisis ini adalah berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas, BPS) bulan Maret dengan konsep penduduk pada rumah tangga tani, rumah tangga buruh tani dan rumah tangga non pertanian.

Berdasarkan data BPS, garis kemiskinan tahun 2023 sampai 2025 masing-masing sebesar Rp 550.458 per kapita/bulan, Rp 582.932 per kapita/bulan dan Rp 609.160 per kapita/bulan atau tahun 2025 naik 4,5% dibandingkan tahun 2024. Garis kemiskinan di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, yaitu tahun 2025 garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp 629.561 per kapita/bulan atau naik 4,6% dan di pedesaan Rp. 580.349 per kapita/bulan atau naik 4,22%. Analisis dalam tulisan ini akan dilakukan analisis kemiskinan khususnya penduduk pada rumah tangga tani dan buruh tani.

Tingkat kemiskinan penduduk pada rumah tangga tani/pertanian (RTP) dan rumah tangga buruh tani, menggunakan data jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada RTP hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas-BPS) Maret tahun 2023 sampai dengan 2025, dengan cakupan RTP meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Jumlah penduduk yang digunakan dalam analisis ini menggunakan data jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2020, dengan proyeksi penduduk tahun 2023 sampai 2025 berdasarkan periode Susenas Maret-BPS.

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode 2023-2025 mengalami penurunan 4,02% per tahun, yang disebabkan adanya penurunan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,62% dan tahun 2025 dibandingkan 2024 menurun cukup signifikan 5,41%. Pada Tabel 4.5.1. terlihat jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 25,9 juta orang atau 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia dan menurun pada tahun 2024 menjadi 25,22 juta orang atau 9,03%, kemudian tahun 2025 menurun kembali menjadi 23,85 juta orang

atau 8,47% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari total penduduk miskin yang ada pada tahun 2023 sekitar 39,92% atau 10,34 juta orang merupakan anggota rumah tangga pertanian (RTP) dan 13,93% atau 3,61 juta orang merupakan anggota pada buruh tani, selanjutnya tahun 2024 menurun menjadi 39,73% (RTP) dan 13,73% (buruh tani) dan tahun 2025 terlihat menurun kembali masing-masing menjadi 9,03 juta jiwa atau 37,85% (RTP) dan 2,93 juta orang atau 12,3% (buruh tani) dari total penduduk miskin Indonesia. Sementara untuk persentase penduduk miskin di RTP terhadap jumlah penduduk di RTP tahun 2025 terhadap 2024 menurun 5,45% per tahun dan pada buruh tani menurun cukup signifikan mencapai 11,12% per tahun, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.5.1.

Tabel 4.5.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, di Rumah Tangga Tani dan Buruh Tani, 2023 – 2025

No.	Uraian	2023	2024	2025	Pertumbuhan (%) 2025 Thd 2024
1	Penduduk Indonesia (Jiwa)	276.786.794	279.329.809	281.622.304	0,82
2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	25.898.546	25.219.205	23.854.561	-5,41
3	Jumlah Anggota Rumah Tangga Tani/Pertanian (RTP) (Jiwa)	73.902.076	75.569.965	72.013.518	-4,71
4	Jumlah Anggota RTP Miskin (Jiwa)	10.339.940	10.019.540	9.027.970	-9,90
5	Jumlah Anggota Buruh Tani (Jiwa)	24.555.624	23.487.868	22.333.948	-4,91
6	Jumlah Anggota Buruh Tani Miskin (Jiwa)	3.608.240	3.471.089	2.933.656	-15,48
7	% Penduduk Miskin Indonesia	9,36	9,03	8,47	-6,18
8	% Anggota RTP Miskin thd pddk miskin	39,92	39,73	37,85	-4,74
9	% Anggota RTP Miskin thd total anggota RTP	13,99	13,26	12,54	-5,45
10	% Anggota Buruh Tani Miskin thd pddk miskin	13,93	13,76	12,30	-10,65
11	% Anggota Buruh Tani Miskin thd total anggota buruh tani	14,69	14,78	13,14	-11,12

Sumber : BPS, diolah Pusdatin

Keterangan : Jumlah Penduduk SP 2020 dan Proyeksi Penduduk berdasarkan periode Susenas Maret-BPS

Selanjutnya bila dilihat jumlah penduduk miskin per sub sektor di rumah tangga tani dan buruh tani, secara umum menunjukkan bahwa sub sektor tanaman pangan merupakan sub sektor dengan jumlah penduduk miskin yang paling besar sebanding jumlah anggota RTP sub sektor tanaman pangan. Jumlah penduduk miskin pada rumah tangga tani tahun 2025 menurun cukup signifikan mencapai 9,9% dibandingkan tahun sebelumnya atau menjadi 9,03 juta orang, dengan penurunan yang cukup signifikan terjadi pada sub sektor hortikultura sebesar 12,43%, kemudian disusul sub

sektor tanaman pangan dan peternakan masing-masing menurun 11,62% dan 10,78% serta sub sektor perkebunan menurun 2,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaran penduduk miskin di rumah tangga tani tahun 2025 sekitar 57,76% berada di usaha tani tanaman pangan, sub sektor terbesar berikutnya adalah perkebunan yaitu 20,84%. Sementara untuk sub sektor peternakan dan hortikultura masing-masing sebesar 10,74% dan 10,66%. Secara rinci jumlah penduduk miskin per sub sektor di rumah tangga tani dan buruh tani 2023 sd. 2025 tersaji pada Tabel 4.5.2. Pola yang sama terjadi juga pada rumah tangga buruh tani pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan cukup signifikan mencapai 15,48% yaitu dari 3,47 juta orang menjadi 2,93 juta orang dengan penurunan yang cukup signifikan pada buruh tani hortikultura sebesar 27,18%, kemudian disusul buruh tani tanaman pangan dan peternakan masing-masing menurun 19,7% dan 10,40%, sedangkan buruh tani perkebunan meningkat 0,86% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.5.2. Jumlah Penduduk Miskin di Rumah Tangga Pertanian dan Buruh Tani Menurut Sub Sektor, 2023-2025

Sub Sektor	Penduduk Miskin di Rumah Tangga Pertanian (Jiwa)			Pertumbuhan (%) 2025 Thd 2024	Penduduk Miskin di Rumah Tangga Buruh Tani (Jiwa)			Pertumbuhan (%) 2025 Thd 2024
	2023	2024	2025		2023	2024	2025	
Tanaman Pangan	6,038,255	5,900,165	5,214,647	-11.62	2,213,572	2,098,630	1,685,099	-19.70
Hortikultura	1,084,198	1,098,563	962,042	-12.43	325,592	421,803	307,137	-27.18
Perkebunan	2,118,614	1,933,996	1,881,595	-2.71	903,506	795,723	802,594	0.86
Peternakan	1,098,873	1,086,815	969,687	-10.78	165,569	154,932	138,826	-10.40
Pertanian	10,339,940	10,019,540	9,027,970	-9.90	3,608,240	3,471,089	2,933,656	-15.48

Sumber : Susenas Maret, BPS diolah

Bila dilihat jumlah penduduk miskin tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan jumlah penduduk miskin di rumah tangga tani menurun 3,1%, dengan penurunan terjadi pada subsektor perkebunan sebesar 8,71%, disusul sub sektor tanaman pangan dan peternakan masing-masing sebesar 2,29% dan 1,1%, sebaliknya sub sektor hortikultura meningkat sebesar 1,32%. Sementara jumlah penduduk miskin

pada rumah tangga buruh tani thun 2024 terjadi penurunan sebesar 3,8%, dengan peningkatan signifikan di sub sektor perkebunan sebesar 11,93%, disusul sub sektor peternakan dan tanaman pangan masing-masing sebesar 6,42% dan 5,19, sebaliknya di rumah tangga buruh hortikultura meningkat signifikan mencapai 29,55% (Tabel 4.5.2).

4.6. Nilai Tukar Petani.

Nilai Tukar Petani merupakan perbandingan antara indeks yang diterima petani (IT) dengan indeks yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase, sehingga NTP dapat menggambarkan tingkat daya beli petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan usaha taninya. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Dalam perhitungan Nilai Tukar Petani (NTP) oleh BPS digunakan diagram timbang yang merupakan bobot/nilai masing-masing jenis komoditi pertanian hasil produksi pertanian dan barang/jasa yang termasuk dalam paket komoditas. Diagram timbang tersebut disusun pada tahun dasar, dan merupakan periode waktu yang ditentukan sebagai permulaan dihitungnya angka indeks. Data NTP tahun 2023 sampai dengan 2025 menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100).

Nilai diagram timbang atau penimbang yang digunakan dalam penyusunan indeks yang diterima (IT) adalah nilai produksi yang dijual oleh petani dari setiap jenis barang hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Data yang digunakan adalah produksi, harga produsen dan persentase *marketed surplus* setiap komoditas. Sementara nilai penimbang dalam harga yang dibayar (IB) adalah nilai konsumsi/nilai biaya barang-barang atau jasa yang dikeluarkan/dibeli baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk memproduksi hasil pertanian.

Nilai Tukar Petani (NTP) Pertanian Gabungan dan Pertanian Sempit

NTP dapat digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk melihat tingkat kesejahteraan petani secara cepat atau jangka pendek, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. Dalam jangka menengah/panjang, NTP akan lebih akurat bila diiringi dengan indikator volume produksi pertanian atau sumber pendapatan lain. NTP juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga.

Dalam analisis NTP ini, data yang digunakan adalah data tahun 2023 sampai dengan 2025 menggunakan tahun dasar 2018=100 dan data NTP tahun 2025 yang digunakan sampai dengan bulan Oktober. Cakupan data pertanian sempit meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan, sementara pertanian luas adalah pertanian sempit dan perikanan.

Dari Tabel 4.6.1 terlihat pada tahun 2023, nilai IT pertanian gabungan secara nasional sebesar 131,59 yang menunjukkan adanya peningkatan rata-rata tingkat harga produk pertanian sebesar 31,59% dibandingkan dengan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun dasar 2018. Demikian pula, nilai IB pada tahun 2023 sebesar 117,01 yang menunjukkan peningkatan harga kebutuhan petani sebesar 17,01% dibandingkan tingkat harga kebutuhan petani pada tahun 2018. Pada tahun 2023, NTP nasional gabungan sebesar 112,46 yang menunjukkan bahwa daya beli riil petani pada tahun 2023 lebih tinggi 12,46% dibanding daya beli riil petani tahun 2018.

Pada tahun 2024, terlihat nilai IT pertanian luas secara nasional sebesar 144,49 yang menunjukkan adanya peningkatan rata-rata tingkat harga produk pertanian sebesar 44,49% dibandingkan dengan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun dasar 2018. Nilai IB tahun 2024 sebesar 120,79 juga menunjukkan adanya peningkatan harga

kebutuhan petani sebesar 20,79% dibandingkan tingkat harga kebutuhan petani pada tahun 2018. NTP nasional gabungan tahun 2024 sebesar 119,62% menunjukkan daya beli riil petani pada tahun 2024 lebih tinggi 19,62% dibanding daya beli riil petani tahun 2018.

Sementara itu rata-rata nilai NTP nasional gabungan bulan Januari-Oktober tahun 2025 sebesar 122,97, meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata nilai NTP Januari-Oktober tahun 2024 yang sebesar 119,13. Hal ini berarti bahwa rata-rata daya beli riil petani selama Januari-Oktober 2025 meningkat sebesar 3,22% dibandingkan tahun 2024 periode yang sama.

Perhitungan nilai IT, IB dan NTP nasional sektor pertanian sempit hanya mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan peternakan, tanpa memperhitungkan subsektor perikanan. Nilai IT pertanian sempit tahun 2023 sebesar 131,95 yang menunjukkan adanya peningkatan rata-rata tingkat harga produk pertanian sebesar 31,95% dibandingkan dengan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun dasar 2018. Nilai IB pertanian sempit pada tahun 2023 sebesar 117,06 yang menunjukkan peningkatan harga kebutuhan petani sebesar 17,06% dibandingkan tingkat harga kebutuhan petani pada tahun 2018. Pada tahun 2023, NTP nasional pertanian sempit sebesar 112,72 yang menunjukkan bahwa daya beli riil petani pada sektor pertanian sempit di tahun 2023 lebih tinggi 12,72% dibanding daya beli riil petani tahun 2018.

Pada tahun 2024 terlihat nilai IT pertanian sempit secara nasional sebesar 145,34 yang menunjukkan adanya peningkatan rata-rata tingkat harga produk pertanian sebesar 45,34% dibandingkan dengan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun dasar 2018. Nilai IB pertanian sempit tahun 2024 sebesar 120,85 juga menunjukkan adanya peningkatan harga kebutuhan petani sebesar 20,85% dibandingkan tingkat harga kebutuhan petani pada tahun 2018. NTP nasional pertanian sempit tahun 2024 sebesar 120,26 yang menunjukkan daya beli riil petani di sektor

pertanian sempit pada tahun 2024 lebih tinggi 20,26% dibanding daya beli riil petani tahun 2018.

Sementara itu rata-rata nilai NTP nasional pertanian sempit periode bulan Januari-Oktober tahun 2025 sebesar 123,72, meningkat dibandingkan rata-rata nilai NTP periode Januari-Oktober tahun 2024 yang sebesar 119,76. Hal ini berarti bahwa rata-rata daya beli riil petani di sektor pertanian sempit selama Januari-Oktober 2025 meningkat sebesar 3,31% dibandingkan tahun 2024 periode yang sama (Tabel 4.6.1).

Tabel 4.6.1. Perkembangan It, Ib, NTP dan NTUP Nasional, 2023 - 2025

No.	Uraian	Tahun				Pertumb. Jan-Okt'25 thd Jan- Okt'24 (%)
		2023	2024	Januari-Oktober		
				2024	2025	
	Nasional					
1	IT	131,59	144,49	143,75	152,06	5,78
2	IB	117,01	120,79	120,67	123,66	2,48
3	NTP	112,46	119,62	119,13	122,97	3,22
	Nasional Pertanian Sempit					
1	IT	131,95	145,34	144,58	153,09	5,88
2	IB	117,06	120,85	120,73	123,74	2,49
3	NTP	112,72	120,26	119,76	123,72	3,31
	Nasional Usaha Pertanian					
1	IT	131,59	144,49	143,75	152,06	5,78
2	IB (BPPBM)	116,24	118,17	118,07	120,17	1,78
3	NTUP	113,21	122,27	121,76	126,54	3,93

Sumber : BPS

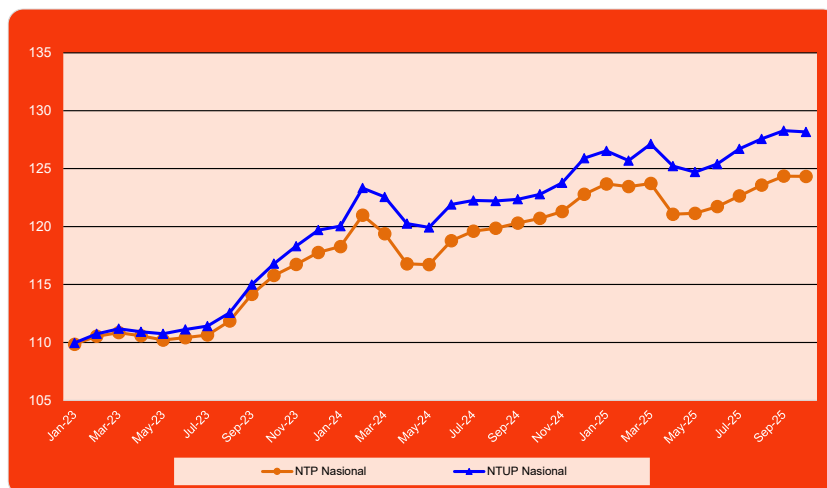
Keterangan : Tahun 2022-2024 menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100)

Nilai Tukar Usaha Pertanian adalah nilai tukar yang mempertimbangkan pengeluaran hanya dari usaha taninya yakni biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), tanpa memperhitungkan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga. Seperti telah disebutkan sebelumnya, rata-rata nilai IT bulan Januari-Oktober tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 5,78% dibanding tahun 2024 periode yang sama, sementara nilai IB dari usaha taninya pada periode

tersebut naik sebesar 1,78%. Laju peningkatan nilai IT yang lebih besar dari laju biaya usaha tani yang dikeluarkan mengakibatkan NTUP bulan Januari-Oktober tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024 periode yang sama yaitu sebesar 3,93%. NTUP pada tahun 2025 (Januari-Oktober) sebesar 126,54 yang menunjukkan bahwa pendapatan petani lebih besar 26,54% dari pada nilai pengeluaran untuk usaha taninya jika dibandingkan kondisi tahun 2018 (Tabel 4.6.1).

Perkembangan NTP nasional pertanian luas periode bulanan tahun 2023-2025 (2018=100) menunjukkan pola yang hampir sama dengan perkembangan NTUP nasional pada periode yang sama, keduanya cenderung stabil dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 0,42% dan 0,51% per bulan. Laju peningkatan NTUP yang hampir sama dengan laju peningkatan NTP tersebut menyebabkan perkembangan pola nilai NTP dan NTUP dari bulan ke bulan relatif sama dan stabil. Hal ini menunjukkan laju peningkatan yang hampir sama untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan laju peningkatan pengeluaran untuk biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) pada periode tersebut. Dengan asumsi bahwa volume kebutuhan rumah tangga dan keperluan usaha tani adalah tetap, maka dapat dikatakan laju peningkatan harga barang konsumsi rumah tangga beriringan dengan laju peningkatan harga barang produksi untuk keperluan usaha taninya.

Nilai NTP dan NTUP bulanan secara nasional sektor pertanian luas tertinggi terjadi pada bulan September 2025 yaitu dengan nilai NTP sebesar 124,36 dan nilai NTUP sebesar 128,28. NTP dan NTUP terendah terjadi pada Januari 2023 dengan NTP sebesar 109,84 dan NTUP sebesar 109,95. Perkembangan NTP dan NTUP nasional bulanan selama Januari 2023 sampai dengan Oktober 2025 seperti yang tersaji pada Gambar 4.6.1.



Gambar 4.6.1. Perkembangan NTP dan NTUP Nasional Bulanan, Januari 2023 sd Oktober 2025 (Tahun Dasar 2018 = 100)

NTP dan NTUP Menurut Subsektor

Pada tahun 2023, nilai IT subsektor tanaman pangan sebesar 126,27 yang menunjukkan rata-rata tingkat harga produk tanaman pangan pada tahun 2023 naik sebesar 26,27% dibandingkan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun 2018. Dapat dilihat bahwa IT Padi dan Palawija pada tahun 2023 masing-masing sebesar 127,26 dan 124,89. Nilai IB subsektor tanaman pangan tahun 2023 sebesar 117,31, ini menunjukkan tingkat pengeluaran petani untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi usaha taninya lebih tinggi 17,31% dibanding tingkat pengeluaran petani tahun 2018. NTP subsektor tanaman pangan pada tahun 2023 sebesar 107,63, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani tanaman pangan pada tahun 2023 meningkat sebesar 7,63% dibandingkan dengan kondisi tahun 2018.

Pada tahun 2024, nilai IT subsektor tanaman pangan sebesar 133,83 yang menunjukkan rata-rata tingkat harga produk tanaman pangan pada tahun 2024 naik sebesar 33,83% dibandingkan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun 2018. IT Padi dan Palawija pada tahun 2024 masing-masing sebesar 135,99 dan 129,16. Nilai IB subsektor

tanaman pangan tahun 2024 sebesar 121,17 ini menunjukkan tingkat pengeluaran petani untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi usaha taninya lebih tinggi 21,17% dibanding tingkat pengeluaran petani tahun 2018. NTP subsektor tanaman pangan pada tahun 2024 sebesar 110,45, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani tanaman pangan pada tahun 2024 meningkat sebesar 10,45% dibandingkan dengan kondisi tahun 2018

Pada periode Januari-Oktober 2025, nilai rata-rata IT subsektor tanaman pangan sebesar 137,10. Ini menunjukkan rata-rata tingkat harga produk tanaman pangan pada Januari-Oktober tahun 2025 naik sebesar 37,10% dibandingkan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun 2018. Dapat dilihat bahwa IT Padi dan Palawija pada Januari-Oktober tahun 2025 masing-masing sebesar 140,55 dan 128,43. Nilai IT tahun 2025 ini meningkat sebesar 2,27% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Pada periode yang sama tahun 2025, nilai IB subsektor tanaman pangan menunjukkan peningkatan sebesar 2,63% dibandingkan periode Januari-Oktober tahun 2024. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga barang konsumsi rumah tangga dan harga biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) masing-masing sebesar 2,88% dan 1,91%. NTP periode Januari-Oktober tahun 2025 sebesar 110,38, yang berarti bahwa kesejahteraan petani tanaman pangan pada Januari-Oktober tahun 2025 meningkat 10,38% dibandingkan dengan kondisi petani tahun 2018. NTP periode Januari-Oktober tahun 2025 ini menurun sebesar 0,35% jika dibandingkan NTP tahun 2024 periode yang sama.

Pada Januari-Oktober 2025 NTUP subsektor tanaman pangan mencapai 113,74, maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani dari usaha pertanian tanaman pangan tanpa memperhitungkan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 13,74% dibandingkan kondisi tahun 2018. NTUP Januari-Oktober 2025 ini

mengalami peningkatan sebesar 0,35% dibandingkan tahun 2024 periode yang sama (Tabel 4.6.2).

Tabel 4.6.2. Perkembangan IT, IB, NTP dan NTUP
Subsektor Tanaman Pangan, 2023 – 2025

No	Sub Sektor	Tahun				Pertumb. Jan-Okt'25 thd Jan- Okt'24 (%)
		2023	2024	Januari-Oktober		
				2024	2025	
1	IT	126,27	133,83	134,05	137,10	2,27
	- Padi	127,26	135,99	135,98	140,55	3,36
	- Palawija	124,89	129,16	129,94	128,43	-1,16
2	IB	117,31	121,17	121,02	124,20	2,63
	- Konsumsi Rumah Tangga	117,80	122,27	122,11	125,62	2,88
	- Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal	116,17	118,39	118,27	120,53	1,91
3	NTP	107,63	110,45	110,77	110,38	-0,35
4	Nilai Tukar Usaha Pertanian	108,69	113,04	113,34	113,74	0,35

Sumber : BPS

Keterangan : Tahun 2023 - 2025 menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100)

Pada subsektor hortikultura, nilai IT subsektor hortikultura tahun 2024 sebesar 141,82 yang menunjukkan rata-rata tingkat harga produk hortikultura pada tahun 2024 naik sebesar 41,82% dibandingkan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun 2018. Nilai IB subsektor hortikultura tahun 2024 sebesar 120,48, ini menunjukkan tingkat pengeluaran petani hortikultura untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi usaha taninya lebih tinggi 20,48% dibanding tingkat pengeluaran petani tahun 2018.

Pada periode Januari-Oktober 2025, nilai rata-rata IT subsektor hortikultura sebesar 152,78. Hal ini menunjukkan rata-rata tingkat harga produk hortikultura pada Januari-Oktober tahun 2025 naik sebesar 52,78% dibandingkan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun 2018. Nilai IT Januari-Oktober 2025 ini meningkat sebesar 7,41% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Peningkatan nilai IT subsektor hortikultura ini merupakan kontribusi dari naiknya indeks harga jual komoditas sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman obat masing-masing sebesar 8,46%, 1,08% dan 8,69%.

Pada periode yang sama tahun 2025, nilai IB subsektor hortikultura menunjukkan peningkatan sebesar 2,71%, dibandingkan periode Januari-Oktober 2024. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga barang konsumsi rumah tangga dan harga biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) masing-masing sebesar 2,79% dan 2,35%.

NTP subsektor hortikultura tahun 2024 sebesar 117,71, yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani hortikultura sebesar 17,71% dibanding kondisi petani tahun 2018. Rata-rata NTP subsektor hortikultura bulan Januari-Oktober 2025 sebesar 123,61 yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani hortikultura meningkat 23,61% dibanding tingkat kesejahteraan petani tahun 2018. NTP tahun 2025 ini meningkat sebesar 4,58% dibanding NTP subsektor hortikultura tahun 2024 periode yang sama (Tabel 4.6.3).

NTUP hortikultura pada tahun 2024 sebesar 121,78, ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan petani hortikultura pada tahun 2024 sebesar 21,78% dibanding tingkat kesejahteraan pada tahun 2018, tanpa memperhitungkan pengeluaran petani untuk konsumsi rumah tangga. Sementara itu pada Januari-Oktober 2025 NTUP subsektor hortikultura sebesar 128,30, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani hortikultura selama Januari-Oktober 2025 meningkat 28,30% dibanding tingkat kesejahteraan petani tahun 2018, tanpa memperhitungkan pengeluaran petani untuk konsumsi rumah tangga. NTUP hortikultura ini juga meningkat sebesar 4,94% dibanding tahun 2024 periode yang sama (Tabel 4.6.3).

Tabel 4.6.3. Perkembangan IT, IB, NTP dan NTUP Subsektor Hortikultura, 2023 – 2025

No	Sub Sektor	Tahun				Pertumb. Jan-Okt'25 thd Jan- Okt'24 (%)
		2023	2024	Januari-Oktober		
				2024	2025	
1	IT	130,45	141,82	142,24	152,78	7,41
	- Sayur-sayuran	136,63	150,74	151,38	164,18	8,46
	- Buah-buahan	112,60	115,39	115,81	117,06	1,08
	- Tanaman obat	97,19	112,29	111,14	120,80	8,69
2	IB	116,73	120,48	120,34	123,60	2,71
	- Konsumsi Rumah Tangga	117,59	122,37	122,21	125,62	2,79
	- Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal	114,92	116,45	116,35	119,08	2,35
3	NTP	111,75	117,71	118,20	123,61	4,58
4	Nilai Tukar Usaha Pertanian	113,51	121,78	122,26	128,30	4,94

Sumber : BPS

Keterangan : Tahun 2023 - 2025 menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100)

Pada subsektor perkebunan rakyat, nilai IT tahun 2024 sebesar 180,35 yang menunjukkan rata-rata tingkat harga produk tanaman perkebunan rakyat pada tahun 2024 naik sebesar 80,35% dibandingkan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun 2018. Nilai IB subsektor perkebunan rakyat tahun 2024 sebesar 120,96, yang menunjukkan tingkat pengeluaran petani perkebunan rakyat untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi usaha taninya lebih tinggi 20,96% dibanding tingkat pengeluaran petani tahun 2018.

Pada periode Januari-Oktober 2025, nilai rata-rata IT subsektor perkebunan rakyat sebesar 198,75, hal ini menunjukkan rata-rata tingkat harga produk tanaman perkebunan rakyat pada Januari-Oktober 2025 naik sebesar 98,75% dibandingkan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun 2018. Nilai IT Januari-Oktober 2025 ini meningkat sebesar 12,32% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Pada periode yang sama tahun 2025, nilai IB subsektor perkebunan rakyat menunjukkan peningkatan sebesar 2,46%, dibandingkan periode Januari-Oktober tahun 2024. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga barang konsumsi

rumah tangga dan harga biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) masing-masing sebesar 2,63% dan 1,74%.

NTP subsektor perkebunan rakyat tahun 2024 sebesar 149,10, yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani perkebunan rakyat sebesar 49,10% dibanding kondisi petani tahun 2018. Laju peningkatan nilai IT lebih besar dibandingkan laju peningkatan nilai IB pada periode Januari-Oktober 2025, sehingga pertumbuhan NTP subsektor perkebunan rakyat periode Januari-Oktober 2025 mengalami peningkatan sebesar 9,62% dibanding tahun 2024 periode yang sama. NTP perkebunan rakyat Januari-Oktober 2025 yang sebesar 160,47 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani perkebunan rakyat tahun 2025 meningkat 60,47% dibanding tingkat kesejahteraan petani tahun 2018. NTUP perkebunan rakyat pada tahun 2024 mencapai 151,23 yang berarti bahwa tanpa memperhatikan pengeluaran konsumsi rumah tangga, kesejahteraan petani perkebunan rakyat di tahun 2024 mengalami peningkatan kesejahteraan sebesar 51,23% jika dibandingkan kondisi tahun 2018. NTUP subsektor perkebunan rakyat periode Januari-Oktober 2025 sebesar 163,94, mengalami peningkatan sebesar 10,40% dibanding tahun 2024 periode yang sama (Tabel 4.6.4).

Tabel 4.6.4. Perkembangan IT, IB, NTP dan NTUP Subsektor Perkebunan Rakyat, 2023 – 2025

No	Sub Sektor	Tahun				Pertumb. Jan-Okt'25 thd Jan- Okt'24 (%)
		2023	2024	Januari-Oktober		
				2024	2025	
1	IT	150,38	180,35	176,94	198,75	12,32
	- Tanaman Perkebunan Rakyat	150,38	180,35	176,94	198,75	12,32
2	IB	117,04	120,96	120,88	123,85	2,46
	- Konsumsi Rumah Tangga	116,89	121,50	121,42	124,62	2,63
	- Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal	117,78	119,26	119,16	121,23	1,74
3	NTP	128,49	149,10	146,38	160,47	9,62
4	Nilai Tukar Usaha Pertanian	127,67	151,23	148,49	163,94	10,40

Sumber : BPS

Keterangan : Tahun 2023 - 2025 menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100)

Pada subsektor peternakan, nilai IT tahun 2024 sebesar 122,91 yang menunjukkan rata-rata tingkat harga produk peternakan pada tahun 2024 naik sebesar 22,91% dibandingkan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun 2018. Nilai IB subsektor peternakan tahun 2024 sebesar 119,94, yang menunjukkan tingkat pengeluaran peternak untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi usaha ternaknya lebih tinggi 19,94% dibanding tingkat pengeluaran peternak tahun 2018.

Pada periode Januari-Oktober 2025, nilai rata-rata IT subsektor peternakan sebesar 123,72. Hal ini menunjukkan rata-rata tingkat harga produk peternakan pada Januari-Oktober tahun 2025 naik sebesar 23,72% dibandingkan rata-rata tingkat harga produk yang sama pada tahun 2018. Indeks harga yang diterima petani subsektor peternakan disusun oleh empat kelompok komoditas, yaitu ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hasil ternak. Selama periode Januari-Oktober 2025 jika bandingkan periode yang sama 2024 terjadi kenaikan harga jual produk peternakan kecuali harga jual ternak kecil. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan IT sebesar 0,70% yakni karena naiknya harga jual ternak besar, unggas dan hasil ternak masing-masing sebesar 0,66%, 1,02% dan 1,65%, sementara ternak kecil turun sebesar 0,37%. Begitu juga terjadi kenaikan biaya pengeluaran subsektor peternakan pada periode yang sama tahun 2025. Kenaikan biaya pengeluaran ditunjukkan oleh meningkatnya IB sebesar 1,92%, yang terdiri dari kenaikan harga barang konsumsi rumah tangga sebesar 2,94% dan biaya produksi dan penambahan barang modal subsektor peternakan sebesar 1,11%.

NTP subsektor peternakan pada tahun 2024 sebesar 102,48, yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan peternak tahun 2024 meningkat sebesar 2,48% dibanding tingkat kesejahteraan peternak tahun 2018. Laju peningkatan IT subsektor peternakan selama periode Januari-Oktober 2025 lebih kecil dibandingkan laju peningkatan IB subsektor peternakan

periode yang sama, sehingga terjadi penurunan NTP subsektor peternakan sebesar 1,20% dibandingkan pada periode Januari-Oktober tahun 2024.

NTUP subsektor peternakan tahun 2024 sebesar 104,78 menunjukkan bila tanpa memperhatikan pengeluaran peternak untuk konsumsi rumah tangga maka terjadi peningkatan kesejahteraan peternak sebesar 4,78% dibandingkan tahun 2018. NTUP subsektor peternakan periode Januari-Oktober 2025 menunjukkan nilai lebih dari 100 yaitu sebesar 104,39, yang berarti bahwa tanpa memperhitungkan pengeluaran konsumsi rumah tangga peternak dapat dikatakan bahwa kesejahteraan peternak tahun 2025 meningkat sebesar 4,39% dibandingkan kesejahteraan peternak tahun 2018. NTUP tahun 2025 ini menurun sebesar 0,40% dibandingkan NTUP subsektor peternakan periode yang sama tahun 2024 (Tabel 4.6.5).

Tabel 4.6.5. Perkembangan IT, IB, NTP dan NTUP Subsektor Peternakan, 2023 – 2025

No	Sub Sektor	Tahun				Pertumb. Jan-Okt'25 thd Jan- Okt'24 (%)
		2023	2024	Januari-Oktober		
				2024	2025	
1	IT	118,56	122,91	122,86	123,72	0,70
	- Ternak Besar	118,11	123,44	123,29	124,11	0,66
	- Ternak Kecil	118,28	122,78	122,69	122,24	-0,37
	- Unggas	116,14	120,30	120,38	121,61	1,02
	- Hasil Ternak	125,56	127,11	127,28	129,38	1,65
2	IB	116,45	119,94	119,82	122,13	1,92
	- Konsumsi Rumah Tangga	118,09	123,16	123,00	126,61	2,94
	- Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal	115,05	117,31	117,22	118,52	1,11
3	NTP	101,81	102,48	102,54	101,31	-1,20
4	Nilai Tukar Usaha Pertanian	103,05	104,78	104,81	104,39	-0,40

Sumber : BPS

Keterangan : Tahun 2023 - 2025 menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100)

IT, IB, NTP dan NTUP Menurut Provinsi

Jika dibandingkan dengan tingkat harga jual produk pertanian pada tahun 2018, maka peningkatan tertinggi dari harga jual produk pertanian yang terjadi pada tahun 2023 adalah terjadi di Provinsi Riau yang

mencapai 76,89% (IT sebesar 176,89) sedangkan yang terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 10,13% (IT sebesar 110,13), seperti terlihat pada Tabel 4.6.6. Pada tahun 2024, peningkatan tertinggi harga jual produk pertanian jika dibandingkan dengan tingkat harga jual produk pertanian tahun 2018, terjadi di Provinsi Bengkulu yang mencapai 126,48% dan yang terendah terjadi di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 13,80% (Tabel 4.6.6).

Tabel 4.6.6. Perkembangan IT Menurut Provinsi, 2023 – 2025

No.	Provinsi	Tahun				Pertumb. Jan- Okt'25 thd Jan- Okt'24 (%)
		2023	2024	Januari-Oktober		
				2024	2025	
1	Aceh	129,95	138,87	138,03	148,10	7,30
2	Sumatera Utara	145,33	162,56	160,01	175,59	9,74
3	Sumatera Barat	130,36	151,51	149,88	160,44	7,04
4	Riau	176,89	204,48	199,64	227,45	13,93
5	Jambi	160,36	188,91	185,51	211,61	14,07
6	Sumatera Selatan	124,26	148,68	146,66	159,61	8,84
7	Bengkulu	174,79	226,48	221,33	256,73	16,00
8	Lampung	128,73	151,80	150,96	160,73	6,47
9	Kep. Bangka Belitung	139,72	160,82	158,74	184,68	16,34
10	Kepulauan Riau	117,12	121,19	121,18	122,32	0,95
11	DKI Jakarta	115,46	117,29	117,20	121,50	3,67
12	Jawa Barat	123,69	133,26	133,32	138,52	3,90
13	Jawa Tengah	132,40	140,55	140,80	143,93	2,22
14	DI Yogyakarta	125,08	131,26	131,32	137,14	4,44
15	Jawa Timur	129,07	136,80	136,83	140,92	2,98
16	Banten	126,37	134,19	134,01	138,82	3,59
17	Bali	116,50	123,63	123,61	128,14	3,66
18	Nusa Tenggara Barat	134,15	144,54	143,97	152,78	6,12
19	Nusa Tenggara Timur	110,13	116,80	116,40	119,58	2,73
20	Kalimantan Barat	162,38	187,27	183,13	209,02	14,14
21	Kalimantan Tengah	143,40	157,21	155,52	170,89	9,88
22	Kalimantan Selatan	127,82	137,70	137,34	142,64	3,86
23	Kalimantan Timur	149,24	165,24	163,63	179,40	9,64
24	Kalimantan Utara	124,60	128,40	127,83	133,44	4,39
25	Sulawesi Utara	125,45	136,43	135,41	159,39	17,71
26	Sulawesi Tengah	125,78	142,93	143,38	142,73	-0,45
27	Sulawesi Selatan	123,71	138,56	137,92	147,05	6,62
28	Sulawesi Tenggara	118,41	135,91	135,70	137,34	1,21
29	Gorontalo	122,02	129,57	129,79	141,09	8,71
30	Sulawesi Barat	143,73	174,09	171,61	176,53	2,86
31	Maluku	121,27	122,98	123,46	124,18	0,59
32	Maluku Utara	120,10	124,47	124,29	132,90	6,92
33	Papua Barat	112,13	114,93	114,92	117,81	2,51
34	Papua Barat Daya	0,00	113,80	113,33	117,47	3,66
35	Papua	111,08	114,39	114,17	120,71	5,73
36	Papua Selatan	0,00	114,59	113,96	126,34	10,86
37	Papua Tengah	0,00	113,84	113,70	116,99	2,89
38	Papua Pegunungan	0,00	115,26	115,19	115,22	0,03

Sumber : BPS

Keterangan : Tahun 2023-2025 menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100)

*) Tahun 2025 data rata-rata Januari s.d Oktober 2025

Rata-rata harga jual produk pertanian atau IT bulan Januari-Oktober 2025 tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu dengan IT sebesar 256,73 yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat harga jual produk pertanian di Bengkulu selama periode Januari-Oktober 2025 lebih besar 156,73% dibandingkan harga produk pertanian tahun 2018. Sementara itu rata-rata harga jual produk pertanian terendah pada periode yang sama tahun 2025 terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yaitu sebesar 115,22, yang berarti bahwa rata-rata tingkat harga jual produk pertanian di Papua Barat Daya selama periode Januari-Oktober 2025 lebih besar 15,22% dibandingkan harga produk pertanian tahun 2018.

Perkembangan rata-rata tingkat harga jual produk pertanian atau IT selama periode Januari-Oktober 2025 dibandingkan tahun 2024 periode yang sama menunjukkan peningkatan pada semua provinsi kecuali di provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan. Peningkatan tertinggi dari harga jual produk pertanian atau IT pada periode tersebut adalah di Provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 17,71%, IT Provinsi Sulawesi Utara Januari-Oktober 2024 sebesar 135,41, meningkat di tahun 2025 menjadi 159,39. Pertumbuhan tingkat harga jual produk pertanian atau IT terendah pada periode yang sama adalah di Provinsi Sulawesi Tengah menurun sebesar 0,45% dari periode Januari-Oktober 2024 yang sebesar 143,38 menjadi 142,73 pada tahun 2025 periode yang sama (Tabel 4.6.6).

Jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat harga kebutuhan petani pada tahun 2018, maka peningkatan tertinggi rata-rata tingkat harga kebutuhan petani pada tahun 2023 terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 20,94% dan terendah terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan peningkatan hanya sebesar 7,21%. Pada tahun 2024, rata-rata tingkat harga kebutuhan petani atau IB tertinggi terjadi di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 125,17, yang berarti bahwa tingkat harga kebutuhan petani di DI Yogyakarta selama tahun 2024 lebih tinggi 25,17% dibandingkan tingkat kebutuhan petani tahun 2018. Sedangkan rata-rata

tingkat harga kebutuhan petani atau IB terendah terjadi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 110,15, yang berarti bahwa tingkat harga kebutuhan petani di DKI Jakarta selama tahun 2024 lebih tinggi 10,15% dibandingkan tingkat kebutuhan petani tahun 2018. Rata-rata tingkat harga kebutuhan petani atau IB tertinggi pada periode Januari-Oktober 2025 terjadi di DI Yogyakarta dengan nilai IB sebesar 128,03 yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat harga kebutuhan petani di DI Yogyakarta selama Januari-Oktober 2025 lebih tinggi 28,03% dibandingkan tingkat kebutuhan petani tahun 2018. Sementara itu rata-rata tingkat harga kebutuhan petani yang terendah pada periode tersebut terjadi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 113,13 yang berarti bahwa tingkat harga kebutuhan petani di DKI Jakarta selama Januari-Oktober 2025 lebih tinggi 13,13% dibandingkan tingkat kebutuhan petani tahun 2018 (Tabel 4.6.7).

Perkembangan rata-rata tingkat harga kebutuhan petani atau IB periode Januari-Oktober 2025 dibandingkan tahun 2024 periode yang sama menunjukkan peningkatan di semua provinsi di Indonesia. Peningkatan tertinggi dari harga kebutuhan petani atau IB pada periode tersebut adalah di Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai 4,65%, rata-rata IB Provinsi Sulawesi Barat Januari-Oktober 2024 sebesar 120,39 dan meningkat di tahun 2025 menjadi 125,99. Pertumbuhan tingkat harga kebutuhan petani atau IB terendah pada periode yang sama terjadi di Provinsi Riau dengan pertumbuhan hanya sebesar 1,25% dari periode Januari-Oktober 2024 yang sebesar 118,05 menjadi 119,53 pada tahun 2025 periode yang sama.

Tabel 4.6.7. Perkembangan IB Menurut Provinsi, 2023 – 2025

No.	Provinsi	Tahun				Pertumb. Jan-Okt'25 thd Jan- Okt'24 (%)
		2023	2024	Januari-Oktober		
				2024	2025	
1	Aceh	113,64	116,44	116,37	120,17	3,26
2	Sumatera Utara	115,96	119,33	119,24	122,41	2,66
3	Sumatera Barat	118,20	122,45	122,52	125,16	2,16
4	Riau	115,67	118,04	118,05	119,53	1,25
5	Jambi	116,11	120,99	121,02	123,55	2,09
6	Sumatera Selatan	118,23	123,03	122,96	126,18	2,62
7	Bengkulu	118,98	124,51	124,42	127,17	2,20
8	Lampung	117,72	121,46	121,34	124,38	2,50
9	Kep. Bangka Belitung	118,08	120,19	120,20	121,77	1,30
10	Kepulauan Riau	112,09	115,63	115,47	117,32	1,60
11	DKI Jakarta	107,21	110,15	109,99	113,13	2,85
12	Jawa Barat	115,10	118,81	118,71	121,25	2,14
13	Jawa Tengah	119,13	123,07	122,94	125,84	2,36
14	DI Yogyakarta	120,64	125,17	125,01	128,03	2,42
15	Jawa Timur	117,91	121,91	121,70	125,16	2,84
16	Banten	119,12	123,38	123,28	125,90	2,12
17	Bali	117,09	121,78	121,45	125,63	3,44
18	Nusa Tenggara Barat	116,18	119,26	119,10	122,32	2,70
19	Nusa Tenggara Timur	113,77	117,27	117,22	118,80	1,35
20	Kalimantan Barat	116,80	120,83	120,65	123,07	2,01
21	Kalimantan Tengah	120,94	124,88	124,78	127,53	2,21
22	Kalimantan Selatan	116,75	120,42	120,23	122,29	1,71
23	Kalimantan Timur	115,65	119,79	119,67	122,75	2,57
24	Kalimantan Utara	111,33	113,82	113,68	115,22	1,35
25	Sulawesi Utara	114,85	119,53	119,44	123,57	3,46
26	Sulawesi Tengah	118,26	121,17	121,11	124,88	3,11
27	Sulawesi Selatan	114,62	117,55	117,47	120,36	2,46
28	Sulawesi Tenggara	116,12	119,16	119,11	123,16	3,39
29	Gorontalo	114,91	118,83	118,78	122,71	3,31
30	Sulawesi Barat	118,33	120,37	120,39	125,99	4,65
31	Maluku	116,14	120,17	120,08	124,58	3,74
32	Maluku Utara	116,19	120,36	120,12	124,84	3,93
33	Papua Barat	112,34	114,64	114,44	116,87	2,13
34	Papua Barat Daya	0,00	113,92	113,82	115,94	1,86
35	Papua	110,72	112,83	112,62	115,75	2,78
36	Papua Selatan	0,00	112,80	112,70	114,37	1,48
37	Papua Tengah	0,00	113,90	113,67	117,42	3,31
38	Papua Pegunungan	0,00	114,29	113,98	117,16	2,79

Sumber : BPS

Keterangan : Tahun 2023-2025 menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100)

*) Tahun 2025 data rata-rata Januari s.d Oktober 2025

Rata-rata daya beli riil petani atau NTP tertinggi selama tahun 2023 terjadi di Provinsi Riau dengan NTP sebesar 152,93 yang menunjukkan bahwa kesejahteraan petani di Riau selama tahun 2023 meningkat 52,93% dibandingkan tahun 2018. Sementara daya beli riil petani terendah selama

tahun 2023 terjadi di Provinsi NTT dengan NTP sebesar 96,80 yang berarti bahwa kesejahteraan petani di NTT mengalami penurunan sebesar 3,20% dibandingkan tahun 2018. Tahun 2024 NTP tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu dengan NTP sebesar 181,90 yang menunjukkan bahwa kesejahteraan petani di Bengkulu selama tahun 202 meningkat 81,90% dibandingkan tahun 2018. Sementara daya beli riil petani terendah selama tahun 2024 terjadi di Provinsi NTT dengan NTP sebesar 96,60 yang berarti bahwa kesejahteraan petani di NTT mengalami penurunan sebesar 0,40% dibandingkan tahun 2018 (Tabel 4.6.8).

Perkembangan daya beli riil petani atau NTP periode Januari-Oktober 2025 dibandingkan tahun 2024 periode yang sama menunjukkan peningkatan di beberapa provinsi kecuali di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Tengah dan Papua Pegunungan mengalami penurunan. Peningkatan tertinggi daya beli riil petani pada periode tersebut adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 14,84%, rata-rata NTP Bangka Belitung Januari-Oktober 2024 sebesar 132,06 dan meningkat di tahun 2025 menjadi 151,66. Pertumbuhan terendah daya beli riil petani pada periode yang sama terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan menurun sebesar -3,39% dari periode Januari-Oktober 2024 yang sebesar 118,38 menjadi 114,37 pada tahun 2025 periode yang sama.

Tabel 4.6.8. Perkembangan NTP Menurut Provinsi, 2023 – 2025

No.	Provinsi	Tahun				Pertumb. Jan- Okt'25 thd Jan-Okt'24 (%)
		2023	2024	Januari-Oktober		
				2024	2025	
1	Aceh	114,35	119,26	118,61	123,23	3,90
2	Sumatera Utara	125,32	136,23	134,19	143,44	6,89
3	Sumatera Barat	110,28	123,74	122,33	128,19	4,79
4	Riau	152,93	173,22	169,12	190,29	12,52
5	Jambi	138,11	156,14	153,29	171,29	11,74
6	Sumatera Selatan	105,10	120,84	119,27	126,53	6,08
7	Bengkulu	146,91	181,90	177,88	201,86	13,48
8	Lampung	109,36	124,98	124,41	129,26	3,90
9	Kep. Bangka Belitung	118,32	133,80	132,06	151,66	14,84
10	Kepulauan Riau	104,49	104,81	104,94	104,27	-0,64
11	DKI Jakarta	107,70	106,49	106,55	107,41	0,81
12	Jawa Barat	107,46	112,17	112,31	114,24	1,72
13	Jawa Tengah	111,14	114,21	114,53	114,37	-0,14
14	DI Yogyakarta	103,68	104,86	105,05	107,11	1,96
15	Jawa Timur	109,47	112,21	112,44	112,59	0,13
16	Banten	106,09	108,76	108,70	110,26	1,44
17	Bali	99,50	101,51	101,78	102,00	0,21
18	Nusa Tenggara Barat	115,47	121,20	120,88	124,90	3,33
19	Nusa Tenggara Timur	96,80	99,60	99,30	100,66	1,37
20	Kalimantan Barat	139,03	154,98	151,79	169,84	11,89
21	Kalimantan Tengah	118,57	125,89	124,64	134,00	7,51
22	Kalimantan Selatan	109,48	114,35	114,23	116,67	2,14
23	Kalimantan Timur	129,04	137,94	136,73	146,17	6,90
24	Kalimantan Utara	111,92	112,81	112,45	115,81	2,99
25	Sulawesi Utara	109,22	114,14	113,37	128,94	13,74
26	Sulawesi Tengah	106,35	117,96	118,38	114,37	-3,39
27	Sulawesi Selatan	107,93	117,87	117,41	122,19	4,07
28	Sulawesi Tenggara	101,97	114,06	113,93	111,60	-2,04
29	Gorontalo	106,19	109,04	109,27	114,96	5,20
30	Sulawesi Barat	121,47	144,62	142,54	140,25	-1,61
31	Maluku	104,41	102,34	102,81	99,72	-3,01
32	Maluku Utara	103,37	103,42	103,47	106,44	2,87
33	Papua Barat	99,82	100,26	100,42	100,80	0,38
34	Papua Barat Daya	0,00	99,90	99,56	101,31	1,75
35	Papua	100,33	101,38	101,37	104,27	2,86
36	Papua Selatan	0,00	101,58	101,11	110,46	9,24
37	Papua Tengah	0,00	99,94	100,03	99,64	-0,39
38	Papua Pegunungan	0,00	100,85	101,06	98,35	-2,68

Sumber : BPS

Keterangan : Tahun 2023-2025 menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100)

*) Tahun 2025 data rata-rata Januari s.d Oktober 2025

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 dan diasumsikan pengeluaran petani hanya mempertimbangkan rata-rata tingkat harga biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) atau tanpa

mempertimbangkan tingkat harga biaya konsumsi rumah tangga petani, NTUP tertinggi selama tahun 2023 terjadi di Provinsi Riau sebesar 148,16 dan tahun 2024 terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 180,66. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani di Riau meningkat sebesar 48,16% pada tahun 2023 dan di Bengkulu meningkat sebesar 80,66% pada tahun 2024 dibandingkan kondisi tahun 2018. Sementara NTUP terendah selama tahun 2023 dan 2024 terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai masing-masing sebesar 97,66 dan sebesar 102,29, yang menunjukkan bahwa tanpa memperhitungkan pengeluaran konsumsi rumah tangga petani maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani di NTT selama tahun 2023 menurun sebesar 2,34% dan tahun 2024 meningkat sebesar 2,29% dibandingkan tahun 2018 (Tabel 4.6.9).

Perkembangan NTUP periode Januari-Oktober 2025 dibandingkan tahun 2024 periode yang sama menunjukkan peningkatan hampir di semua provinsi, kecuali di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua Pegunungan mengalami penurunan. Peningkatan tertinggi NTUP pada periode tersebut terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 15,64%, rata-rata NTUP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Januari-Oktober 2024 sebesar 129,23 dan meningkat di tahun 2025 periode yang sama menjadi 149,44. Pertumbuhan terendah NTUP pada periode yang sama terjadi di Provinsi Papua Pegunungan dengan pertumbuhan menurun sebesar 1,74% dari periode Januari-Oktober 2024 yang sebesar 102,50 menjadi 100,71 pada tahun 2025 periode yang sama (Tabel 4.6.9).

Tabel 4.6.9. Perkembangan NTUP Menurut Provinsi, 2023 – 2025

No.	Provinsi	Tahun				Pertumb. Jan- Okt'25 thd Jan- Okt'24 (%)
		2023	2024	Januari-Oktober		
				2024	2025	
1	Aceh	114,22	120,33	119,72	126,26	5,46
2	Sumatera Utara	123,23	135,62	133,59	144,67	8,29
3	Sumatera Barat	108,87	125,60	124,21	131,99	6,27
4	Riau	148,16	168,89	165,14	185,66	12,43
5	Jambi	137,32	159,41	156,72	175,03	11,68
6	Sumatera Selatan	104,41	122,86	121,34	129,71	6,90
7	Bengkulu	140,43	180,66	176,64	201,78	14,23
8	Lampung	110,23	127,61	127,03	132,60	4,38
9	Kep. Bangka Belitung	113,91	130,93	129,23	149,44	15,64
10	Kepulauan Riau	102,44	104,93	104,97	104,99	0,02
11	DKI Jakarta	110,37	111,65	111,58	114,93	3,01
12	Jawa Barat	108,86	114,92	115,05	117,23	1,89
13	Jawa Tengah	112,71	117,17	117,51	118,01	0,43
14	DI Yogyakarta	105,97	108,13	108,23	111,17	2,71
15	Jawa Timur	111,03	115,78	115,94	116,81	0,76
16	Banten	108,45	113,84	113,75	115,21	1,28
17	Bali	101,44	106,42	106,46	108,41	1,83
18	Nusa Tenggara Barat	116,28	122,81	122,45	127,91	4,45
19	Nusa Tenggara Timur	97,66	102,29	102,00	103,74	1,71
20	Kalimantan Barat	138,85	158,46	155,03	174,16	12,34
21	Kalimantan Tengah	119,47	129,40	128,19	138,15	7,77
22	Kalimantan Selatan	109,05	115,75	115,51	118,50	2,59
23	Kalimantan Timur	130,11	142,31	140,96	152,09	7,90
24	Kalimantan Utara	113,69	116,06	115,63	119,99	3,77
25	Sulawesi Utara	108,29	116,07	115,32	133,28	15,58
26	Sulawesi Tengah	105,96	119,27	119,73	117,00	-2,28
27	Sulawesi Selatan	109,50	120,82	120,34	126,40	5,04
28	Sulawesi Tenggara	100,39	114,53	114,40	114,37	-0,03
29	Gorontalo	109,19	112,75	113,23	119,69	5,70
30	Sulawesi Barat	126,07	151,87	149,89	151,07	0,79
31	Maluku	110,79	111,19	111,73	110,68	-0,94
32	Maluku Utara	105,46	107,86	107,75	111,88	3,84
33	Papua Barat	102,91	104,67	104,75	105,96	1,16
34	Papua Barat Daya	0,00	104,22	103,81	106,83	2,91
34	Papua	101,94	105,29	105,14	109,00	3,67
36	Papua Selatan	0,00	104,84	104,28	113,29	8,64
37	Papua Tengah	0,00	102,56	102,47	104,55	2,03
38	Papua Pegunungan	0,00	102,39	102,50	100,71	-1,74

Sumber : BPS

Keterangan : Tahun 2023-2025 menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100)

*) Tahun 2025 data rata-rata Januari s.d Oktober 2025

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis kesejahteraan petani tersebut di atas, beberapa poin pentingnya adalah:

1. IPM Indonesia periode 2023-2025 termasuk dalam kategori tinggi dengan besaran indeks yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2023 IPM Indonesia sebesar 74,39 kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 75,02 dan tahun 2025 kembali naik 0,88 poin menjadi 75,90
2. Persentase rumah tangga berusaha di pertanian tahun 2024 sebesar 26,80% mengalami penurunan menjadi 25,42% (2025) , selanjutnya persentase rumah tangga buruh tani turun dari 8,38% menjadi 7,98%. Sedangkan pada rumah tangga non pertanian, persentasenya meningkat dari 64,82% menjadi 66,60%. Penurunan persentase rumah tangga berusaha di pertanian dan penurunan persentase rumah tangga buruh tani tahun 2025 bisa terjadi karena beberapa faktor seperti berkurangnya ketersediaan lahan garapan akibat alih fungsi lahan menjadi perumahan dan industri. Urbanisasi dan migrasi tenaga kerja, khususnya generasi muda juga menyebabkan penurunan persentase ini karena peluang kerja di sektor jasa dan industri lebih menarik dan dianggap memberikan prospek ekonomi yang lebih baik
3. Bila dibandingkan antara pulau Jawa dan Luar Jawa menunjukkan persentase kepala rumah tangga yang mempunyai pendidikan menengah keatas lebih besar di luar Jawa di banding di Jawa. Untuk lulusan SLTA tahun 2025 di pulau jawa sebesar 12,05%, Luar Jawa 20,48% sedangkan Pendidikan Akademi/PT di Jawa sebesar 2,71% dan luar jawa sebesar 3,76%.
4. Penguasaan bangunan tempat tinggal pada rumah tangga berusaha di pertanian di Indonesia dengan status milik sendiri tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,56 dari tahun 2025 yaitu dari 95,29% menjadi 95,82% berarti menunjukkan bahwa petani sudah menunjukkan adanya sejahtera dalam hal penguasaan bangunannya

sedangkan status bukan milik sendiri di Indonesia mengalami penurunan sebesar 11,34% yaitu dari 4,71% menjadi 4,18%, untuk kepemilikan bangunan rumah tangga tani non pertanian mengalami kenaikan sebesar 0,46%.

5. Provinsi yang memiliki persentase anggota rumah tangga berusaha di pertanian penerima KUR terbanyak pada tahun 2025 adalah Provinsi DKI Jakarta, dengan persentase penerima KUR sebesar 17,76%. Angka ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2024 yakni sebesar 0,00%.
6. selama tahun 2024-2025, maka persentase tertinggi penerimaan kredit PNM-Mekong oleh anggota rumah tangga berusaha di pertanian wilayah Jawa yakni di subsektor hortikultura sebesar 5,99% di tahun 2024 dan di wilayah Luar Jawa lebih banyak juga berasal dari rumah tangga subsektor hortikultura sebesar 6,66% di tahun 2025
7. Pada dimensi ketahanan pangan, RT tani masih tertinggal dibandingkan RT bukan tani, dimana nilai PoU-nya (11,16%) lebih tinggi dibandingkan RT bukan tani/buruh (7,15%) yang dihitung dari data Susenas. Hal ini dapat diasumsikan bahwa RT tani sebagai rumah tangga produsen justru lebih rentan terhadap kekurangan pangan. Sementara itu PoU Nasional tahun 2023 adalah 8,53%
8. Pengeluaran rumah tangga tani menunjukkan pola peningkatan yang konsisten seiring naiknya kelompok kesejahteraan, baik di Jawa maupun luar Jawa. Di Jawa, rumah tangga pada kelompok 40 persen terbawah memiliki pengeluaran sebesar Rp447.424, meningkat menjadi Rp730.197 pada kelompok menengah, dan mencapai Rp1.339.543 pada kelompok 20 persen teratas. Sementara itu, di luar Jawa, pengeluaran berada pada tingkat yang sedikit lebih tinggi untuk setiap kelompok, yaitu Rp468.229, Rp739.728, dan Rp1.374.831 secara berurutan
9. Garis kemiskinan di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, yaitu tahun 2023 garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp

569.299 per kapita/bulan atau naik 9,17% dan di pedesaan Rp. 525.050 per kapita/bulan atau naik 8,43%. Analisis dalam tulisan ini akan dilakukan analisis kemiskinan khususnya penduduk pada rumah tangga tani dan buruh tani.

10. Pengeluaran rumah tangga umum (bukan tani/buruh tani) pada tahun 2024 adalah Rp.1.876.133,- per kapita dalam sebulan. Sebesar 46,29% adalah pengeluaran untuk makanan (Rp.868.545,-). Pengeluaran untuk makanan di RTP adalah Rp.695.138,- atau 59,88% dari total pengeluarannya. Sementara RT buruh tani pengeluaran untuk makanannya 56,91% (Rp.662.028,-) dari total pengeluarannya. Berdasarkan data ini dapat diasumsikan bahwa tingkat kesejahteraan RT buruh tani paling rendah dibandingkan RTP dan RT umum, karena porsi pengeluaran untuk makanannya lebih besar dibandingkan RTP dan RT umum
11. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode 2023-2025 mengalami penurunan 4,02% per tahun, yang disebabkan adanya penurunan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,62% dan tahun 2025 dibandingkan 2024 menurun cukup signifikan 5,41%. .
12. Pada periode Maret 2023 sampai Maret 2025, secara nasional gini ratio pada rumah tangga tani, rumah tangga buruh tani dan rumah tangga non pertanian terjadi penurunan, yang berarti terjadi perubahan distribusi pengeluaran pada masing-masing rumah tangga tersebut kearah yang membaik
13. rata-rata nilai NTP nasional gabungan bulan Januari-Oktober tahun 2025 sebesar 122,97, meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata nilai NTP Januari-Oktober tahun 2024 yang sebesar 119,13. Hal ini berarti bahwa rata-rata daya beli riil petani selama Januari-Oktober 2025 meningkat sebesar 3,22% dibandingkan tahun 2024 periode yang sama.

14. Perkembangan rata-rata tingkat harga jual produk pertanian atau IT selama periode Januari-Oktober 2025 dibandingkan tahun 2024 periode yang sama menunjukkan peningkatan pada semua provinsi kecuali di provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan
15. Perkembangan rata-rata tingkat harga kebutuhan petani atau IB periode Januari-Oktober 2025 dibandingkan tahun 2024 periode yang sama menunjukkan peningkatan di semua provinsi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2018, Sensus Pertanian, Badan Pusat Statistik, Jakarta
- BPS. 2013. Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2012. BPS. Jakarta.
- BPS. 2013. Nilai Tukar Petani dan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT) 2012. BPS. Jakarta.
- BPS. 2024. Statistik Nilai Tukar Petani. 2023. Jakarta
- BPS. 2019. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2019. BPS. Jakarta.
- BPS. 2024. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022. BPS, Jakarta.
- BPS. 2023. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS. Jakarta.
- BPS. 2024. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS. Jakarta.
- BPS. 2025. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS. Jakarta.
- Muchjidin, dkk. 2000. Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Suhariyanto K., 2010. Indikator Kesejahteraan Petani. Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta.
- Imawan, Wynandin. 2017. Indeks Komposit Kesejahteraan Petani. Tayangan disampaikan pada workshop Pusdatin Kementan. Jakarta
- Anonimous, 2018. <http://digilib.unila.ac.id/3181/16/BAB%20II.pdf> [terhubung berkala]
- Anonimous, 2018. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BCahyat0701I.pdf [terhubung berkala]



PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
JL. HARSONO RM NO. 3 GD. D LT. IV RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
TELP. (021) 7805305, FAX (021) 7805305, 7806385
Homepage : <https://satudata.pertanian.go.id/>